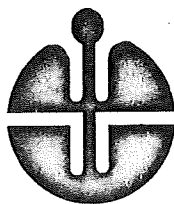


SERI LAPORAN PEP-LIPI NO. 3/1996

ISSN 0854-3593

**DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL**

**KASUS KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (AFTA) DAN
SEGITIGA PERTUMBUHAN (IMT-GT, IMS-GT DAN BIMP-EAGA)**



Penyunting
Sukarna Wiranta

**PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 1996**

LEMBAR BIBLIOGRAFI

1. No. Laporan: 3/1996	2. No. Katalog/Klasifikasi: 0854-3593
3. Judul dan Sub Judul: Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Kasus Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Segitiga Pertumbuhan IMT-GT, IMT-GT dan BIMP-EAGA	4. Jenis Laporan: Laporan Penelitian
5. Penyunting: Sukarna Wiranta Penulis: Lihat di masing-masing judul tulisan	6. Tanggal Laporan: Maret 1996
	7. Jumlah halaman: 113 halaman
8. Nama & Alamat Badan Pelaksana: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PEP-LIPI) Widya Graha Lantai IV dan V Jln. Gatot Subroto 10 Jakarta Selatan Telp. 5251542	9. Nama Proyek: Proyek Penelitian dan Pengembangan Potensi SDA dan Sosial Ekonomi dan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah - LIPI Nomor Tolok Ukur: 01.05B Kode Proyek: 16.2.113663.09.14.01
10. Abstrak: Perkembangan perekonomian dunia dewasa ini mengarah ke ekonomi global. Kesepakatan GATT dengan terbentuknya WTO, menghadapi negara berkembang, termasuk Indonesia, ke posisi yang cukup sulit dalam mempertahankan laju perdagangan internasionalnya. Permasalahan tersebut telah mendorong munculnya blok ekonomi regional seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Selanjutnya guna memperkuat perekonomian daerah yang secara geografis berdekatan, maka telah dibentuk kerjasama sub-regional IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA. Pembentukan kerjasama sub-regional diatas dimaksudkan untuk meningkatkan arus perdagangan intra daerah sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Keterikatan sejarah, budaya dan agama merupakan dasar yang cukup kuat pula dalam pembentukan pusat-pusat pertumbuhan regional diatas. Studi ini memperlihatkan bahwa kerjasama regional dan sub-regional cukup bermanfaat bagi daerah-daerah yang bergabung, meskipun proporsi manfaat masing-masing daerah berbeda. Hal ini disebabkan oleh kekuatan daerah yang berbeda akibat <i>daya saing, efisiensi, produktivitas, teknologi dan kemampuan ekonomi</i> masing-masing daerah.	
11. Kata Kunci (Keywords): Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Regional/Sub-Regional	

KATA PENGANTAR

Kesepakatan Putaran Uruguay dalam kerangka GATT telah menghadapkan Indonesia ke posisi yang semakin berat dalam mempertahankan laju perdagangan internasional dan perekonomian nasionalnya. Terbentuknya blok-blok ekonomi regional dan munculnya negara pesaing baru seperti Cina dan Vietnam menambah beratnya beban yang dihadapi Indonesia di atas.

Dengan demikian, pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Pusat Pertumbuhan IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA sebagai akibat dari globalisasi di atas cukup menarik untuk diketahui. Sampai sejauh mana manfaat (dan kerugian) yang bisa diperoleh dari masing-masing negara/daerah, potensi dan kendala yang dihadapi masing-masing daerah yang bergabung dalam kerjasama ekonomi tersebut, dan sebagainya. Untuk itu, studi ini berusaha untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia (dan daerah-daerah yang bergabung dalam Pusat Pertumbuhan) di kawasan ASEAN di atas.

Oleh karena lingkupnya yang cukup luas, maka buku ini dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama dan dua tentang latar belakang dan acuan teoritis. Bagian tiga tentang Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Bagian empat tentang Segitiga Pertumbuhan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand). Bagian lima tentang Segitiga Pertumbuhan IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapura atau yang dikenal dengan Pusat Pertumbuhan Sijori). Bagian enam tentang Pusat Pertumbuhan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina), dan bagian tujuh yang merupakan evaluasi dan permasalahan masa depan.

Informasi, data dan hasil analisis yang diketengahkan di sini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijaksanaan di bidang perdagangan internasional terutama yang berkaitan dengan perdagangan intra-ASEAN, intra IMT-GT, intra IMS-GT dan intra BIMP-EAGA.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini. Untuk itu, kami mengharapkan kritikan dan saran guna penyempurnaan tulisan ini. Dalam kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Jakarta, Maret 1996
Kepala Puslitbang Ekonomi dan
Pembangunan - Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
(PEP - LIPI)

Drs. Ahmad Hamid
NIP: 130815997

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR BIBLIOGRAFI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Studi	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Hipotesa	3
1.5 Metodologi	3
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Konsep Integrasi Ekonomi	4
2.2 Konsep Segitiga Pertumbuhan	7
BAB III: KERJASAMA EKONOMI REGIONAL ASEAN (AFTA)	9
3.1 Pendahuluan	9
3.2 Perdagangan Intra ASEAN	15
3.3 Perdagangan Indonesia-ASEAN	19
BAB IV: KERJASAMA EKONOMI SUB-REGIONAL IMT-GT	23
4.1 Pendahuluan	23
4.2 Struktur Perekonomian IMT-GT	23
4.3 Sumberdaya Manusia	27
4.4 Sektor Potensial (Sektor Pertanian)	30
4.5 Perdagangan dan Investasi	32
4.6 Infrastruktur/Transportasi	40
KESIMPULAN	46
BAB V: KERJASAMA EKONOMI SUB-REGIONAL IMS-GT	47
(Kasus Batam, Propinsi Riau)	47
5.1 Pendahuluan	47
5.2 Struktur Perekonomian	47
5.3 Sumberdaya Manusia	51
5.4 Sektor Potensial (Industri Pengolahan)	57
5.5 Perdagangan Luar Negeri	62
5.6 Investasi	73
KESIMPULAN	81

BAB VI:	KERJASAMA EKONOMI SUB-REGIONAL BIMP-EAGA (Kasus Propinsi Sulawesi Utara)	83
6.1	Pendahuluan	83
6.2	Struktur Perekonomian BIMP-EAGA	84
6.3	Sumberdaya Manusia	87
6.4	Sektor Potensial (Perkebunan dan Perikanan)	90
6.5	Perdagangan dan Investasi	96
	KESIMPULAN	104
BAB VII:	EVALUASI DAN PERMASALAHAN MASA DEPAN	107
	DAFTAR PUSTAKA	112

I

PENDAHULUAN

WILLIAMSON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi ekonomi yang melanda dunia dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan ekonomi baru. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya blok-blok ekonomi regional di berbagai pelosok dunia. Terbentuknya blok-blok ekonomi di atas dimaksudkan untuk memperkuat daya tahan perekonomian negara/regional terhadap tantangan dari blok-blok ekonomi lainnya. Kecenderungan ini antara lain disebabkan oleh belum tercapainya kesepakatan multilateral guna menyusun sistem perdagangan dunia yang lebih bebas, terbuka dan adil berdasarkan kerangka GATT.

Blok-blok ekonomi yang telah terbentuk antara lain NAFTA untuk negara-negara di Amerika Utara, Uni Eropa untuk negara-negara di Eropa Barat, Anzert untuk Australia dan Selandia Baru, dan blok-blok ekonomi regional lainnya. Blok ekonomi Amerika Utara dan Eropa dikhawatirkan akan membentuk wilayah proteksi sehingga akan merugikan kepentingan negara-negara non-anggota blok tersebut. Selanjutnya, wilayah ini dikhawatirkan pula akan mengurangi arus penanaman modalnya ke negara lainnya, terutama ke negara berkembang.

Untuk wilayah ASEAN, pada KTT ASEAN IV tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura, telah disepakati pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam pelaksanaannya, AFTA mengacu pada *Common Effective Preferential Tariffs (CEPT)*¹. Dalam konsep CEPT, perdagangan antar negara anggota harus dilandasi oleh perlakuan yang sama untuk produk-produk yang telah disepakati agar masing-masing negara anggota dapat meningkatkan, baik volume maupun nilai perdagangannya. Pelaksanaan CEPT di atas dalam rangka menciptakan liberalisasi perdagangan di negara anggota dengan mengurangi/ menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif.

*) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN mencakup 6 negara ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura). Jadi tidak termasuk Vietnam yang baru bergabung pada 1995 dan Myanmar, Laos dan Kamboja yang masih berstatus peninjau. IMT-GT mencakup Propinsi Aceh dan Sumut, Pantai Barat Malaysia dan Pantai Selatan Thailand. IMS-GT mencakup propinsi Riau, Johor dan Singapura. BIMP-EAGA mencakup Propinsi Kalbar, Kaltim dan Sulut, Brunei Darussalam, Malaysia Timur dan Mindanao. Kajian ini lebih memfokuskan diri dari 'prespektif Indonesia' akibat berbagai kendala seperti sangat terbatasnya infrastruktur dan dana yang tersedia di LIPI.

1) CEPT adalah persetujuan Tarif Preferensi Efektif dimana negara anggota ASEAN sepakat untuk menurunkan tarif perdagangannya yang mencakup produk-produk manufaktur, barang modal dan produk pertanian. Pada dasarnya, skema CEPT merupakan pengembangan dari skema kerjasama perdagangan intra-ASEAN (ASEAN-PTA, ASEAN-Preferential Trade Agreement) yang selama itu telah dilaksanakan.

Penentuan produk-produk yang disepakati untuk dimasukkan dalam skema CEPT didasarkan pada Sistem Harmonis (*Harmonised System*) 6 hingga 9 digit². Produk-produk yang disepakati diatas umumnya berupa produk industri manufaktur, termasuk produk pertanian yang telah diproses dan barang modal. Sementara untuk produk pertanian yang belum diolah dan belum ada jasanya tidak dimasukkan dalam skema CEPT.

Pembentukan AFTA diharapkan akan membentuk wahana guna mempererat dan meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara anggota. Dengan adanya AFTA, segala bentuk proteksi perdagangan dan kebijakan tarif masing-masing negara akan dihapuskan. Kelancaran dan kemudahan dalam skema hubungan ekonomi, termasuk investasi dan mobilitas sumberdaya manusia, akan memacu pertumbuhan ekonomi negara anggota sehingga mampu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam melakukan posisi tawar (*bargaining position*) terhadap blok ekonomi NAFTA, Uni Eropa dan blok ekonomi lainnya.

1.2 RUANG LINGKUP STUDI

Cakupan Penelitian Perdagangan Internasional ini adalah: perdagangan intra dan antar negara/blok ekonomi regional, komoditas unggulan, kondisi atau potensi negara/ daerah asal, kebijaksanaan perdagangan baik global maupun lokal, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan internasional. Sementara lingkup geografinya adalah: negara-negara yang tergabung dalam kawasan ASEAN, dan daerah-daerah yang tergabung dalam kawasan pertumbuhan IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian perdagangan internasional pada blok kerja sama ekonomi regional/ sub-regional di kawasan ASEAN bertujuan untuk:

1. Analisis *arus perdagangan* intra ASEAN dan antar beberapa propinsi di Indonesia yang tergabung dalam kerjasama ekonomi sub-regional ASEAN
2. *Identifikasi permasalahan*, termasuk potensi, kendala dan peluang yang dihadapi oleh propinsi-propinsi di atas.

Selain itu, studi ini diharapkan *dapat memberi masukan* pada instansi relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2 Sebelum ini, komoditas ekspor hasil industri berdasarkan SITC 6 digit, namun mulai tahun 1989 diganti dengan Sistem Harmonis (HS). Dalam skema CEPT digunakan HS 9 digit, kecuali Thailand yang masih 6 digit dan Filipina 8 digit.

1.4 HIPOTESA

Penelitian ini berangkat dari *asumsi* bahwa pembentukan kawasan pusat pertumbuhan sub-regional ASEAN akan *bermanfaat* bagi daerah-daerah yang bergabung. *Kemampuan daerah-daerah* di Indonesia untuk menyerap *net gains* tersebut tergantung pada *daya kompetisi* dari komoditas ekspor dan impornya.

1.5 METODOLOGI

Studi ini membatasi diri pada analisis deskriptif tentang keadaan ekonomi dan potensi kompetitif daerah-daerah di Indonesia yang terlibat dalam kerjasama ekonomi, baik regional (ASEAN), maupun sub-regional (IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA). Beberapa unsur analisis kelembagaan dan kebijaksanaan akan dibahas pula meskipun secara terbatas.

Sebetulnya, studi ini mencoba untuk menggunakan *pendekatan tidak langsung* terhadap arah dari *trade-creation (net gains)* yang terjadi dengan memfokuskan diri pada *kemampuan bersaing* dari daerah-daerah di Indonesia yang tergabung dalam kerja sama ekonomi regional/sub-regional di ASEAN. Namun karena berbagai kendala seperti kesulitan dalam mendapatkan data/informasi yang diperlukan³, maka telah memaksa tim studi ini membatalkan rencana diatas.

Sementara itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *secara langsung dan tidak langsung*. Data tidak langsung diperoleh dari data sekunder hasil publikasi BPS, Bappeda dan Kantor Wilayah Departemen setempat, Bank Indonesia, IMF/Bank Dunia, Departemen Perdagangan, dan instansi lain yang relevan. Sebaliknya *data langsung* diperoleh dari data primer melalui penelitian langsung ke lapangan seperti kunjungan ke Banda Aceh (untuk blok kerja sama ekonomi IMT-GT), Batam (untuk IMS-GT), dan Manado (untuk BIMP-EAGA). Sayangnya, kunjungan ke negara-negara anggota ASEAN lainnya tidak mendapatkan persetujuan biaya, padahal kunjungan tersebut sangat diperlukan guna mengevaluasi lebih jauh tentang manfaat bergabungnya mereka dalam kerjasama ekonomi sub-regional di atas.

3 Terutama data triwulanan untuk indeks satuan nilai ekspor/impor, pertumbuhan dan investasi negara-negara ASEAN lainnya, dan informasi tentang kerangka dan praktek kelembagaan dan pengembangan dalam rangka memacu implementasi kerjasama sub-regional dari negara-negara: Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KONSEP INTEGRASI EKONOMI

GBHN 1993 menggaris-bawahi bahwa pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan dan ekonomi dunia. Selanjutnya ditujukan pula untuk peningkatan pendapatan produsen sekaligus konsumen, peningkatan devisa, lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan demikian, kebijakan perdagangan diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif agar produk-produk dalam negeri bisa bersaing di pasar global. Untuk itu, peningkatan efisiensi, produktivitas, dan sistem tata niaga yang efisien dan efektif menjadi suatu 'keharusan'⁴.

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan volume perdagangan komoditas lokal adalah pembentukan blok ekonomi regional seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), dan *blok ekonomi sub-regional* seperti: IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA di kawasan ASEAN. Pembentukan blok-blok regional tersebut lebih banyak didasarkan atas kepentingan ekonomi negara-negara yang bergabung dibandingkan dengan kepentingan lainnya.

Ide integrasi ekonomi berawal dari keinginan kerja sama antar beberapa negara dalam masalah harga, tarif, perizinan perdagangan dan lainnya. Guna meningkatkan kekuatan preferensi dan komitmennya, integrasi ekonomi tersebut didasarkan atas⁵:

1. Kawasan Perdagangan Preferensial (*preference trading area*), yaitu beberapa negara setuju untuk menurunkan pajak atau preferensi, dan tarif perdagangannya. Konsep ini mengacu pada kerangka GATT yang dewasa ini telah disepakati oleh hampir semua negara. Contoh preferensial adalah *Generalised System of Preferences (GSP)*

4 Berbagai kebijakan pemerintah diluncurkan sejak awal 80-an yang dimulai dengan Pakjan 1982, Pakjan 1983 hingga Pakmei 1995. Semuanya itu dimaksudkan untuk peningkatan ekspor non-migas sebagai akibat menurunnya ekspor migas.

5 Uraian lebih jauh tentang materi ini, lihat Winters dalam 'International Economics', HarperCollins Academic, 1991 hal 176-179; dan EL-Agraa Ali, 'International Economic Integration' dalam Greenaway D, (ed.), 1984, hal 1983-187.

2. Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*), yaitu beberapa negara anggota (yang bergabung) berupaya untuk menghilangkan hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangannya, namun masing-masing negara tetap mempertahankan tarif mereka dengan negara bukan anggota. Jadi upaya mereka terbatas untuk produk-produk negara anggota saja. Misalnya, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
3. Uni bersatu (*custom union*). Serupa dengan kawasan perdagangan bebas, namun negara-negara anggota harus melakukan tarif eksternal pabean yang seragam (*common external tariffs*, CETs) impor dari negara-negara bukan anggota. Misalnya, Uni Eropa (EU)
4. Pasar bersatu (*custom market*) adalah uni bersatu disertai dengan bebasnya mobilisasi kapital, tenaga kerja dan perusahaan untuk keluar masuk negara anggota tanpa hambatan. Contohnya : Pasar Bersama Eropa dan Pasar Bersama Afrika
5. Uni sempurna (*completed union*) adalah pasar bersatu yang dilengkapi dengan kebijakan moneter dan fiskal yang seragam. Uni ini merupakan tujuan akhir Uni Eropa dan blok ekonomi regional lainnya
6. Uni politik (*political union*) yaitu beberapa negara anggota dibawah satu manajemen (pengelolaan) tunggal. Di sini berlaku sentralisasi kontrol terhadap, bukan hanya moneter dan fiskal melainkan juga parlemen, keamanan, pajak dan sebagainya.

Masing-masing bentuk integrasi ekonomi diatas perlu dilihat secara mandiri, jangan diinterpretasikan sebagai tahapan dalam suatu proses yang berakhir pada uni politik. Di dalam setiap integrasi ekonomi tersebut dimungkinkan pula adanya integrasi sektoral, seperti *Common Agricultural Policy* (CAP) dan *European Coal and Steel Community* (ECSC) di Uni Eropa. Namun integrasi sektoral dalam bentuk kerjasama (*cooperation*) ini tidak konsisten atau tidak relevan dengan definisi integrasi dalam ekonomi internasional.

Integrasi ekonomi bisa positif dan bisa negatif. Integrasi negatif mengacu pada usaha negara anggota untuk merintangi proses liberalisasi perdagangan. Sementara integrasi positif berkaitan dengan modifikasi piranti dan institusi yang mendukung integrasi ekonomi agar perkembangannya menjadi semakin efektif.

Manfaat integrasi ekonomi antara lain adalah:

1. Produk-produk *semakin efisien* yang memungkinkan terjadinya spesialisasi, sehingga produk yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif

2. *Produksi meningkat* akibat meningkatnya skala ekonomi sehingga memungkinkan pangsa pasar meningkat
3. *Posisi tawar* di forum internasional *semakin membaik* sehingga memungkinkan peningkatan volume perdagangan
4. *Efisiensi produk* semakin meningkat sehingga meningkatkan kompetisi
5. *Kualitas produk* dan faktor produksi semakin meningkat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi
6. *Mobilitas modal* dan *tenaga kerja* bebas untuk keluar masuk sesama negara anggota
7. Adanya *koordinasi* antar sesama negara anggota dalam kebijakan moneter dan fiskal

Berkaitan dengan manfaat integrasi ekonomi di atas, *teori second best*⁶ memperlihatkan bahwa bentuk kerjasama ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan, meskipun tidak optimal. Kenyataan ini tersurat dalam *artikel 24*, peraturan GATT dimana uni bersatu dan perdagangan bebas merupakan salah satu kode non-diskriminatif yang bersifat khusus.

Akibat integrasi ekonomi di atas, yang dicerminkan lewat perdagangan bebas antar dua negara atau lebih, adalah *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* adalah penggantian produk domestik yang mahal oleh barang impor yang murah dari negara pengimpor, sementara *trade diversion* adalah penggantian barang impor yang murah dari negara mitra dagangnya oleh barang impor yang mahal dari mitra dagangnya yang baru. Jadi *trade creation* sangat menguntungkan, sementara *trade diversion* cukup merugikan konsumen di negara yang bersangkutan⁷.

Sudah barang tentu jika masing-masing negara dalam kerjasama regional diatas tidak melakukan *diskriminasi tarif*, maka di setiap negara akan terjadi *trade creation* untuk produk-produk tertentu. Namun di sisi lain, komoditas ekspor yang berdaya saing tinggi akan mendesak produk-produk domestik sehingga akan merugikan produsen di negara yang bersangkutan. Dalam kasus seperti ini, dimungkinkan adanya *trade diversion* dengan alasan untuk perlindungan produk domestik. Oleh sebab itu, dalam kesepakatan GATT masih dimungkinkan untuk memberlakukan tarif tersendiri, khususnya untuk produk-produk pertanian.

⁶ Teori ini dikembangkan oleh Viner (1950) yang menyatakan bahwa, jika kondisi memungkinkan maka untuk mencapai hasil yang diinginkan mungkin akan tercapai. Misalnya, jika setiap negara melakukan ekspor ke Inggris yang bebas hambatan, maka memungkinkan Perancis untuk melakukan ekspor ke Inggris, walaupun tidak optimal

⁷ Penerapan dari teori ini, lihat Bela Balassa "Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market: An appraisal of the evidence" dalam *Journal of Manchester School*, hal 93-103, Manchester, 1974; dan Michael Davenport "The Economic Impact of the EEC" dalam *The European Economy, Growth and Crisis*, (Boltho, ed.), hal 225-232, Oxford, 1985

Namun demikian, pembentukan blok-blok kerjasama ekonomi, baik regional maupun sub-regional harus didukung. Model-model teoritis integrasi ekonomi di atas menunjukkan bahwa perdagangan bebas akan terhindar dari kerugian karena dihapuskannya tarif dan proteksi. Selanjutnya, perdagangan bebas akan menciptakan keuntungan tambahan sebagai akibat terjadinya distorsi antara produksi dan konsumsi dalam hal harga dan volume perdagangannya.

Keuntungan lain dari kerjasama ekonomi regional adalah *skala ekonomi*. Pasar yang diproteksi bukan saja memilah-milah produksi secara global, melainkan bisa juga mengurangi persaingan dan laba perusahaan yang memasuki industri yang diproteksi tersebut. Dengan meningkatnya jumlah pengusaha di pasar domestik yang sempit, maka skala produksi di setiap perusahaan menjadi tidak efisien. Dengan pasar bebas, maka proteksi dihapuskan sehingga skala ekonomi menjadi meningkat karena pengusaha bisa dengan bebas untuk masuk (*free entry*) ke pasar yang tadinya diproteksi tersebut.

Sementara itu, ada juga kerugian yang diderita dari perdagangan bebas; *pertama*, biaya administrasi (termasuk biaya promosi, biaya rapat dan lain-lain) dari perdagangan bebas cukup besar. *Kedua*, penghasilan pemerintah menjadi berkurang akibat dihapuskannya tarif/kebijakan perdagangan yang proteksionis. *Ketiga*, perdagangan bebas sering tidak bebas akibat ulah beberapa negara mitra dagangnya yang lebih bermotifkan politik ketimbang ekonomi.

Namun demikian, hampir semua negara di dunia menyatakan setuju dengan perdagangan bebas. Demikian pula dengan negara-negara yang tergabung dalam blok ekonomi regional. *Putaran Uruguay* sebagai acuan perdagangan multilateral yang diselenggarakan pada September 1986, yang kemudian dilanjutkan dan diratifikasi di Marrakesh pada bulan April 1994, kini menjadi WTO, membuktikan pentingnya kerangka GATT tersebut. Oleh sebab itu, pembentukan blok ekonomi regional dan sub-regional perlu didukung dan dievaluasi secara terus menerus.

2.2 KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN

Pembentukan Segitiga Pertumbuhan di Kawasan ASEAN merupakan gagasan PM Singapura Goh Chok Tong yang ditunjukkan lewat kerjasama regional antara Singapura, Johor dan Riau. Pada dasarnya, Segitiga Pertumbuhan dibentuk atas dasar kerjasama regional di bidang ekonomi yang di arahkan pada kekuatan pasar yang terintegrasi. Zone ekonomi ini mencakup beberapa daerah/negara yang berbeda yang bermaksud untuk mengantisipasi perbedaan harga dan perbedaan dalam keuntungan komparatif di antara daerah/negara yang akan bergabung⁸.

8 Uraian lebih jauh tentang konsep Segitiga Pertumbuhan (growth triangle), lihat Tan Siew Hoey 'Growth Triangles as a Regional Development Strategy' dalam *Borneo Review*, Vol IV No 1, June 1993

Pembentukan Segitiga Pertumbuhan di kawasan ASEAN diilhami oleh:

1. Arus perdagangan yang besar umumnya terjadi antara negara anggota, misalnya antara AS dan Kanada yang secara ekonomis adalah satu area.
2. Kerjasama perdagangan perlu pengaturan yang cukup kompleks, sehingga memerlukan peraturan, hukum dan regulasi perdagangan yang jelas. Untuk itu perlu koordinasi dan kebijakan ekonomi yang harmonis diantara negara yang bergabung.
3. Salah satu faktor penting dalam kerjasama regional adalah faktor pendapatan. Disparitas per kapita income di ASEAN cukup bervariasi, namun dengan keunggulan Singapura di berbagai bidang, maka akan mendorong peningkatan per kapita income daerah lainnya.
4. Kedekatan geografi merupakan faktor penting dalam keberhasilan daerah/negara yang bergabung. Karena geografis di ASEAN umumnya dipisahkan oleh laut maka faktor transportasi laut perlu mendapat perhatian serius.
5. Komitmen politik dan koordinasi kebijakan di antara daerah yang bergabung merupakan dasar yang penting untuk keberhasilan kerjasama regional.

Kondisi yang diperlukan dalam pembentukan Segitiga Pertumbuhan di Kawasan ASEAN adalah:

1. Terjadinya imbasan pertumbuhan yang cukup kuat dari negara maju (Singapura) ke negara tetangganya, sehingga pemerintah negara tersebut menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan global.
2. Kedekatan jarak merupakan motivasi daerah/negara untuk bergabung. Hal ini didukung oleh faktor historis, sosial, budaya, bahasa dan arus perdagangan yang telah lama berlangsung.
3. Komitmen politik untuk merealisasikan kerja sama regional. Tanpa komitmen diatas, tampaknya cukup sulit untuk merealisasikan PMA di Batam misalnya.
4. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pembentukan Segitiga Pertumbuhan. Tanpa infrastruktur yang memadai, maka cukup sulit bagi negara yang bersangkutan untuk mengundang perusahaan multinasional masuk ke negaranya.

Jadi Segitiga Pertumbuhan sangat atraktif untuk bekerja secara bersama-sama di antara daerah/negara yang bergabung melalui usaha-usaha yang kooperatif atau bersifat sinergi. Dalam kasus kerjasama ekonomi ASEAN (AFTA), dan kerjasama sub regionalnya (IMT-GT, IMS-GT da BIMP-EAGA), daerah/negara yang bergabung cukup responsif dan cukup fragmatis sehingga kerjasama regional tersebut memperoleh kemajuan yang cukup berarti.

III

KERJASAMA EKONOMI REGIONAL ASEAN (AFTA)

oleh: Sukarna Wiranta

BAB III

KERJASAMA EKONOMI REGIONAL ASEAN (AFTA)

oleh: Sukarna Wiranta

3.1 PENDAHULUAN

Pada KTT Singapura tahun 1992, ASEAN telah menyetujui langkah-langkah baru di bidang ekonomi yang mengacu pada rumusan "*Kerangka Persetujuan untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN*". Rumusan baru ini diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi guna menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan ASEAN sesuai dengan prinsip-prinsip:

1. Memperkokoh kerjasama ekonomi dengan wawasan keluar (*outward looking*) sehingga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan liberalisasi perdagangan secara global
2. Prinsip saling menguntungkan guna melaksanakan langkah-langkah atau prakarsa yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN
3. Semua anggota harus ikut serta dalam pengaturan ekonomi intra ASEAN

Kerjasama ekonomi di atas diharapkan akan membentuk suatu wahana yang dapat memperlancar dan meningkatkan kerjasama perdagangan intra ASEAN. Hal ini disebabkan karena segala bentuk proteksi perdagangan dan kebijakan tarif dan non-tarif yang selama ini menjadi hambatan dagang intra ASEAN akan dihapuskan. Kelancaran dan kemudahan dalam skema hubungan ekonomi, termasuk investasi dan mobilitas sumberdaya manusia, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi tinggi wilayah regional ASEAN agar mereka mampu untuk menciptakan pra-kondisi dalam melakukan posisi tawar (*bargaining position*) dengan mitra dagangnya, terutama dengan Jepang, Uni Eropa dan Amerika Utara.

Pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN yang berakumulasi dalam jangka waktu 15 tahun, pada dasarnya, mengacu pada sistem perdagangan CEPT atau persetujuan *Tarif Preferensi Efektif*. Sistem ini memberlakukan penurunan tarif perdagangan intra ASEAN yang mencakup produk-produk industri, barang modal dan produk pertanian yang diolah. Sedangkan untuk produk-produk yang dikecualikan dari skema CEPT umumnya adalah produk pertanian yang belum diolah.

Komoditas yang dimasukkan dalam skema CEPT dibedakan dalam dua jalur: yakni jalur cepat (*fast track*) dan jalur normal (*normal track*). Maksud perbedaan ini adalah, penurunan tarif bea masuk dan produk yang dikategorikan dalam jalur cepat lebih cepat dibandingkan jalur normal.

Pada jalur cepat, terdapat 15 kelompok komoditas yakni: minyak goreng, semen, kimia, farmasi, pupuk, plastik, produk karet, produk kulit, pulp, tekstil, keramik dan produk gelas, batu mulia dan perhiasan, katode tembaga, elektronik, furniture dan rotan. Kelima belas komoditas tersebut yang saat itu masih bertarif diatas 20 persen akan diturunkan menjadi 0-5 persen dalam kurun waktu 10 tahun (2003), sementara bagi tarif dibawah 20 persen akan diturunkan menjadi maksimum 5 persen dalam jangka waktu 7 tahun (2000).

Pada jalur normal, komoditas yang bertarif dibawah 20 persen akan diturunkan menjadi maksimum 5 persen dalam kurun waktu 10 tahun, sementara komoditas yang masih bertarif diatas 20 persen akan dikurangi tarifnya dalam dua tahap yaitu; *pertama*, akan dikurangi menjadi 20 persen dalam kurun waktu 5-8 tahun, dan *kedua*, akan diturunkan lagi menjadi dibawah 5 persen dalam jangka waktu 7 tahun berikutnya. Mengenai jumlah produk yang masuk dalam skema CEPT bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.1
Jumlah Produk yang Masuk dalam Skema CEPT

	HS (digit)	Jalur Cepat	Jalur Lambat	Jumlah
Brunei Darussalam	9	1.826	4.357	6.183
Indonesia	9	2.831	4.523	7.354
Malaysia	9	3.251	6.895	10.146
Thailand	6	1.936	2.764	4.700
Filipina	8	862	3.250	4.112
Singapura	9	2.200	3.514	5.714

Sumber: Sekretariat ASEAN, 1992

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah komoditas yang dimasukkan dalam skema CEPT yang paling banyak adalah Malaysia. Kenyataan tersebut bisa diinterpretasikan bahwa Malaysia jauh lebih siap dalam mengidentifikasi produk pilihannya untuk diperdagangkan di kawasan ASEAN, sementara Indonesia masih sibuk dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi komoditas unggulannya.

Kemudian, dalam pertemuan Chiang Mai bulan September 1994, para Menteri ASEAN sepakat untuk, *pertama*, jadwal AFTA dipercepat dari tahun 2008 menjadi tahun 2003. *Kedua*, menambah jumlah mata dagangan yang masuk dalam daftar AFTA, yang dikenal dengan *inclusion list*, sehingga akan mengurangi mata dagangan yang dikecualikan sementara (*temporary exclusion list*, TEL) dalam skema CEPT. Disepakati pula bahwa semua produk yang semula masuk TEL akan dimasukkan secara bertahap, selama jangka waktu lima tahun, kedalam *inclusion list* sehingga semua produk TEL tersebut sudah masuk *inclusion list* pada 1 Januari 2000. *Ketiga*, Para Menteri ASEAN juga sepakat untuk memasukkan semua produk pertanian yang belum diproses ke dalam skema CEPT. Namun demikian, kategori produk pertanian yang belum diolah yang dimasukkan dalam daftar sensitif (*sensitive list*) akan memiliki skema liberalisasi tarif barang manufaktur dalam skema CEPT.

Daftar produk sensitif (*sensitive list*) sendiri sudah diatur dimana produk tersebut meliputi produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, moral, budaya, keamanan dan lingkungan. Produk-produk semacam ini dikecualikan dari tata perdagangan internasional sesuai dengan kesepakatan GATT, namun dalam 8 tahun mendatang, daftar pengecualian tersebut harus diuji ulang apakah masih tetap dikecualikan atau bisa dimasukkan dalam skema CEPT.

Mengenai daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.2
Jumlah Produk yang Dikecualikan dari skema CEPT

	HS (digit)	Sementara	Permanen & Umum	Jumlah
Brunei	9	116	195	364
Indonesia	9	1.707	370	2.077
Malaysia	9	648	952	1.600
Thailand	6	118	500	618
Filipina	8	1.119	250	1.449
Singapura	9	-	118	118

Sumber: Sekretariat ASEAN, 1992

Dari Tabel 3.1.2 di atas terlihat bahwa daftar produk yang dikecualikan sementara dari Indonesia adalah yang paling banyak diikuti oleh Filipina⁹. Sementara daftar produk yang dikecualikan secara permanen, yang paling banyak adalah produk-produk Malaysia diikuti Thailand. Tingginya daftar perkecualian sementara dan rendahnya daftar perkecualian permanen komoditas Indonesia disebabkan oleh belum siapnya Indonesia dalam mengidentifikasi komoditasnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh jenis komoditas Indonesia yang paling banyak diperdagangkan di ASEAN, meskipun tidak banyak dari segi volumenya. Volume perdagangan di ASEAN dikuasai oleh Singapura, diikuti oleh Malaysia dan Thailand.

Dengan demikian, dalam pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) di Chiang Mai pada September 1994 tersebut disepakati penambahan jumlah produk yang dimasukkan dalam *inclusion list*. Sebelum pertemuan tersebut, terdapat 89 persen kelompok produk atau pos tarif yang masuk dalam *inclusion list* (*fast track* dan *normal track*). Sisanya tersebar; yakni 7, 1 persen ke dalam daftar perkecualian sementara (*temporary exclusion list*), 2,9 persen berupa produk pertanian yang belum diolah yang tergolong sensitif (*sensitive list*), dan selebihnya (1 persen) masuk kategori yang dikecualikan (*general exception*).

Dalam pertemuan Chiang Mai di atas disepakati bahwa *inclusion list* akan bertambah yang meliputi hampir 98 persen dari seluruh pos tarif di ASEAN pada tahun 2000. Kemudian, dalam pertemuan Dewan AFTA di Bandar Seri Begawan pada September 1995, disepakati pula untuk menambah produk dalam skema CEPT. Terdapat 682 pos tarif yang semula masuk dalam kategori *temporary exclusion list*, kini masuk dalam *inclusion list*. Produk tersebut antara lain adalah produk kimia anorganik, dan kimia organik dan plastik yang keduanya merupakan produk yang tumbuh pesat diperdagangkan di antara negara ASEAN.

Untuk jelasnya, daftar produk yang akan dikeluarkan dari skema CEPT bisa dilihat dalam tabel berikut.

⁹ Masih banyaknya daftar produk yang dikecualikan sementara (*temporary exclusion list*) menurut skema CEPT yang berasal dari Indonesia dan Filipina, karena kedua negara tersebut memiliki sektor industri (manufaktur) yang paling lemah kinerja ekonominya

Tabel 3.1.3
Jenis dan Jumlah Produk yang akan Dikeluarkan dari
Daftar Perkecualian Melalui Skema CEPT, 1995

Jenis Barang	Juml Pos	Persen
Kimia Organik	92	13,49
Plastik dan bagian-bagiannya	86	12,61
Kimia organik	71	10,41
Raw hide sand skins	64	9,38
Kendaraan dan angkutan kereta	43	6,30
Mesin dan peralatan mekanis	33	4,84
Karet dan bagian-bagiannya	28	4,11
Kertas dan kertas karton	28	4,11
Kayu dan bagian-bagiannya	26	3,81
Mesin elektronik dan peralatannya	25	3,67
BBM Mineral dan minyak mineral	24	3,52
Aparel dan aksesoris pakaian (rajutan)	24	3,52
Aparel dan aksesoris pakaian non rajutan	20	2,93
Essential oils dan resinoids	18	2,64
Barang-barang fotografi dan film	16	2,35
Bahan sayuran	10	1,47
Permata alami dan tradisional	10	1,47
Produk harian, telur ayam, madu alam	8	1,17
Produk tekstil lainnya	7	1,03
Produk-produk plastik	6	0,88
Kaca dan produk-produk kaca	6	0,88
Optikal, fotografi, sinematografi	5	0,73
Jaket atau sejenisnya	4	0,59
Minyak nabati dan hewani	4	0,59
Besi dan baja	4	0,59
Alas kaki	3	0,22
Minuman ringan	2	0,29
Filamen	2	0,29
Wadding, felt and nonwovens	2	0,29
Special woven fabrics	2	0,29
Produk keramik	2	0,29
Sisa dan limbah industri makanan	1	0,15
Produk industri penggilingan	1	0,15
Pupuk	1	0,15
Tanning or dying extract	1	0,15
Bahan peledak	1	0,15
Produk besi dan baja	1	0,15
Alat-alat musik	1	0,15
Jumlah	682	100,00

Sumber: Sekretariat ASEAN, 1995

Tabel di atas menunjukkan bahwa, terdapat beberapa kemajuan penting sebagai hasil dari berbagai pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN yang selama ini telah dilaksanakan, karena sudah cukup banyak komoditas yang akan dikeluarkan dari Daftar Perkecualian sesuai dengan Skema CEPT. Kenyataan ini

memperlihatkan bahwa jumlah komoditas yang diperdagangkan melalui skema CEPT sudah semakin banyak, sementara cakupan komoditas yang dikecualikan semakin berkurang sehingga Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN akan terlaksana sesuai dengan target yang dikehendaki.

Selanjutnya, pertemuan Dewan AFTA di Bandar Seri Begawan sepakat pula untuk menurunkan tarif rata-rata semua negara anggota berdasarkan skema CEPT. Rencana penurunan tarif di atas bisa dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.1.4
Rata-rata Penurunan Tarif CEPT ASEAN, 1996-2003 (%)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Brunei D	2,46	2,29	1,91	1,74	1,39	1,39	1,39	1,39
Indonesia	11,63	10,61	8,84	7,91	5,81	5,70	5,00	4,25
Malaysia	5,93	5,14	4,42	3,67	2,90	2,83	2,83	2,83
Thailand	14,10	12,69	10,15	9,28	7,00	6,99	5,78	4,63
Filipina	9,17	8,33	7,16	6,53	5,42	4,90	4,89	3,73
Singapura	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEAN	7,76	7,00	5,79	5,19	3,97	3,88	3,47	2,95

Sumber: Sekretariat ASEAN, 1995

Dalam rencana penurunan tarif, Tabel 3.1.4 menunjukan bahwa Indonesia berada di urutan kedua setelah Thailand yang tarifnya relatif masih tinggi (hingga tahun 2003). Meskipun demikian, Indonesia mungkin yang paling proteksionis karena masih banyak hambatan non-tarif yang dipertahankan, misalnya yang dicerminkan lewat Daftar Negatif Investasi (DNI), tata niaga ekspor-impor dan sebagainya.

Selain itu, dalam pertemuan di Bandar Seri Begawan, Sultan Bolkiah dari Brunei Darussalam mengusulkan agar Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dipercepat dari kesepakatan semula tahun 2003 menjadi tahun 2000¹⁰. Tetapi usulan di atas telah ditolak karena semua negara sudah memiliki program sendiri-sendiri dalam skema penurunan tarifnya, sehingga jadwal AFTA tahun 2003 sulit untuk dirubah. Meskipun demikian, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperbanyak komoditas yang masuk dalam *inclusion list*.

10 Usulan Sultan Bolkiah tersebut dimaksudkan untuk memperlancar arus perdagangan intra ASEAN, dan untuk mengantisipasi atau menandingi blok kerjasama ekonomi lainnya yang sedang berbenah diri. Misalnya, Uni Eropa dan AS yang sedang menjajagi Pasar Bersama Trans Atlantik; kemudian Uni Eropa sendiri yang tengah memperluas keanggotaannya hingga Eropa Timur; dan Cina serta India yang terus berupaya dengan melakukan liberalisasi untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perdagangannya

Namun dalam pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN di Bangkok pada Desember 1995, Indonesia berusaha untuk menambah 15 produk yang masuk dalam daftar sensitif yang dikecualikan dari kerangka perdagangan bebas ASEAN. Dari 15 produk yang diusulkan tersebut antara lain: beras, gula tebu, cengkeh, bunga potong, ketan hitam, kacang-kacangan, susu, dan tepung gandum. Semuanya menyangkut produk-produk yang dihasilkan sektor pertanian yang peranannya masih sangat penting di Indonesia. Namun sebagian besar produk tersebut, pengaturan tata niaga ekspor-impornya dikendalikan oleh Bulog dan perusahaan swasta tertentu¹¹.

Dalam pertemuan Bangkok tersebut, dibahas pula komitmen ASEAN terhadap sektor jasa dan hak-hak milik intelektual. Komitmen terhadap sektor jasa antara lain dengan mengurangi berbagai hambatan di lima sektor prioritas yakni: di bidang jasa keuangan, transportasi, pariwisata, telekomunikasi dan jasa bisnis profesional.

Kini keanggotaan ASEAN bertambah dengan masuknya Vietnam pada bulan Juli 1995 yang diikuti pula oleh tiga negara lainnya sebagai peninjau (Myanmar, Kamboja dan Laos) sehingga kerjasama ekonomi ASEAN memasuki era baru. Bukan saja ekspansif secara sektor, melainkan juga responsif terhadap perubahan zaman.

3.2 PERDAGANGAN INTRA ASEAN

Perdagangan intra ASEAN menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Perdagangan intra ASEAN mencapai 95 milyar dolar Amerika pada 1994, meningkat hampir 100 persen dibandingkan dengan tahun 1990. Total perdagangan ASEAN mencapai 500 milyar dolar pada 1994, meningkat dengan 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

11 Sikap Indonesia tersebut dinilai oleh mayoritas negara ASEAN akan mengurangi tekad untuk mempercepat pelaksanaan AFTA, padahal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk menambah jumlah produk yang masuk dalam skemaCEPT. Namun alasan Indonesia adalah demi kepentingan nasional atau kepentingan produk dalam negeri

Tabel 3.2.1
Ekspor-Impor ASEAN (US\$ juta)

	ASEAN	NICs	Jepang	USA	ME	Cina	SAARC	Total
Ekspor								
1990	26.173	14.801	25.635	27.910	23.190	2.583	3.432	138.980
1991	32.562	18.164	28.624	30.209	27.017	3.151	3.282	160.112
1992	35.849	20.875	28.418	36.555	31.046	3.781	3.527	180.283
1993	42.897	25.207	30.926	42.212	33.166	5.001	3.796	205.806
1994	45.814	28.251	33.635	48.226	35.818	6.458	3.742	228.391
Impor								
1990	24.915	16.612	37.274	23.403	26.939	4.598	1.758	158.414
1991	30.773	19.451	43.579	26.123	29.470	5.256	2.313	179.187
1992	34.516	21.679	46.587	29.437	32.148	5.383	1.912	195.551
1993	40.797	24.652	55.510	34.068	35.614	5.549	2.248	224.039
1994	48.844	33.878	67.435	37.325	43.136	6.812	2.697	270.155

Sumber : Direction of Trade Statistics, IMF, 1995

Catatan : SAARC (South Asia Association Regional Cooperation) terdiri dari: India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal & Butan¹²

Tabel 3.2.1 diatas memperlihatkan bahwa perdagangan intra ASEAN mencapai hampir 20 persen dari total nilai perdagangan ASEAN, sementara perdagangan dengan Jepang mencapai lebih dari 20 persen pada 1994. Perdagangan ASEAN-Jepang sendiri mengalami defisit di pihak ASEAN (kecuali Indonesia yang mengalami surplus dengan Jepang akibat ekspor minyaknya), begitu pula perdagangan dengan Eropa Barat dan Negara Industri Baru. Surplus perdagangan hanya terjadi dengan Amerika Serikat. Secara keseluruhan defisit perdagangan ASEAN telah terjadi sepanjang tahun. Terlihat bahwa perdagangan intra-ASEAN mengalami kenaikan sangat berarti selama lima tahun terakhir. Namun perdagangan dengan negara maju seperti dengan Jepang, AS dan Masyarakat Eropa tetap tinggi terbukti dengan nilai perdagangannya yang terus meningkat. Terlihat pula, bahwa perdagangan ASEAN-Cina mengalami grafik yang meningkat, sementara perdagangan ASEAN-SAARC dalam keadaan yang stabil.

Perdagangan masing-masing negara anggota ASEAN dengan mitranya memperlihatkan angka yang menarik karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Jepang merupakan mitra utama Indonesia (juga Thailand), sementara

¹² Perdagangan antara ASEAN dan SAARC dicoba diketengahkan disini guna mengetahui lebih jauh tentang perkembangan perdagangan 'blok ekonomi regional sesama Asia' ini

ASEAN merupakan mitra penting Malaysia; AS mitra utama Filipina, dan yang relatif merata adalah mitra dagang Singapura yang tersebar diantara ASEAN, NICs, Jepang, AS dan ME.

Tabel 3.2.2
Perdagangan Negara Anggota ASEAN, 1994 (US\$ juta)

	ASEAN	NICs	Jepang	USA	ME	Cina	Total
Ekspor							
Brunei D.	499	10	1.079	43	420	-	2.187
Indonesia	4.699	5.320	11.711	6.381	6.374	1.366	40.832
Malaysia	15.544	5.996	7.080	12.679	8.350	1.901	57.970
Thailand	7.889	3.605	7.524	9.706	7.498	849	44.437
Filipina	1.003	1.342	2.020	5.178	2.386	164	13.433
Singapura	16.180	11.978	4.221	14.239	10.790	2.178	69.532
Impor							
Brunei D.	1.153	53	147	414	1.061	14	2.980
Indonesia	2.987	5.125	8.440	3.092	6.534	1.148	32.406
Malaysia	10.892	5.782	15.295	9.197	9.269	1.312	57.225
Thailand	6.904	5.358	16.540	6.136	9.667	1.360	55.353
Filipina	2.621	4.758	5.447	4.162	2.646	320	22.534
Singapura	24.287	12.802	21.566	14.324	13.959	2.658	99.657

Sumber: Direction of Trade Statistics, 1995

Tabel di atas menunjukkan bahwa surplus perdagangan terjadi pada Indonesia dan Malaysia, sementara negara anggota ASEAN lainnya dalam defisit. Defisit perdagangan Indonesia terjadi dengan Eropa Barat sedangkan Malaysia dengan Jepang. Surplus perdagangan Thailand terjadi dengan ASEAN dan AS, serta Filipina dengan AS. Singapura satu-satunya negara yang mengalami defisit neraca perdagangannya dengan hampir semua negara.

Tabel 3.2.3
Matriks Perdagangan Intra ASEAN, 1994 (US\$ juta)

	Brunei	I'sia	M'sia	Thai	F'pina	S'pura	Total
Brunei D.	-	1	29	212	33	224	499
Indonesia	49	-	724	359	106	3.461	4.699
Malaysia	232	644	-	2.122	564	11.982	15.544
Thailand	45	277	986	-	21	6.371	7.700
Filipina	3	72	220	21	-	707	1.023
Singapura	724	1.930	8.686	3.487	1.353	-	16.180

Sumber: Direction of Trade Statistics, 1995

Tabel 3.2.3 memperlihatkan bahwa perdagangan intra ASEAN yang paling banyak terjadi adalah antara Singapura dan Malaysia yang mencapai setengah dari total perdagangan ASEAN. Dengan demikian, kenaikan nilai perdagangan intra ASEAN yang sangat cepat lebih banyak disebabkan oleh kenaikan perdagangan antara Singapura dan Malaysia. Sementara jenis komoditas yang paling banyak diperdagangkan adalah komoditas perdagangan Indonesia, namun dengan nilai yang tidak begitu menonjol, kecuali untuk minyak dan tekstil.

Dalam kaitan dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang cukup tinggi, maka peranan investasi asing (PMA) sangat penting. Di kawasan ASEAN, jumlah proyek dan nilai investasi dari Jepang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan PMA dari negara lainnya. Meskipun demikian, dari sisi Jepang sendiri investasi mereka di ASEAN hanya menempati urutan ketiga (sekitar 9 persen), jauh dibawah Amerika (40 persen) dan Eropa Barat (22 persen) dari total investasi Jepang di tahun 1993.

Tabel 3.2.4
Nilai Investasi Jepang di ASEAN (US\$ juta)

	1990	1991	1992	1993	g
Indonesia	1.105	1.193	1.676	813	-9,7
Malaysia	725	880	704	800	3,3
Thailand	1.154	807	657	578	-20,6
Filipina	258	203	160	207	-7,1
Singapura	840	613	670	644	-8,5
ASEAN	4.082	3.696	3.867	3.042	-9,3
Dunia	56.911	41.584	34.138	36.025	-14,1

Sumber: FDI in Asia, Nomura and ISEAS, 1995.

Catatan: g menunjukkan rata-rata pertumbuhan per tahun selama 1991-1993 (dalam %)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa investasi Jepang di ASEAN turun secara perlahan yakni sekitar 9 persen per tahun selama periode 1990-93. Turunnya investasi Jepang di ASEAN disebabkan oleh turunnya investasi Jepang di seluruh dunia yang turun secara drastis (14 persen)¹³. Namun penurunan investasi Jepang tersebut, terutama pada tahun 1993, lebih bersifat siklikal, karena mulai tahun 1994, investasi mereka meningkat kembali. Hal ini disebabkan oleh faktor relokasi akibat apresiasi nilai yen Jepang.

3.3 PERDAGANGAN INDONESIA-ASEAN

Selama Pelita V (1989-1994), pertumbuhan perdagangan Indonesia memperlihatkan peningkatan yang sangat tajam. Nilai eksportnya selalu melebihi nilai impor sehingga terjadi surplus dalam neraca perdagangannya selama periode diatas. Peningkatan nilai ekspor yang cukup tajam diatas disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor non-migas, sementara nilai ekspor migas dalam kondisi yang stagnan karena nilainya di sekitar angka US\$ 10 milyar selama lima tahun terakhir.

Namun di sisi lain, rata-rata laju pertumbuhan impor cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan eksportnya. Tabel 3.3.1 memperlihatkan bahwa kenaikan impor bukan hanya terjadi pada komoditas non-migas, tetapi juga

¹³ Penyebab turunnya investasi Jepang di luar negeri diakibatkan oleh 'bubble economy' yang melanda Jepang di awal tahun 1990-an. Kondisi demikian melibatkan 'repatrisasi' atau arus modal mereka kembali ke Jepang

pada migasnya. Akibatnya, surplus perdagangan migas cenderung berkurang akibat impor migas yang cenderung meningkat selama periode di atas. Tetapi yang cukup menggembirakan adalah terjadinya surplus perdagangan komoditas non migas pada 1994, yang sebelumnya selalu mengalami defisit. Kenyataan ini membuktikan bahwa usaha keras yang dilakukan pemerintah guna mendorong ekspor non migas cukup berhasil.

Tabel 3.3.1
Ekspor-Import Indonesia, 1989-94 (US\$ juta)

Tahun	Ekspor		Impor	
	Migas	Non-Migas	Migas	Non-Migas
1989	8.679	13.480	1.195	15.164
1990	11.071	14.604	1.920	19.916
1991	10.895	18.248	2.310	23.559
1992	10.669	23.296	2.115	25.165
1993	9.746	27.078	2.170	26.157
1994	9.694	30.360	2.469	29.514

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1995

Nilai ekspor Indonesia ke negeri mitranya di ASEAN menunjukkan grafik yang meningkat selama lima tahun terakhir. Ekspor ke Singapura memperlihatkan nilai yang tertinggi yakni rata-rata mencapai tiga perempatnya terhadap total ekspor ASEAN per tahunnya. Nilai ekspor ke Malaysia menunjukkan laju peningkatan yang paling tinggi yakni dari 220 juta dolar Amerika pada 1989 menjadi 738 juta dolar atau naik sekitar 236 persen selama lima tahun terakhir, diikuti oleh Filipina dengan 151 persen, dan Singapura 128 persen.

Yang cukup menggembirakan adalah ekspor ke Brunei Darussalam, karena negeri ini jarang mengimpor komoditas non-migas dari Indonesia, namun pada 1994, nilai ekspornya mencapai US\$ 50 juta. Sebagai negara yang berpenghasilan sangat tinggi, negeri ini sangat potensial untuk dijadikan tujuan ekspor Indonesia yang jenisnya memang sangat beragam.

Tabel 3.3.2
Ekspor Indonesia ke ASEAN, 1989-94 (US\$ juta)

Tahun	M'sia	Thai	S'pura	F'na	Brunei	ASEAN	Dunia	PA (%)
1989	220 (220)	234 (231)	1.818 (1.654)	126 (126)	8 (8)	2.399 (2.231)	22.159 (13.480)	10,8 (16,6)
1990	253 (240)	189 (184)	1.902 (1.631)	138 (138)	11 (11)	2.493 (2.204)	25.675 (14.604)	9,7 (15,1)
1991	342 (338)	267 (228)	2.410 (2.268)	146 (139)	10 (10)	3.175 (2.983)	29.143 (18.248)	10,9 (16,3)
1992	488 (485)	353 (328)	3.314 (3.161)	155 (155)	25 (25)	4.334 (4.154)	33.965 (23.296)	12,8 (17,8)
1993	586 (585)	468 (422)	3.372 (3.197)	243 (242)	35 (35)	4.704 (4.481)	36.823 (27.078)	12,8 (16,5)
1994	739 (738)	401 (359)	4.150 (3.548)	317 (317)	50 (50)	5.657 (5.012)	40.054 (30.360)	14,1 (16,5)

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1995

Catatan : a. Angka didalam kurung menunjukan ekspor non-migas

b. PA menunjukan pangsa pasar ekspor ke ASEAN terhadap total ekspor ASEAN ke dunia (dalam %)

Tabel 3.3.2 di atas memperlihatkan pula bahwa nilai ekspor ke ASEAN meningkat cukup tajam yakni dari US\$ 2,4 milyar pada 1989 menjadi US\$ 5,7 milyar pada 1994 atau meningkat dengan 136 persen dalam kurun waktu lima tahun. Akibatnya, pangsa ekspor ke ASEAN terhadap total ekspor nasional juga meningkat yakni dari 10 persen ke 14 persen selama periode yang sama.

Ekspor Indonesia ke mitra ASEAN-nya diatas didominasi oleh sektor non-migas, dan hanya Singapura yang relatif banyak mengimpor minyak dari Indonesia. Thailand dan Filipina yang tidak memiliki sumber minyak, ternyata kurang bahkan tidak mendatangkan minyak dari Indonesia, sementara ekspor ke Brunei Darussalam seluruhnya berupa komoditas non-migas.

Impor Indonesia dari ASEAN berjumlah US\$ 1,8 milyar pada 1989 dan meningkat menjadi US\$ 2,6 milyar pada 1994 atau rata-rata naik 10,7 persen per tahun selama lima tahun terakhir. Sementara total impor meningkat dari US\$ 16,4 milyar ke US\$ 32 milyar atau rata-rata tumbuh dengan 14,3 persen per tahunnya. Pada 1994, pangsa impor dari ASEAN sekitar 9,2 persen terhadap total impor dimana pangsa impor non-migasnya adalah 6,9 persen dari total impor non migas.

Tabel 3.3.3
Impor Indonesia dari ASEAN, 1989-94 (US\$ juta)

Tahun	M'sia	Thai	S'pura	F'na	Brunei	ASEAN	Total	PA (%)
1989	369 (268)	210 (208)	1.122 (741)	63 (63)	2 (2)	1.765 (1.282)	16.359 (15.164)	10,8 (8,4)
1990	326 (158)	183 (183)	1.271 (832)	55 (55)	0,3 (0,3)	1.835 (1.228)	21.837 (19.916)	8,4 (6,2)
1991	406 (186)	277 (275)	1.698 (913)	81 (81)	0,3 (0,3)	2.464 (1.091)	25.869 (23.559)	9,5 (4,6)
1992	524 (370)	345 (341)	1.671 (949)	52 (52)	0,7 (0,7)	2.592 (1.713)	27.280 (25.165)	9,5 (6,8)
1993	517 (383)	235 (231)	1.799 (1.158)	57 (51)	1 (1)	2.610 (1.824)	28.328 (26.157)	9,2 (7,0)
1994	579 (454)	415 (403)	1.877 (1.117)	65 (65)	0,3 (0,3)	2.937 (2.039)	31.978 (29.514)	9,2 (6,9)

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1995

Catatan : a. Angka didalam kurung menunjukkan impor non-migas

b. PA menunjukan impor ASEAN dari ASEAN terhadap total impor ASEAN dari dunia (dalam %)

Jika diperhatikan tabel 3.3.2 dan 3.3.3 di atas, maka telah terjadi surplus perdagangan antara Indonesia-ASEAN. Namun tidak demikian halnya dengan sektor non-migas, karena di sektor ini telah terjadi defisit perdagangan. Akan tetapi pada tahun 1994, defisit tersebut berubah menjadi surplus, sehingga kekhawatiran akan membengkaknya defisit perdagangan dimasa mendatang diharapkan tidak akan terjadi lagi. Kenyataan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui kebijakan di bidang perdagangan dalam mengantisipasi perubahan global yang begitu cepat terjadi. Namun, keberhasilan dalam mendorong ekspor non migas ini patut dipertahankan mengingat adanya 'kelesuan pasar' untuk komoditas ekspor Indonesia di pasar global pada akhir-akhir ini akibat berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

IV

KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL IMT-GT

oleh: Sukarna Wiranta

KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INT. GT
 oleh: Sukarna Wiryo

BAB IV

KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL IMT-GT

oleh: Sukarna Wiranta

4.1 PENDAHULUAN

Kesepakatan kerjasama IMT-GT dimulai dengan *pertemuan pertama* pada bulan Juli 1993 di Pulau Langkawi, Thailand, yang kemudian dilanjutkan dengan *pertemuan kedua* (September 1993) di Hat-Yai, Thailand; *ketiga* (Juni 1994) di Medan, *keempat* (September 1994) di Penang, Malaysia; *kelima* di Thailand; *keenam* di Banda Aceh, dan *ketujuh* (Desember 1994) di Penang, Malaysia.

Dalam pertemuan-pertemuan di atas dilakukan *pembahasan per sektor/sub sektor* yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri, energi, agro-industri, pariwisata, telekomunikasi, pertanian dan perhubungan. Selain itu, dibahas pula tentang *reformasi institusi* di negara masing-masing. Sementara sasaran utama kerjasama ekonomi IMT-GT adalah meningkatkan *daya saing ekspor* negara masing-masing di pasar global, melalui efisiensi biaya di bidang transportasi dan bahan baku serta produktivitas tenaga kerja.

4.2 STRUKTUR PEREKONOMIAN IMT-GT

Daerah-daerah yang tergabung dalam pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan paling barat ASEAN ini cukup potensial karena masing-masing wilayah memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Sayangnya, informasi/data tentang potensi wilayah untuk pantai barat Malaysia dan pantai selatan Thailand tidak bisa diperoleh secara rinci karena tim studi perdagangan tidak melakukan kunjungan ke daerah tersebut.

Propinsi Aceh yang terletak di bagian ujung barat Indonesia dan dikenal sebagai Serambi Mekah Indonesia memiliki area seluas 55,4 ribu km² dan dihuni oleh sekitar 3,4 juta orang pada 1990. Sementara propinsi Sumatera Utara mempunyai area seluas 71,7 ribu km² dan berpenduduk 10,3 juta jiwa pada tahun yang sama. Jika digabung, luas dua propinsi tersebut adalah yang paling luas, yakni sekitar 70 persen dari luas area IMT-GT, sementara jumlah penduduknya sekitar 65 persen dari total penduduk di atas. Propinsi Aceh terdiri dari 8 kabupaten, 2 kotamadya dan 1 kota administratif, sedangkan propinsi Sumatera Utara terdiri atas 11 kabupaten dan 6 kotamadya dengan Medan sebagai ibu-kota propinsi yang merupakan kota terbesar ketiga sesudah Jakarta dan Surabaya.

Tabel 4.2.1
Luas Area dan Jumlah Penduduk IMT-GT, 1990

Wilayah	Luas Area (km2)	Penduduk (000 jiwa)	Kepadatan per km2
Sumatera bagian utara	127.070	13.657	106
Aceh	55.390	3.415	62
Sumatera Utara	71.680	10.252	143
Pantai barat Malaysia	32.257	4.658	153
Perak	21.005	2.040	105
Penang	1.031	2.040	1.099
Kedah	9.426	1.301	148
Perlis	795	184	234
Pantai selatan Thailand	20.809	2.840	136
Songkha	7.394	1.148	155
Satun	2.479	217	88
Yala	4.521	364	81
Narathiwat	4.475	545	122
Pattani	1.940	566	292
Total IMT-GT	180.136	21.165	117

Sumber: Asian Development Bank, IMT-GT Development Project, 1994

Struktur perekonomian Sumatera bagian utara yang dicerminkan lewat struktur Pendapatan Domestik Regional Brutonya (PDRB), seperti terlihat pada Tabel 4.2.2, tertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan. Aceh lebih tertumpu pada sektor pertambangan, sebab andil sektor ini sekitar 58 persen terhadap total PDRB-nya, sementara Sumatera Utara pada sektor pertanian, karena sumbangan sektor ini sekitar 34 persen. Jika kedua propinsi tersebut digabung, maka kontribusi kedua sektor diatas hampir sama yakni sekitar 28 persen untuk sektor pertanian, dan 25 persen untuk pertambangan terhadap total PDRB-nya.

Sektor pertambangan di Aceh didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi. Pada dasarnya sektor ini adalah sektor yang mempunyai kaitan (*enclave sector*) yang minim dengan sektor lainnya karena sifatnya yang padat modal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut, karena meski sektor pertambangan memberikan kontribusi sangat besar terhadap PDRB Aceh, namun jumlah penduduknya sebagian besar masih bekerja di sektor pertanian.

Sektor pertanian memberikan sumbangan cukup besar di Sumatera Utara (dan juga Aceh). Selain terkenal sebagai penghasil beras yang seluruhnya dipergunakan untuk kebutuhan lokal (di Aceh terjadi surplus beras, sementara Sumatera Utara sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri), maka komoditas utama pertanian lainnya yang dihasilkan Sumatera Utara adalah hasil perkebunan seperti: sayuran (ekspor ke Singapura dan Malaysia yakni sekitar 6 persen dari total ekspor propinsi). Selanjutnya: karet dan hasil olahannya (sekitar 3/4 dari total produksi nasional), kelapa sawit (1/2 dari total area dan 3/4 dari total produksi nasional), kopi (kedua propinsi menyumbang sekitar 14 persen dari total ekspor nasional), dan kakao (andil Sumatera Utara sekitar 28 persen dari produksi nasional).

Perikanan laut memiliki porsi yang cukup besar pula terhadap produksi regional di dua propinsi, namun penguasaannya masih bersifat tradisional karena hampir semua nelayan memakai kapal tanpa motor. Luas hutan di dua propinsi sebetulnya cukup luas, namun operasionalisasinya kurang efisien dan kurang berperan dibanding dengan peranan hutan di Kalimantan.

Sementara itu, struktur industri di dua propinsi cukup berbeda. Industri di Aceh terkonsentrasi pada industri berat seperti: gas alam untuk LNG dan pupuk, batu kapur untuk semen, sumber mineral untuk makanan ternak, dan sebagainya. Namun, industri manufaktur di Aceh sangat kecil, hanya memberi porsi sekitar 3 persen terhadap PDRB-nya. Kawasan Industri di Aceh terdapat di Lhokseumawe, dan zone industri yang lebih kecil terdapat di Langsa.

Industri di Sumatera Utara lebih tersebar, mulai dari industri berat seperti: pulp, kimia, baja, aluminium; barang-barang konsumsi seperti: produk-produk pertanian dan hasil hutan, karet (untuk ban, sepatu, sarung tangan) hingga barang-barang untuk keperluan sehari-hari seperti: sabun, mentega, minyak dan lainnya. Kawasan Industrinya terdapat di Medan (Kawasan Industri Medan) yang didirikan pada 1976 dengan luas 150 Ha. Kawasan Berikat (EPZ) juga dibangun di pinggiran kota Medan yang dekat dengan pelabuhan Belawan.

Tabel 4.2.2
Struktur PDRB di IMT-GT, 1988

Sektor Industri	Indonesia	Malaysia	Thailand
Pertanian	25,0	23,8	33,6
Pertambangan	37,4	4,2	5,0
Manufaktur	9,8	26,6	5,0
Konstruksi	8,6	2,5	5,2
Listrik, gas dan air	2,3	1,9	2,5
Transportasi	9,9	6,9	6,8
Telekomunikasi	6,3	9,0	14,8
Perdagangan dan hotel	3,5	9,5	2,7
Jasa-jasa	5,2	15,6	24,4
Total GDP (US\$ juta)	5.525	5.239	1.781
Laju Pertumbuhan, 1985-8 (%)	6,2	5,0	12,3
GDP/kapita (US\$)	405	1.148	249

Sumber : idem Tabel 4.2.1

Catatan : masing-masing negara diwakili oleh propinsi/daerah/negara bagian yang tergabung dalam kerjasama IMT-GT

Dari Tabel 4.2.2 di atas terlihat, bahwa Sumatera bagian Utara memiliki kekuatan pada sektor pertambangan dan pertanian, pantai barat Malaysia pada sektor manufaktur dan pertanian, sementara pantai selatan Thailand pada sektor pertanian dan jasa-jasa. Dengan kondisi semacam ini, masing-masing daerah memiliki keunggulan komparatif sehingga mereka bisa memfokuskan diri pada sektor unggulan diatas. Namun demikian, bukan berarti sektor-sektor yang tidak memiliki andil besar terhadap PDRB dibiarkan, tetapi harus dikembangkan sedemikian rupa agar komposisi sektor-sektor industri diatas lebih merata.

Propinsi Aceh dan Sumatera Utara, seperti umumnya wilayah lain di pulau Sumatera memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Di kawasan ini sedikitnya terdapat 1,1 juta ha lahan rawa pasang surut dan lahan gambut yang berpotensi untuk dijadikan sentral tanaman pangan. Dewasa ini, potensi tersebut sudah mulai dimanfaatkan dengan dikembangkannya perkebunan kelapa sawit berikut pengolahannya dalam bentuk CPO. Demikian pula dengan lahan perkebunannya, meskipun pengusahaannya masih bersifat tradisional seperti pada perkebunan karet dan kopi rakyat.

Di Propinsi Aceh, telah dikembangkan pula pertambangan emas di barat laut Aceh, pasir besi di Aceh Selatan, dan tambang batu bara di pantai barat Meulaboh. Demikian juga dengan industri pengolahannya yang tersebar hampir di seluruh pelosok Aceh seperti Pusat Industri Dasar (Industri Gas Alam, LNG) di Lhokseumawe, Petro Based Indonesia Zone, Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Asean, serta industri kertas.

Di bidang pariwisata, sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia Bagian Barat, Propinsi Aceh dan Sumatera Utara diperkaya dengan berbagai wisata alam dan budayanya. Jenis wisata alam terdapat di pantai Pulau We, Tanjung Batee Putih, Batee, Langputu, Tanjung Jambu Air, Telaga Tuju dan Kuala Angsa di Propinsi Aceh, serta Danau Toba, P Samosir, P Kampai, P Sembilan dan pantai Sibolga di Sumatera Utara. Sementara wisata budaya meliputi berbagai atraksi kesenian, upacara adat dan keagamaan yang mempunyai keunikan masing-masing.

4.3 SUMBERDAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia di dua wilayah, terutama di propinsi Sumatera Utara cukup mendukung, karena jumlah penduduk propinsi Sumatera Utara sekitar 10,3 juta orang pada 1990 dan diperkirakan 12,3 juta jiwa pada tahun 2000. Sementara jumlah penduduk propinsi Aceh sekitar 3,4 juta jiwa pada 1990, dan akan berjumlah 4,3 juta orang pada tahun 2000. Selanjutnya, luas propinsi Aceh sekitar 55 ribu km² dan luas Sumatera Utara sekitar 75 ribu km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk per kilometer di Aceh sekitar 71 orang dan di Sumatera Utara 150 orang. Dengan demikian, luas lahan di dua wilayah diatas sangat potensial, sehingga kebijakan yang mengarah pada penggunaan lahan produktif harus terus dikembangkan.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun belakangan ini masih tetap besar. Pada tahun 1993, tercatat sekitar 66 persen berstatus petani, nelayan, peternak dan sejenisnya di propinsi Aceh dan 60 persen di propinsi Sumatera Utara. Sementara di sektor industri masih kecil yakni kurang lebih 5 persen dan 7 persen untuk masing-masing propinsi, dan sektor jasa menyerap tenaga kerja sekitar 29 persen di Aceh dan 40 persen di Sumatera Utara.

Tabel 4.3.1
Distribusi Tenaga Kerja 10 tahun keatas
di Propinsi Aceh Menurut Sektor, 1993

Sektor	Jumlah (000 org)	%
Pertanian	1.001,4	65,9
Pertambangan & Galian	16,7	1,1
Industri Manufaktur	62,2	4,1
Listrik, Gas & Air Minum	10,4	0,7
Konstruksi	44,2	2,9
Perdagangan	153,6	10,1
Komunikasi	32,2	2,1
Keuangan	4,9	0,3
Jasa-jasa	181,3	11,9
Lainnya	13,2	0,9
Jumlah	1.520,1	100,0

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Aceh, 1995

Jumlah tenaga kerja berusia 10 tahun keatas di Propinsi Aceh pada 1993 sekitar 1,6 juta dan yang benar-benar bekerja kurang lebih 1,5 juta orang atau 95,4 persen. Dari jumlah tenaga kerja diatas, ada sekitar 1 juta pekerja laki-laki dan 600 ribu pekerja perempuan. Sementara jumlah angkatan kerja yang berusia 10 tahun keatas sekitar 2,1 juta orang. Ini berarti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Propinsi Aceh sekitar 70 persen.

Menurut pendidikan yang ditamatkan, ternyata jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SLTA keatas masih kurang, yakni sekitar 250 ribu dan lulusan Perguruan Tinggi/Akademi berjumlah 47 ribu orang. Ini berarti jumlah pekerja yang berpendidikan menengah keatas hanya sekitar 19 persen dari total tenaga kerja di propinsi Aceh pada 1993. Sementara di Sumatera Utara proporsinya tidak begitu berbeda dengan propinsi Aceh. Sayangnya, data ketenaga kerjaan Propinsi Sumatera Utara untuk tahun terakhir tidak diperoleh, namun data tahun 1991 menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja berusia 10 tahun keatas, baik menurut sektor maupun menurut pendidikan, kurang lebih memiliki distribusi yang hampir sama dengan Propinsi Aceh.

Tabel 4.3.2
Jumlah Tenaga Kerja Berumur 10 Tahun Keatas
di Aceh Menurut Pendidikan, 1993 (000 orang)

Pendidikan	Laki	Prp	Jumlah
Tidak Sekolah	57,3	84,9	142,2 (8,9)
Tidak Tamat SD	235,1	163,9	399,0 (25,0)
SD	322,4	192,3	514,7 (32,3)
SLTP	161,4	73,8	235,2 (14,8)
SLTA	169,2	85,8	255,0 (16,0)
PT/Akademi	30,3	16,9	47,2 (3,0)
Total	975,7	617,6	1.593,3 (100)

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Aceh, 1995

Walaupun peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar, namun peranannya terhadap PDRB relatif kecil, yakni berkisar di angka 23 persen. Sektor yang paling besar sumbangannya terhadap PDRB di propinsi Aceh adalah sektor jasa-jasa, yakni sekitar 37 persen, diikuti oleh sektor industri dengan 30 persen. Namun di Sumatera Utara kontribusi sektor pertanian (terutama perkebunan) terhadap PDRB cukup besar, yakni sekitar 37 persen, diikuti oleh sektor perdagangan dan industri yang masing-masing sekitar 17 persen pada 1994. Terlihat ada perbedaan yang cukup nyata tentang peranan sektor pertanian terhadap PDRB masing-masing di Aceh dan Sumatera Utara.

Selanjutnya, angka persentase di atas berbeda pula dibandingkan dengan angka persentase dalam PDRB sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh definisi yang berbeda, dimana semua kegiatan yang berkaitan dengan sektor pertambangan dimasukkan dalam sektor pertanian, padahal sektor pertambangan bisa pula dimasukkan dalam sektor industri manufaktur. Namun demikian, dari fakta di atas secara umum, bisa dikatakan bahwa, *pertama*, Propinsi Aceh bisa disebut sebagai daerah industri (yang terkait dengan hasil pertambangan) dan, *kedua*, Di Aceh bisa pula disebut sebagai daerah pertanian. Untuk Propinsi Sumatera Utara, daerah ini bisa dikatakan sebagai daerah agraris, terutama hasil perkebunannya (yang terkait dengan agrobisnis).

4.4 SEKTOR POTENSIAL (SEKTOR PERTANIAN)

Seperti telah diuraikan di depan, kegiatan ekonomi Propinsi Aceh dan Sumatera Utara masih tertumpu pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dari masih besarnya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Demikian pula sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB-nya.

Kenyataan di atas berkaitan dengan masih luasnya lahan pertanian di dua propinsi. Propinsi Aceh memiliki luas lahan pertanian sekitar 1,6 juta ha dan Sumatera Utara lebih dari 3,3 juta ha, sehingga jumlah lahan pertanian di dua daerah tersebut mencapai 5 juta ha. Sebagian besar dari lahan di atas berupa lahan kering yang ditanami oleh tanaman perkebunan dan palawija.

Tabel 4.4.1
Luas Lahan Pertanian di Sumatera Bagian Utara
Menurut Penggunaannya, 1991 (000 Ha)

Penggunaan Lahan	Aceh	Sumatera Utara	Jumlah
Sawah	316,4 (19,3)	530,8 (18,2)	847,3 (17,0)
Lahan Kering			
Kebun (Perkeb. kecil)	533,6 (32,5)	630,5 (19,2)	1.164,1 (23,4)
Perkebunan Besar	316,4 (19,3)	1.507,3 (46,0)	1.823,7 (36,6)
Ladang Rumput	116,4 (7,1)	152,9 (4,7)	269,3 (5,4)
Perikanan Darat			
Tambak	29,7 (1,8)	9,4 (0,3)	39,1 (0,8)
Kolam	8,8 (0,5)	6,5 (0,2)	15,3 (0,3)
Luas Lahan	1.640,8 (100)	3.276,4 (100)	4.977,2 (100)

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1994

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase

Tabel 4.4.1 di atas memperlihatkan bahwa penggunaan lahan untuk sawah (yang berkaitan dengan irigasi teknis) di dua propinsi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Namun tidak demikian dengan penggunaan lahan kering, karena di Aceh, penggunaan lahan kering untuk kebun (perkebunan rakyat) cukup luas, sementara di Sumatera Utara relatif sempit karena penggunaan lahannya lebih diperuntukan bagi perkebunan besar.

Peranan perikanan darat di Sumatera bagian utara masih kecil. Indikasi ini dicerminkan lewat penggunaan lahan untuk perikanan, dimana luas tambak dan kolam di Aceh kurang lebih 38.500 ha atau 2,3 persen terhadap total, bahkan di Sumatera Utara hanya 16 ribu ha atau sekitar 0,5 persen saja. Perikanan darat di

Sumatera bagian utara, terutama di Aceh, sebagian besar adalah perikanan tambak.

Dari 5 juta ha lahan pertanian di atas, masih ditemui adanya lahan kering yang tidak digunakan, yaitu sekitar 319 ribu ha di Aceh dan 439 ribu ha di Sumatera Utara. Ini berarti masih ada 758 ribu ha atau lebih dari 15 persen dari total lahan pertanian di Sumatera bagian utara yang tidak digunakan. Besar kemungkinan, lahan tersebut digunakan untuk peternakan dan untuk perluasan peternakan. Selanjutnya masih ada area yang berbentuk hutan dimana luas hutan di Aceh seluas 300 ribu ha dan di Sumatera Utara 425 ribu ha. Sebagian dari area hutan di atas, mungkin saja dapat digunakan untuk lahan pertanian.

Peranan sektor pertanian lainnya seperti perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, tampaknya cukup bervariasi. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, tampaknya sub-sektor pertanian pangan yang paling besar, namun dari sisi produknya (melalui PDRB) mungkin berbeda. Sub sektor tanaman pangan cukup dominan di Aceh, namun sub-sektor perkebunan (terutama perkebunan besar) cukup berperan di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, dari sisi produksi, PDRB menurut sub-sektor sangat layak untuk ditampilkan.

Tabel 4.4.2
PDRB Sektor Pertanian Berdasarkan Harga
Berlaku di Sumatera Bagian Utara, 1993 (Milyar Rp)

Sub-Sektor	DI Aceh	Sumatera Utara
Tanaman Pangan	1.063,3 (50,7)	2.007,6 (36,2)
Perkebunan Rakyat	255,2 (12,2)	462,8 (8,4)
Perkebunan Besar	0	1.606,4 (29,1)
Peternakann	256,8 (12,2)	641,0 (11,6)
Kehutanan	197,3 (9,4)	136,9 (2,5)
Perikanan	325,0 (15,5)	672,1 (12,2)
Sektor Pertanian	2.097,6 (100)	5.526,8 (100)

Sumber: BPS, PDRB Propinsi Menurut Lapangan Usaha, 1995

Tabel PDRB di atas memperlihatkan bahwa sumbangan sub- sektor tanaman pangan di Aceh adalah yang paling tinggi, diikuti oleh sub-sektor perikanan. Sementara sumbangan sub-sektor perkebunan (rakyat dan perkebunan besar) di Sumatera Utara adalah yang paling besar, diikuti oleh sub-sektor tanaman pangan. Sub-sektor perkebunan besar di Aceh masih dalam tahap permulaan sehingga hasilnya belum terlihat, namun peranan sub-sektor ini akan meningkat di masa mendatang jika panen sudah tiba.

Data PDRB di atas mengindikasikan pula bahwa, Sumatera Utara memiliki keunggulan komparatif di sub-sektor perkebunan, sementara Aceh di sub-sektor tanaman pangan. Sub-sektor perkebunan di Sumatera Utara didominasi oleh perkebunan besar dimana sub-sektor ini bekerja dalam skala ekonomi yang besar. Ini berarti, pengelolaannya ditangani secara profesional sehingga sub-sektor perkebunan besar cukup mampu untuk bersaing di pasar global.

4.5 PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu indikator 'keterbukaan ekonomi' daerah yang bersangkutan dengan dunia luar. Dalam kasus IMT-GT, terlihat bahwa perdagangan intra daerah yang tergabung dalam IMT-GT memperlihatkan volume perdagangan yang rendah. Ekspor propinsi Aceh ke Malaysia relatif rendah dan cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Pada 1989, nilai ekspor Aceh ke Malaysia sekitar 15 juta dolar Amerika, namun pada 1994 turun menjadi 7 juta dolar. Pola yang sama terjadi untuk ekspor ke Thailand yang mencapai 29 juta dolar pada 1989, dan turun secara drastis menjadi 6,1 juta dolar pada 1994.

Sementara ekspor Sumatera Utara ke Malaysia cenderung meningkat yakni dari 37 juta dolar pada 1989 menjadi 116 juta dolar pada 1994. Begitu pula ekspor ke Thailand meningkat secara perlahan, dari 11,2 juta dolar ke 12,1 juta dolar pada periode yang sama.

Jadi nilai ekspor Aceh dan Sumatera Utara ke mitra dagangnya di Malaysia dan Thailand relatif kecil, kurang dari 1 persen untuk Aceh dan kurang dari 5 persen untuk Sumatera Utara terhadap total ekspor masing-masing daerah. Salah satu sebab kecilnya proporsi ekspor Sumatera bagian utara ke Malaysia dan Thailand, karena komoditas yang dihasilkan Aceh dan Sumatera Utara relatif sama dengan produk yang dihasilkan mitranya di atas. Ekspor komoditas non-migas utama Aceh ke Malaysia dan Thailand adalah pupuk urea, namun nilainya relatif kecil, karena ekspor Aceh didominasi oleh sektor minyak, terutama LNG. Sementara ekspor Sumatera Utara ke Malaysia, terutama minyak sawit (dalam bentuk CPO), sayuran dan ikan segar, dan ekspor ke Thailand, terutama komoditas hasil industri seperti: kertas, aluminium, dan besi & baja.

Negara tujuan utama ekspor Aceh adalah Jepang yang mencapai dua pertiga dari total ekspor propinsi Aceh selama lima tahun terakhir. Ekspor ke negara tersebut didominasi oleh minyak dan gas bumi. Pada tahun 1994, Singapura merupakan tujuan utama ekspor Aceh, menggantikan peran AS yang menonjol pada awal Pelita V. Sementara negara tujuan utama ekspor Sumatera Utara lebih merata dibanding Aceh, namun Jepang tetap merupakan mitra dagang utama, diikuti oleh Amerika, Singapura dan Jerman. Ada indikasi bahwa ekspor Aceh

cenderung menurun, sementara ekspor Sumatera Utara cenderung meningkat. Kenyataan ini bisa dilihat dari tabel 3.7, dimana sejak awal Pelita V, nilai ekspor Aceh selalu diatas Sumatera Utara, namun pada 1994, nilai eskpornya dilalui oleh propinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.5.1
Nilai Ekspor Aceh dan Sumut, 1989-94 (US\$ juta)

		M'sia	Thai	S'pur	Jepang	AS	Jerman	Total
Aceh	1989	14,8	29,3	36,0	1.347,0	444,8	0,7	2.426,8
	1990	26,5	14,7	9,8	1.799,8	274,5	-	2.979,0
	1991	12,3	9,9	4,7	1.959,9	33,0	0,1	3.107,1
	1992	4,2	6,6	10,7	1.816,6	11,8	0,1	3.039,0
	1993	6,4	7,9	14,5	1.708,9	36,3	-	2.894,7
	1994	7,0	6,1	170,1	1.370,3	12,3	-	2.479,9
Sumut	1989	36,8	11,2	108,7	523,7	50,0	86,3	1.771,1
	1990	38,7	6,3	107,3	398,8	200,9	80,6	1.542,4
	1991	58,1	8,0	142,0	387,8	236,6	92,8	1.792,0
	1992	96,9	11,4	174,5	352,1	275,4	104,2	2.012,5
	1993	130,9	12,6	126,3	415,5	269,9	110,6	2.228,4
	1994	115,5	12,1	133,9	482,9	313,9	155,4	2.689,3

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1995

Komoditas ekspor Aceh yang berasal dari produk industri adalah: pupuk urea, plywood dan kayu olahan, kertas, dan semen curah. Kemudian hasil pertaniannya seperti: kopi dan udang. Namun yang paling tinggi nilai ekspornya adalah minyak dan gas bumi, terutama LNG, karena propinsi Aceh merupakan penghasil utama komoditas tersebut.

Komoditas ekspor non-migas terutama ditujukan ke Jepang, Korea, Vietnam, Cina, India, AS dan negara Asia lainnya serta Eropa Barat. Sementara ekspor minyak dan gas bumi ditujukan ke Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Australia. Pelabuhan ekspor untuk komoditas hasil pertanian seperti kopi, udang dan kayu olahan adalah Belawan, Medan; sementara pelabuhan ekspor untuk hasil industri adalah: Lhokseumawe, Kuala Langsa dan Lhok'Nga, serta pelabuhan ekspor untuk minyak dan gas bumi adalah Blang Lancang.

Tabel 4.5.2
Komoditas Ekspor Utama Propinsi Aceh menurut Negara Tujuan, 1994

Komoditas	Tujuan Ekspor	Nilai (\$ ribu)
MIGAS		2.178.253
LNG	Jepang	1.024.300
	Korea Selatan	473.239
Arun Condensate	Korea Selatan	226.815
	Singapura	154.609
	Jepang	89.524
	Taiwan	39.715
	Australia	5.040
LPG	Jepang	165.010
NON MIGAS		198.494
Pupuk Urea	Vietnam	52.018
	India	11.819
	Cina	9.676
	Jepang	5.078
	Thailand	4.286
	Malaysia	4.224
	Pilipina	3.147
	Sudan	2.400
Plywood	Jepang	10.910
	Inggris	8.189
	AS	5.762
	Korea Selatan	3.223
	Belgia	3.111
	Cina	1.961
	Hongkong	1.845
Kayu Olahan	Korea Selatan	7.263
	Belanda	5.927
	Jepang	2.130
	Belgia	906
Udang	Jepang	10.447
Kopi	Jepang	9.229
	AS	1.086
	Jerman	520
Semen Curah	Srilangka	2.991
	Brunei D	2.553
	Singapura	1.030
Kertas	Vietnam	2.978
	Malaysia	2.645
	Srilangka	1.731

Sumber: Kanwil Perdagangan Propinsi DI Aceh, 1995

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Jepang merupakan tujuan utama ekspor migas Propinsi Aceh, diikuti oleh Korea Selatan dan Singapura. Sementara, negara tujuan utama komoditas ekspor non migas adalah: Vietnam (terutama pupuk urea), Jepang, Korea Selatan, India dan Inggris. Dengan demikian strategi ekspor yang diperlukan propinsi Aceh adalah strategi peningkatan ekspor melalui komoditas hasil industri dan hasil pertanian, terutama udang dan kopi.

Ekspor utama Sumatera Utara adalah hasil industri manufaktur seperti: minyak sawit, karet olahan, plywood dan alumina. Kemudian komoditas utama pertanian yang diekspor adalah udang, kopi, lateks dan sayuran, serta ekspor minyak dan gas bumi. Tujuan utama ekspor migas adalah Jepang dan Singapura, sementara tujuan utama ekspor non migas adalah: Jepang (alumina dan plywood), AS (karet olahan), Jerman dan Singapura.

Dari sisi impor, propinsi Aceh mengimpor sekitar 200 juta dolar setiap tahunnya, dengan Jepang sebagai mitra utamanya, diikuti oleh AS. Nilai impor tersebut relatif kecil dibanding ekspornya, sehingga terjadi surplus perdagangan yang sangat besar yang mencapai 2 milyar dolar per tahunnya. Namun data ekspor dan impor ini perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikannya, karena data perdagangan tersebut hanya data ekspor-impor dengan luar negeri, padahal perdagangan Propinsi Aceh terjadi pula dengan propinsi lainnya (intra propinsi) di Indonesia. Selain itu, ekspor-impor Aceh yang dimuat/dibongkar melalui pelabuhan lain diluar Aceh sering dianggap sebagai ekspor dan impor propinsi yang bersangkutan. Akibatnya, data perdagangan regional, terutama data impor, lebih kecil dibandingkan dengan data sebenarnya.

Hal yang sama terjadi pula pada propinsi Sumatera Utara yang impornya menurut negara asal cukup bervariasi dibandingkan dengan propinsi Aceh. Tabel 3.9 memperlihatkan bahwa komoditas impor propinsi Sumatera Utara terutama didatangkan dari Jepang, AS, Singapura, dan Jerman. Yang sangat menarik adalah impor dari Jerman yang pertumbuhannya begitu cepat. Pada 1994, Jerman merupakan mitra dagang utama Sumatera Utara yang berhasil menggeser kedudukan Jepang, Singapura dan AS, padahal selama ini, negara-negara tersebut merupakan mitra dagang utama propinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.5.2
Nilai Impor Aceh dan Sumut, 1989-94 (US\$ juta)

	Tahun	M'sia	Thai	S'pura	Jepang	AS	Jerman	Total
Aceh	1989	0,6	4,1	5,4	17,1	119,5	3,1	164,5
	1990	0,6	1,9	2,7	32,6	35,6	0,6	88,1
	1991	0,4	1,3	8,8	36,5	95,0	1,7	168,4
	1992	0	0,9	5,4	23,7	61,0	1,6	115,8
	1993	1,5	0,9	14,3	27,9	33,8	1,2	101,9
	1994	2,3	0,6	7,4	93,8	84,8	21,8	257,2
Sumut	1989	18,5	26,3	43,3	89,6	51,1	43,7	813,5
	1990	18,6	14,9	61,4	95,8	61,6	32,9	825,2
	1991	25,4	14,9	83,7	84,9	108,6	31,0	798,0
	1992	57,5	10,3	100,7	96,0	69,3	140,6	908,0
	1993	30,9	13,0	86,0	118,6	95,2	105,9	957,0
	1994	34,5	12,1	97,1	90,6	94,5	174,6	990,9

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1995

Komoditas utama Propinsi Aceh dan Sumatera Utara yang diimpor adalah barang-barang modal yang umumnya terkait dengan industri komoditas ekspor utama, seperti minyak dan gas bumi serta industri pupuk, semen, aluminium dan produk-produk agrobisnis. Komoditas impor diatas terutama dibongkar melalui pelabuhan utama Belawan, dan pelabuhan minyak di Pangkalan Brandan dan Blang Lancang, Lhok Seumawe dan pelabuhan lainnya.

Nilai impor Aceh dari Malaysia dan Thailand relatif kecil yakni 2,9 juta dolar Amerika (2,3 juta dan 600 ribu dolar) atau 1 persen lebih dari total impor. Sedangkan impor Sumatera Utara dari negara yang sama sekitar 46,6 juta dolar (34,5 dan 12,1 juta dolar) atau kurang dari 5 persen dari total impornya. Proporsi tersebut relatif sama dengan proporsi ekspornya. Kenyataan ini bisa diinterpretasikan bahwa perdagangan intra IMT-GT belum memperlihatkan volume yang cukup berarti karena tidak terdapat ketergantungan yang nyata diantara mereka.

Komoditas utama yang diimpor Sumatera Utara dari Malaysia adalah: minyak kelapa, barang-barang kimia dan hasil industri lainnya. Sementara yang diimpor dari Thailand berupa: akar-akaran, plastik dan lapisan timah. Impor utama Aceh dari Malaysia dan Thailand tampaknya relatif sama dengan komoditas yang diimpor Sumatera Utara.

Faktor lainnya yang sangat terkait dengan perekonomian regional adalah investasi. Penanaman modal sangat tergantung akan potensi daerah yang bersangkutan, misalnya dalam hal SDA, SDM, pasar, dan faktor internal lainnya. Dalam hal ini, ada anggapan yang menyatakan bahwa makin besar investasi, maka produk-produk yang dihasilkan daerah tersebut akan semakin kompetitif.

Salah satu tolok ukur efisiensi perekonomian yang berkaitan dengan investasi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah rasio antara besarnya investasi yang diperlukan dan laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki. Makin besar ICOR, maka makin kurang efisien. Sebaliknya, ICOR-nya makin kecil, maka makin efisien pengelolaan perekonomian daerah tersebut.

Di antara sumber-sumber pembiayaan untuk investasi yang sangat penting, selain tabungan pemerintah dan masyarakat adalah investor dalam negeri (PMDN) dan investor luar negeri (PMA). Berdasarkan data BKPM terlihat bahwa, baik investor dalam negeri maupun investor asing, lebih suka untuk menanamkan modalnya di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedekatan dengan pasar, tersedianya SDM, terjaminnya infrastruktur dan terkonsentrasinya pusat-pusat perekonomian seperti pusat perbankan, pusat perdagangan, pusat pemerintahan dan pusat-pusat lainnya di Jakarta merupakan alasan utama para investor untuk menanamkan modalnya di dua daerah diatas.

Tabel 4.5.3
Jumlah dan Nilai Proyek PMDN dan PMA yang
Disetujui Menurut Lokasi, 1992-1994

Propinsi	Jumlah Proyek (buah)			Nilai Investasi		
	1992	1993	1994	1992	1993	1994
PMDN	436	548	823	29.341	39.450	53.289
Jawa Barat	144	167	241	7.876	11.681	15.863
DKI Jakarta	86	131	185	4.002	8.829	5.968
Aceh	8	4	5	1.450	305	128
Sumatera Ut.	17	11	29	1.936	1.492	805
PMA	305	329	449	10.323	8.144	23.724
Jawa Barat	113	98	155	4.497	2.508	4.446
DKI Jakarta	90	111	115	1.131	1.669	1.830
Aceh	0	2	4	0	529	1.050
Sumatera Ut.	5	9	8	658	78	225

Sumber : BKPM, 1995

Catatan : a. Nilai untuk PMDN dalam milyar rupiah
b. Nilai untuk PMA dalam juta dolar AS

Tabel 4.5.3 di atas memperlihatkan bahwa tujuan utama investor, baik asing maupun dalam negeri dalam tiga tahun terakhir (juga nilai kumulatif 1967-1994) adalah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sementara Aceh, dalam hal PMDN, menduduki urutan 22 dan Sumatera Utara di peringkat 12 pada tahun 1994. Namun menurut PMA, Aceh menduduki peringkat 8 dan Sumatera Utara di urutan 10 pada tahun yang sama. Tampaknya ada korelasi positif antara jarak dan jumlah/nilai investasi, dan antara potensi daerah dengan jumlah investasi. Makin jauh lokasinya dengan pemerintah pusat, makin sedikit investasi ke daerah tersebut, serta makin potensial daerah tersebut, makin banyak investasi masuk.

PMDN di Propinsi Aceh banyak terjadi pada sektor yang berkaitan dengan sumberdaya alam seperti industri kertas dan agro-industri. Sementara jumlah PMA yang beroperasi di Propinsi Aceh sedikit sekali, dan itupun terbatas pada sektor yang berkaitan dengan sumberdaya alam seperti industri mineral & logam, dan jasa. Pola investasi yang hampir sama terjadi pula pada Propinsi Sumatera Utara.

Terbatasnya jumlah investasi di Propinsi Aceh, terutama disebabkan oleh masalah perizinan yang ruwet. Menurut BKPM setempat, banyak sekali tahapan perizinan yang harus dilalui para investor sebelum mereka dapat beroperasi, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengurus segala perizinan di atas antara 1 hingga 4 tahun. Jadi sinyalemen bahwa perizinan merupakan salah satu fungsi produksi, selain modal dan tenaga kerja, untuk Indonesia tampaknya bisa diterima.

Investasi domestik dan asing di atas berdasarkan rencana investasi yang disetujui. Jika dilihat realisasinya maka angkanya jauh dibawah rencana tersebut. Kumulatif investasi (1967-Mart 1995) yang berjumlah 9.327 proyek PMDN senilai Rp 322,9 trilyun yang disetujui, realisasinya mencapai 5.944 proyek senilai Rp 101,1 trilyun. Untuk PMA, dari 3.383 proyek yang disetujui yang bernilai 109,3 milyar dolar, yang terealisasi berjumlah 1.818 proyek bernilai 32,4 milyar dolar. Ini berarti realisasi PMDN, untuk jumlah dan nilainya adalah 63,7 dan 31,3 persen, sementara untuk PMA adalah 53,7 dan 29,7 persen.

Tabel 4.5.4
Persetujuan dan Realisasi Investasi

	Indonesia		DI Aceh	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
PMDN (1967-3/95)				
Persetujuan	9.327	322.895	114	3.887
Realisasi	5.944 (63,7)	101.094 (31,3)	77 (67,5)	1.757 (45,2)
PMA				
Persetujuan	3.383	109.306	24	2.680
Realisasi	1.818 (53,7)	32.424 (29,7)	9 (37,5)	682 (25,4)
PMDN (1994/95)				
Persetujuan	827	49.181	6	313
Realisasi	357 (43,2)	21.562 (43,8)	- (-)	95 (30,6)
PMA				
Persetujuan	560	38.483	6	311,4
Realisasi	215 (38,4)	7.605 (19,8)	2 (33,3)	2,5 (0,8)

Sumber: BKPM dan BKPMD Propinsi Aceh, 1995

Catatan: a. Nilai untuk PMDN dalam milyar rupiah

b. Nilai untuk PMA dalam juta dolar AS

c. Angka dalam kurung menunjukkan angka realisasi

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi PMDN di Propinsi Aceh relatif sama dengan realisasi keseluruhan, hanya untuk tahun 1994/95, belum satupun proyek PMDN yang terealisasi. Sementara untuk PMA, realisasinya di bawah angka nasional. Tampaknya, para investor dalam dan luar negeri masih menunggu waktu untuk merealisasikan investasinya yang sedang diproses perizinannya di instansi terkait. Dengan demikian, masalah perizinan merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam menentukan tinggi rendahnya angka realisasi di atas.

PMA yang menanamkan modalnya di Propinsi Aceh terjadi pada industri kertas dan pertambangan (migas), sementara di Sumatera Utara pada sektor pertanian, terutama perkebunan. Ternyata bahwa nilai investasi asing di propinsi Aceh lebih besar dibandingkan dengan Sumatera Utara, sementara PMDN-nya lebih kecil dibandingkan dengan propinsi tetangganya itu.

4.6 INFRASTRUKTUR/TRANSPORTASI

Infrastruktur yang kurang memadai merupakan kendala utama dalam mendorong investasi, baik domestik maupun asing, dalam melakukan investasinya di Indonesia. Kenyataan ini terutama terjadi di luar Jawa seperti di propinsi Aceh dan Sumatera Utara, padahal jika dilihat dari sisi geografis, posisi propinsi Aceh dan Sumatera Utara sangat strategis. Posisinya yang strategis ini, bukan hanya dalam konteks kerjasama IMT-GT saja, melainkan dalam konteks wilayah lainnya seperti dalam kerjasama IMS-GT, bahkan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas seperti AFTA dan APEC. Hal ini tercermin dari luasnya perairan terbuka yang mengarah langsung ke wilayah luar. Pelabuhan-pelabuhan laut seperti: Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Kuala Langsa, LhokNga, Meulaboh, Blang Pidie dan Singkil di Propinsi Aceh, serta Pulau Kumpai, Pangkalan Brandan, Belawan dan Sibolga di Propinsi Sumatera Utara merupakan sarana perhubungan laut yang cukup memadai. Demikian pula dengan bandar udara Blang Bintang dan Polonia yang lokasinya sangat strategis di dua propinsi diatas.

Kondisi jalan darat di Aceh umumnya baik. Hal ini terlihat dari data jalan menurut kategori dimana jalan negara dan propinsi relatif baik, sementara untuk jalan kabupaten, kondisinya banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan. Untuk jelasnya, kondisi jalan di Propinsi Aceh bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.1
Kondisi Jalan Menurut Status di Prop Aceh, 1993

Status Jalan	Kondisi Jalan (km)				Panjang Jalan
	Baik	Sedang	Rusak	Rsk Brt	
Jalan Negara	738,0 (78,4)	95,2 (10,1)	108,6 (11,5)	-	941,8 (100)
Jalan Propinsi	1.783,5 (49,4)	850,0 (23,5)	290,0 (8,0)	688,4 (19,1)	3.611,9 (100)
Jalan Kabupaten	ta	ta	ta	ta	ta
Jalan Kodya	ta	ta	ta	ta	ta

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Aceh, 1995

Catatan: a. ta = data tidak diperoleh

b. angka dalam kurung menunjukkan persentase

Sementara itu, kondisi jalan di Propinsi Sumatera Utara cukup bervariasi dan cukup berbeda dengan kondisi jalan di Aceh. Di Sumatera Utara, kondisi jalan negara relatif sangat baik, kondisi jalan propinsi sedang-sedang saja, namun kondisi jalan milik kabupaten dan kotamadya banyak yang rusak. Kenyataan ini bisa diinterpretasikan bahwa dana untuk perbaikan jalan di tingkat kabupaten sangat terbatas. Kondisi jalan di Propinsi Sumatera Utara bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.2
Kondisi Jalan di Sumatera Utara, 1992

Status Jalan	Kondisi Jalan (%)				Panjang Jln (Km)
	Baik	Sedang	Rusak	Rsk Brt	
Jalan Negara	43,0	35,0	21,9	0,1	1.252
Jalan Propinsi	20,0	44,0	24,0	12,0	2.453
Jalan Kabupaten	13,8	27,5	29,7	29,0	16.952
Jalan Kodya	39,7	29,3	13,2	17,8	2.277

Sumber : ADB, IMT-GT Development Project yang diambil dari Kanwil Perhubungan Sumatera Utara, 1994

Jika diperhatikan Tabel 4.6.1 dan 4.6.2 di atas, maka secara umum bisa dikatakan bahwa kondisinya cukup baik, namun masih ada beberapa ruas jalan, terutama jalan kabupaten, seperti jaringan jalan yang belum tembus di wilayah Aceh Tengah. Begitu pula dengan jalan kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Masalahnya, kondisi dan peranan infrastruktur berkaitan erat dengan kelancaran arus barang yang masuk dan keluar dari propinsi masing-masing. Transportasi darat seperti jaringan jalan sangat penting di Sumatera bagian utara, karena angkutan melalui kereta api sangat terbatas dan hanya terdapat di Sumatera Utara. Itu pun hanya sebagian kecil saja yang beroperasi, dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan.

Transportasi laut memainkan peranan yang sangat penting pula dalam pembangunan ekonomi daerah. Kelengkapan sarana ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan daerah-daerah yang tergabung dalam kerjasama regional. Pelabuhan-pelabuhan laut di Sumatera bagian utara sangat terbuka untuk kegiatan ekspor impor antar daerah/negara.

Kelancaran transportasi laut sangat tergantung pada fasilitas pelabuhan yang ada. Pelabuhan laut di Aceh dan Sumatera Utara cukup banyak dengan lokasi yang cukup strategis, namun sarananya masih kurang seperti yang terdapat di pelabuhan Lhokseumawe yang belum dilengkapi dengan fasilitas *container equipment*. Tambahan lagi, pelayanan dibidang *shipping service* dan *coastal ports* masih dirasakan kurang. Untuk itu, pemerintah dalam Repelita VI sudah merencanakan untuk memperbaiki dan menambah fasilitas pelabuhan tersebut dengan dana yang ada. Kondisi pelabuhan laut di Sumatera bagian utara dewasa ini bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.3
Kondisi Pelabuhan Laut Utama di Sumatera Bagian Utara, 1993

Pelabuhan Laut	Panjang Demaga (km)	Kedalaman (MLWS)
Sabang	326	-8
Malahayati	100	-6
Lhokseumawe	515	-5 s/d -1
Kuala Langsa	100	-8
Belawan	3,275	-5 s/d -1
Tanjung Balai	158	-2

Sumber: ADB, IMT-GT Development Project yang diambil dari Kanwil Perhubungan Aceh dan Sumatera Utara, 1994

Pelabuhan-pelabuhan laut diatas umumnya milik pemerintah yang dapat digunakan untuk kegiatan ekspor-impor semua jenis komoditas. Selain itu, ada pula pelabuhan laut kepunyaan perusahaan besar, baik milik pemerintah, swasta maupun patungan yang dapat mengangkut komoditas khusus untuk kegiatan ekspor-impornya. Pelabuhan dan komoditas khusus yang diangkut tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6.4
Pelabuhan Khusus di Sumatera Bagian Utara

Nama Perusahaan	Pelabuhan	Produk Yang Diangkut
PT Semen Andalas PT Arun PT Asean Aceh Fertilizer PT Pupuk Iskandar Muda Mobil Oil Indonesia Mobil Oil Indonesia	Lhok Nga Lhok Seumawe Kreung Guekeh Kreung Guekeh Blang Lancang Lhok Sukon	Semen LNG Pupuk Pupuk LNG Peralatan berat

Sumber: idem Tabel 4.6.3

Transportasi udara pun berperan sangat penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Dalam kasus Sumatera bagian utara, jumlah pelabuhan udaranya cukup banyak dengan berbagai fasilitasnya, namun sarananya ini masih perlu ditingkatkan, dan bila perlu, lokasinya dipindah ketempat lain. Untuk jelasnya, kondisi pelabuhan udara di atas bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.5
Kemampuan Bandar Udara di Sumatera Bagian Utara, 1992

Pelabuhan	Pesawat Terbesar yang bisa mendarat	Jumlah Penumpang Yang Diangkut (org)
Polonia	B-747	1.244.078
Blang Bintang	DC-9	53.500
Lhok Sukon	DHC-6	12.500
Lhok Seumawe	DHC-6	20.500
Meulaboh	C-212	1.717
Gunung Sitoli	DHC-6	10.345
Parapat	DC-9	ta
Padang Sidempuan	DHC-6	ta

Sumber: idem Tabel 4.6.3

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Polonia merupakan bandar udara internasional dan terbesar ketiga di Indonesia dengan fasilitasnya yang cukup memadai. Dari dan ke bandar udara Polonia ada penerbangan langsung ke Singapura, Kuala Lumpur dan Penang, sehingga Polonia merupakan pintu gerbang utama Sumatera bagian utara dengan dunia luar. Jumlah penumpangnya mencapai 1 1/4 juta orang yang terdiri dari 838 ribu penumpang domestik dan 406 ribu penumpang asing. Dengan demikian Polonia merupakan bandar udara yang sangat sibuk sehingga sarananya harus selalu disesuaikan. Oleh sebab itu, direncanakan (target tahun 2008), bandar udara Polonia akan dipindahkan ke lokasi lain mengingat lokasinya yang sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan jaman.

Salah satu indikator untuk mengetahui lebih jauh tentang transportasi adalah kebutuhan angkutan (*transport demand*). Kebutuhan transportasi adalah kebutuhan secara ekonomi yang diperoleh dari jumlah komoditas impor dan ekspor yang berasal dari kapal laut dan pesawat udara dibanding jumlah penduduknya. Untuk itu, perlu diketahui rasio ekspor dan impor terhadap jumlah penduduk masing-masing wilayah yang tergabung dalam IMT-GT. Hasil perhitungan tersebut, pada 1993, adalah sebagai berikut (per 100 orang):

Indonesia : 113 ton kargo
 Malaysia : 289 ton kargo
 Thailand : 40 ton kargo

Terlihat bahwa Malaysia memiliki rasio (perbandingan ekspor-impor terhadap jumlah penduduk) yang paling tinggi diikuti oleh Indonesia dan Thailand. Dalam hal ini, masing-masing wilayah diwakili oleh daerah-daerah yang tergabung dalam IMT-GT.

Indikator angkutan lainnya adalah rasio antara jumlah penumpang yang dibawa oleh pesawat udara yang berangkat dan pesawat udara yang datang dengan jumlah penduduk. Rasio tersebut bisa dilihat dalam angka berikut (per 100 orang)

Indonesia : 10 kali
 Malaysia : 77 kali
 Thailand : 26 kali

Data di atas memperlihatkan bahwa rasio tertinggi (jumlah penumpang yang datang dan berangkat dengan pesawat udara dibagi dengan jumlah penduduk) adalah Malaysia, diikuti oleh Thailand dan Indonesia. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa Malaysia banyak membawa penumpang (juga barang) dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Thailand sendiri lebih banyak membawa penumpang dibanding Indonesia, sementara Indonesia dalam posisi sebaliknya, yaitu, lebih banyak membawa barang ketimbang Thailand.

Kesimpulan di atas bisa diperkuat dengan membandingkan tiga daerah yang bergabung. Dengan melihat perbandingan pendapatan per kapita, indeks kebutuhan transportasi, indeks penumpang dan indeks luas masing-masing daerah, dengan mengacu ke Malaysia (Malaysia = 1), maka akan terlihat kelebihan dan kelemahan masing-masing daerah. Perbandingan ketiga daerah tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.6
 Indikator Relatif Kebutuhan Transportasi, 1990

Subregion	US\$	PDRB/ Kapita (Indeks)	Ton/100 penduduk (Indeks)	P'pang/100 penduduk (Indeks)	Luas Area (Indeks)
Indonesia	736	.57	.39	.13	3.91
Malaysia	1299	1.00	1.00	1.00	1.00
Thailand	645	.50	.14	.34	.65

Sumber : ADB, A Subregional Study of the IMT-GT, 1993

Tabel 4.6.6 di atas memperlihatkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia dan Thailand kurang lebih sama, namun jauh di bawah daya beli penduduk Malaysia. Sementara kebutuhan transportasi untuk barang yang dicerminkan lewat indeks volume barang, Indonesia relatif lebih baik dibanding Thailand, karena Indonesia sekitar dua perlima Malaysia, sementara Thailand sepertujuhnya. Namun menurut indeks jumlah penumpang, Indonesia dibawah Thailand yang hanya mencapai seperdelapan Malaysia, sedangkan Thailand sekitar sepertiganya.

Yang paling menonjol bagi Indonesia dari perbandingan di atas ialah indeks areanya. Ini berarti, Sumatera bagian utara memiliki keunggulan dalam hal luas area karena luasnya hampir empat kali luas daerah yang berasal dari Malaysia dan enam kali luas daerah yang berada di Thailand. Dengan demikian, masing-masing daerah memiliki keunggulan dan kelemahannya, namun secara umum bisa dikatakan bahwa Malaysia memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan dua mitranya di IMT-GT tersebut.

KESIMPULAN

Perdagangan antar negara anggota dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN telah menunjukkan peningkatan yang sangat cepat. Namun tidak demikian dengan perdagangan antar daerah yang tergabung dalam Pusat Pertumbuhan IMT-GT. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perdagangan intra ASEAN sudah berada pada tahap intra-trade, sementara perdagangan antar daerah di Kawasan Pertumbuhan IMT-GT baru pada tahap H-O-S (Heckscher-Ohlin-Samuelson) trade yang lebih didasarkan pada keunggulan komparatif.

Peranan Singapura, di Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (dan di Pusat Pertumbuhan Sijori), merupakan faktor yang sangat penting sehingga terjadinya intra-trade diatas. Faktor-faktor pengaruh tersebut adalah: pendapatan per kapita yang sangat tinggi, penguasaan teknologi maju, kepemilikan modal, keunggulan sumberdaya manusia dan keunggulan-keunggulan lainnya yang jauh lebih maju dibandingkan dengan mitra ASEAN-nya sesuai dengan predikat negara tersebut sebagai negara industri baru.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kerjasama ekonomi regional di Kawasan Perdagangan bebas ASEAN cukup bermanfaat bagi semua negara anggota. Meskipun disadari bahwa manfaat masing-masing negara anggota mungkin berbeda atau tidak proporsional. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masing-masing negara yang berbeda. Singapura misalnya, merupakan negara yang sangat diuntungkan (memiliki proporsi yang paling tinggi) dalam perdagangan intra ASEAN (dan perdagangan intra IMS-GT). Sementara Indonesia dinilai memiliki proporsi manfaat yang paling rendah dalam kerja sama ekonomi ASEAN diatas. Demikian pula dengan Riau (memiliki proporsi manfaat yang lebih rendah) dibandingkan dengan mitra Sijori-nya.

Posisi Indonesia di Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dinilai sangat penting mengingat jumlah penduduknya yang paling besar dan luas areanya yang juga paling luas. Demikian pula dengan daerah-daerah yang berasal dari Indonesia yang bergabung dalam kerjasama ekonomi IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA. Namun dari sisi perdagangan, masih agak tertinggal dengan mitra ASEAN-nya. Hal ini diakibatkan oleh produk-produk Indonesia seperti barang-barang hasil industri dan pertaniannya yang relatif sama dengan negara anggota ASEAN lainnya. Selanjutnya, keunggulan komparatif yang selama ini dijadikan alasan utama, tampaknya perlu dilengkapi dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan-keunggulan di atas akan sangat menentukan berhasil tidaknya produk tersebut memasuki pasar global. Dengan demikian, efisiensi, daya saing dan produktivitas merupakan kunci keberhasilan setiap negara agar memiliki keunggulan-keunggulan di atas.

V

KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL SIJORI
(Kasus Batam, Propinsi Riau)
oleh: Firmansyah

MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [illegible]
[illegible]

BAB V
KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL SIJORI
(Kasus Batam, Propinsi Riau)
oleh: Firmansyah

5.1 PENDAHULUAN

Konsep pembangunan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan sudah lama dicanangkan di Indonesia, namun konsep pertumbuhan seperti segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapura-Johor-Riau) baru pertamakali diusulkan oleh Menteri Goh Chok Tong pada Desember 1989. Kemudian diresmikan dalam bentuk persetujuan resmi antara Indonesia dengan Malaysia pada Juni 1990, dan Indonesia dengan Singapura pada Agustus 1990.

Pada bulan Juni 1991, suatu forum yang terdiri dari ahli-ahli ekonomi dan sosial ASEAN melakukan tinjauan terhadap pembangunan segitiga pertumbuhan SIJORI. Mereka menyatakan bahwa telah terjadi perubahan dan kemajuan yang berlangsung dengan cepat di kawasan tersebut. Kerjasama resmi antara pemerintah masing-masing negara semakin intensif, kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan prasarana sosial dan fisik terus meningkat sehingga arus penanaman modal dan mobilitas penduduk semakin tinggi. Atas dasar inilah, kerjasama SIJORI dijadikan "pilot proyek" bagi percepatan pertumbuhan yang bisa dikembangkan di wilayah lain melalui kerjasama manca negara. Dalam kaitan ini, muncul gagasan kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA).

Tulisan ini mencoba menganalisis perkembangan sumber daya manusia dan analisis perekonomian daerah yang bergabung (Propinsi Riau), terutama Pulau Batam. Kajian yang lebih jauh adalah peranan sektor-sektor industri, perdagangan dan penanaman modal.

5.2 STRUKTUR PEREKONOMIAN

Pembangunan perekonomian Batam diarahkan pada tiga sektor kunci yaitu sektor industri, perdagangan dan perhubungan/pariwisata dengan memperhatikan keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Secara spesifik, arah pembangunan sektor kunci adalah memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Riau dan Pendapatan Nasional Brutonya.

Proses pembangunan di Batam selama satu dasawarsa telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan. Selama Pelita IV, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,59 persen/tahun, dan pada Pelita V meningkat menjadi 19,37 persen/tahun, atau secara nominal, naik dari 53,1 milyar rupiah pada tahun 1989 menjadi 107,8 milyar rupiah pada tahun 1993.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Batam tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi yang pernah dicapai oleh suatu daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan investasi, baik PMDN, PMA, maupun non-fasilitas yang sangat pesat, di samping peranan penanaman modal pemerintah di sektor infrastruktur sehingga sangat mendorong investor melakukan investasi di atas. Laju pertumbuhan ekonomi Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.1
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Batam
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1983 (%)

Lapangan Usaha	Pelita IV	Pelita V	Pelita IV & V	Sumber Pertum- buhan Pe- lita IV & V
Pertanian	14,43	23,28	16,99	0,13
Pertambangan & Galian	9,17	17,50	-3,38	-0,13
Industri	7,63	26,88	15,86	6,13
Listrik, Gas & Air Minum	21,78	33,17	23,26	0,19
Bangunan	5,05	11,34	8,46	0,14
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,94	15,60	10,14	1,88
Pengangkutan dan Komunikasi	6,65	10,49	8,36	1,20
Bank & Lembaga Keuangan	9,74	33,82	22,23	1,80
Sewa Rumah	4,83	28,60	14,42	0,75
Pemerintahan dan Pertahanan	4,91	4,91	4,43	0,21
Jasa-jasa	10,28	10,91	9,85	0,09
PDRB	7,59	19,37	12,41	12,41

Sumber: Bappeko Batam dan Kantor Statistik Kodya Batam, Perkiraan Penda-
patan Regional Kotamadya Batam 1983-1993.

Dari Tabel 5.2.1 terlihat bahwa selama Pelita V, rata-rata laju pertumbuhan tiga sektor kunci mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode Pelita IV. Sektor industri meningkat dari 7,63 persen menjadi 26,88 persen, jasa perdagangan/hotel/restoran meningkat dari 7,94 persen menjadi 15,60 persen, dan jasa perhubungan hanya meningkat dari 6,65 persen pada Pelita IV menjadi 10,49 persen pada Pelita V.

Lebih jauh tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan tiga sektor kunci diatas diikuti pula oleh pertumbuhan sektor penunjang lainnya, bahkan sektor-sektor tersebut bisa tumbuh dengan laju yang lebih cepat. Di lain pihak, sektor pemerintah mengalami pertumbuhan yang paling rendah, sesudah sektor pertambangan. Hal ini membuktikan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan hanya sebagai "agent of development" saja, dan sektor swasta yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Batam.

Dilihat dari sumber pertumbuhan, sektor-sektor yang dominan adalah sektor industri, jasa perdagangan/hotel/restoran, dan jasa perbankan/lembaga keuangan. Kontribusi laju pertumbuhan masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan total selama Pelita IV dan V berturut-turut adalah: 6,13 persen, 1,88 dan 1,80 persen.

Sesuai dengan pola pembangunan di Batam yang diarahkan pada tiga sektor kunci yang telah dikemukakan di atas, ternyata sektor kunci tersebut baik dilihat dari laju pertumbuhan maupun kontribusinya terhadap PDRB sangat dominan. Tabel 5.5 menunjukkan bahwa peranan tiga sektor pada tahun 1983 sebesar 70,88 persen, dan meningkat menjadi 73,22 persen pada tahun 1993. Namun demikian, di antara ketiga sektor kunci itu hanya sektor industri yang terus meningkat, sementara dua sektor kunci lainnya cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan sektor-sektor di luar sektor kunci cukup pesat. Struktur perekonomian Batam dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.2.2
Distribusi Persentase PDRB Pulau Batam Menurut
Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 1983, 1983-1993

Sektor	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993 *)
Pertanian	0,63	0,63	0,64	0,71	0,77	0,81	0,82	1,64	1,18	1,04	0,93
Pertambangan & Penggalian	8,14	8,49	8,57	8,70	9,66	9,00	7,91	6,96	2,75	2,01	1,81
Ind. Pengolahan	32,73	33,32	33,70	32,92	32,00	33,38	34,67	34,56	39,94	41,91	44,26
Listrik, Gas dan											
Air Minum	0,48	0,46	0,54	0,64	0,76	0,75	0,79	0,82	1,29	1,27	1,28
Bangunan	2,04	2,12	2,14	2,18	2,10	1,93	1,88	1,88	1,66	1,51	1,42
Perdagangan,											
Hotel & Rest.	20,71	19,80	19,18	18,91	19,19	20,06	19,20	19,12	16,26	17,29	16,88
Pengangkutan & Komunikasi	17,44	17,61	18,58	17,78	17,35	17,01	16,46	15,86	14,86	13,10	12,08
Bank & Lembaga											
Keu. lainnya	5,01	5,48	5,93	6,30	6,20	5,93	7,32	8,39	11,54	11,24	11,57
Sewa Rumah	4,70	4,45	4,32	4,39	4,44	4,01	4,16	4,23	5,43	5,96	5,60
Pemerintahan & Pertahanan	7,04	6,58	6,30	6,33	6,32	5,95	5,65	5,40	4,14	3,77	3,37
Jasa-jasa	1,08	1,06	1,10	1,14	1,19	1,17	1,15	1,13	0,95	0,90	0,86
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : *) Angka Perkiraan

Sumber : BAPPEKO Batam dan Kantor Statistik Kodya Batam, Perkiraan Pendapatan Regional Kotamadya Batam 1983-1993.

Sementara itu, ukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan indikator ekonomi adalah pendapatan per kapita. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Batam melebihi tingkat pendapatan per kapita Propinsi Riau. Namun, pertumbuhannya sampai tahun 1990 nampaknya kurang menggembirakan, bahkan untuk beberapa tahun terjadi pertumbuhan menurun. Baru setelah tahun 1990, terjadi pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya aktivitas ekonomi dan semakin banyaknya industri-industri yang beroperasi. Pendapatan per kapita Batam dapat dilihat pada Tabel 5.2.3

Tabel 5.2.3
PDRB Per Kapita Batam dan Riau, 1983-1993

TAHUN	BATAM		RIAU		BATAM TERHADAP RIAU (%)
	Nilai (Rp)	Perb. (%)	Nilai (Rp)	Perb. (%)	
1983	660.199	-	403.142	-	163,8
1984	648.557	(1,76)	409.367	1,54	158,4
1985	667.559	2,93	417.702	2,04	159,8
1986	667.456	(0,02)	427.371	2,31	156,2
1987	662.061	(0,81)	447.816	4,78	147,8
1988	662.515	0,07	458.677	2,43	144,4
1989	625.506	(5,59)	486.849	6,14	128,5
1990	593.324	(5,14)	499.577	2,61	118,8
1991	688.307	16,01	527.686	5,63	130,4
1992	727.442	5,59	572.334	8,46	127,1
1993	791.630	8,82	592.062	3,45	133,7
r 83-93	x	1,83	x	3,92	x

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan negatif.

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Batam dan BPS, PDRB Kodya Batam dan PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia 1983-1993.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa selama periode 1983-1993, rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita Batam hanya 1,83 persen per tahun, suatu laju pertumbuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Propinsi Riau yang sebesar 3,92 persen per tahun. Akibatnya, indeks relatif pendapatan per kapita Batam terhadap pendapatan per kapita Riau menjadi turun dan mencapai angka terendah pada tahun 1990 (118,8 persen). Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita Batam berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

5.3 SUMBERDAYA MANUSIA

Perkembangan penduduk berlangsung secara cepat seiring dengan perkembangan ekonomi industri di Batam. Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk kecamatan sampai akhir Desember 1993, jumlah penduduk Batam mencapai 146.705 jiwa, yang terdiri dari 81.437 laki-laki dan 65.368 perempuan. Ini berarti,

jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan di mana rasio kelamin (sex ratio) di Pulau Batam sebesar 125 atau setiap laki-laki terdapat 0,8 perempuan.

Perkembangan penduduk Batam yang cepat di atas sebagai akibat dari arus in-migrasi (migrasi masuk) yang tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan pertumbuhan pembangunan, yang merupakan faktor penarik (full factor) bagi migran yang ingin mengembangkan usaha di berbagai sektor ekonomi. Di sisi lain, yang merupakan faktor pendorong (push factor), karena situasi ketenagakerjaan nasional sendiri, yaitu surplus tenaga kerja terutama di sektor pertanian (pedesaan) dan terbatasnya kesempatan kerja di daerah perkotaan. Kenyataan ini berkaitan erat dengan sex ratio yang tinggi di Pulau Batam, karena salah satu indikator untuk menentukan tinggi-rendahnya laju pertumbuhan penduduk suatu daerah adalah arus migrasi masuk.

Dilihat dari penyebaran penduduknya, Pulau Batam tidak berbeda dengan daerah lain. Di antara tiga kecamatan, Kecamatan Batam Timur merupakan pusat konsentrasi dari jumlah penduduk. Kecamatan ini dihuni oleh sekitar 63,5 persen dari total penduduk, sedangkan Kecamatan Batam Barat hanya didiami oleh 24,8 persen dan sisanya berdomisili di Kecamatan Belakang Padang. Situasi di atas sesuai dengan fungsi daerah masing-masing, di mana Kecamatan Batam Barat merupakan daerah pusat pelayanan, perdagangan dan jasa hiburan, sedangkan Kecamatan Batam Timur lebih diarahkan pada pusat lokasi industri. Kecamatan Belakang Padang yang tidak termasuk dalam daerah otorita Pengembangan Industri Pulau Batam, jumlah penduduknya masih jarang dan tertinggal pembangunannya.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama periode Januari-Desember 1993 sebesar 1,47 persen, sedangkan untuk periode 1983-1992 sebesar 12,4 persen per tahun. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk Batam untuk tahun 1993 jauh melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk sebelumnya. Pertumbuhan penduduk Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Pulau Batam
Menurut Jenis Kelamin, 1983-1993

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Perubahan %	Ratio L : P
1983	23.146	19.806	42.952	-	1,17
1984	29.348	26.233	55.581	29,4	1,12
1985	31.135	27.304	58.439	5,1	1,14
1986	32.713	28.518	61.231	4,8	1,15
1987	35.322	31.089	66.411	8,5	1,14
1988	43.137	36.240	79.377	19,5	1,19
1989	49.983	40.541	90.524	14,0	1,23
1990 *)	59.030	46.790	105.820	16,9	1,26
1991	61.111	48.304	109.415	3,4	1,27
1992	70.437	52.600	123.037	12,4	1,34
1993	81.437	65.268	146.705	19,2	1,25
r 83 - 93	13,4	12,7	13,1	X	X

Catatan : *) Hasil Sensus Penduduk 1990.

Sumber : Kantor Statistik Kodya Batam, Penduduk Kodya Batam Akhir Tahun 1993.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa mulai tahun 1983, tahap awal dimulainya pembangunan Pulau Batam, laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional yang mencapai kurang dari 2 persen. Pada tahun 1991, laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka yang paling rendah (3,4 persen), yang dimungkinkan oleh kebijaksanaan uang ketat (tigh money policy) yang dilaksanakan pemerintah saat itu sehingga berdampak pada penurunan penanaman modal, baik PMDN, PMA maupun Penanaman Modal Non-Falistas PMDN/PMA. Jadi, laju pertumbuhan penduduk Batam mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan investasi.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan angkatan kerjanya memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang positif. Artinya, pertumbuhan penduduk pada suatu periode akan merupakan tambahan angkatan kerja pada periode selanjutnya. Di Batam, pertumbuhan penduduk terjadi karena laju migrasi yang cukup tinggi dan umumnya migran yang masuk telah mencapai usia kerja sehingga laju pertumbuhan angkatan kerja juga tinggi. Pertambahan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan

dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pembangunan.

Sayangnya, data yang lengkap mengenai perkembangan angkatan kerja dan kesempatan kerja tidak tersedia. Namun, berdasarkan data-Susenas Batam 1992, seperti pada Tabel 5.3.2, terlihat adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerjanya. Dengan kata lain, terjadi pengangguran pada tahun tersebut. Tingkat pengangguran di Batam cukup tinggi, yaitu sebesar 8,34 persen, suatu angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran (terbuka) nasional yang 3,24 persen (1990). Tingkat pengangguran yang lebih tinggi terjadi pada tingkat pendidikan yang tinggi pula, terutama lulusan SLTP Umum dan SLTA Umum.

Tabel 5.3.2
Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Batam, 1992

Tingkat Pendidikan	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Pengangguran (%)
Tidak/belum pernah sekolah	3.420	224	3.644	6,15
Tidak/Belum Tamat SD	4.990	224	5.214	4,30
Sekolah Dasar	10.484	953	11.437	8,33
SMTp Umum	4.037	1.009	5.046	20,00
SMTp Kejuruan	561	-	561	0,00
SMTA Umum	8.914	1.177	10.091	11,66
SMTA Kejuruan	6.503	56	6.559	0,85
Diploma I/II	168	-	168	0,00
Akademi/Diploma III	897	-	897	0,00
Universitas/Diploma IV	673	56	729	7,68
Jumlah	40.647	3.699	44.346	8,34

Sumber: Susenas Batam 1992.

Lebih lanjut, Tabel 5.3.2 memberi informasi tentang kenyataan empiris bahwa pengangguran lebih erat kaitannya dengan tenaga terdidik. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan langsung dengan penciptaan kesempatan kerja baru yang menyerap tenaga terdidik dan terlatih sebagai akibat adanya transformasi produksi yang disebabkan oleh perubahan struktur permintaan.

Tingginya tingkat pengangguran tenaga terdidik di P. Batam, khususnya lulusan sekolah umum, biasanya ditafsirkan sebagai akibat dari program pendidikan di Indonesia yang cenderung mengarah ke perluasan program pendidikan umum (*devocationalized*). Sementara output dari sistem pendidikan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dan kenyataan ini berlangsung terus. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah ketidakcocokan antara harapan kerja yang dimiliki tenaga berpendidikan dengan kesempatan kerja yang terbuka (*mis-match*).

Menurut Suryadi (1993), pengangguran bukan semata-mata merupakan gejala persediaan (*supply phenomenon*), tetapi lebih tepat dikatakan sebagai gejala permintaan (*demand phenomenon*). Lebih lanjut, dikatakan bahwa pengangguran terjadi karena laju investasi pada lapangan kerja produktif, efisien, dan renumeratif relatif lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan tenaga kerja terdidik yang sangat progresif.

Selanjutnya, persepsi tentang segala sesuatu yang dilihat atau dihadapi oleh masing-masing orang bisa berbeda. Demikian pula dengan produktivitas. Namun, kesepakatan umum menunjukkan bahwa produktivitas itu mengandung arti ukuran dari hasil produksi atau hasil kegiatan (Aroef, 1985). Berbagai macam ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat produktivitas, antara lain produktivitas per satuan waktu, produktivitas per satuan input total, dan produktivitas persatuan input partial. Dalam analisis di sini, ukuran yang digunakan adalah produktivitas mikro partial, yaitu tingkat produktivitas perusahaan dengan input tenaga kerja. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.3
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja dan Produktivitas
di Pulau Batam, 1983-1993

TAHUN	Tenaga Kerja Total (orang)	Tenaga Kerja Industri (orang)	TK Industri terhadap TK Total %	Produktivitas TK Total (Rp.000)	Produktivitas TK Industri (Rp. 000)
1983	6.114	2.599	41,51	5.475	4.215
1984	6.529	2.967	45,44	5.521	4.049
1985	7.013	3.412	48,65	5.426	3.759
1986	8.935	3.923	43,91	4.470	3.351
1987	9.631	4.511	46,83	4.387	2.497
1988	11.181	5.187	46,40	4.319	3.108
1989	16.336	8.335	51,02	3.253	2.210
1990	23.237	14.267	61,40	2.546	1.433
1991	32.071	22.426	69,93	2.422	1.383
1992	43.446	27.054	61,54	2.126	1.431
1994	70.446	45.684	64,85	n.a.	n.a
r 83-92	24,34	29,73	x	-9,98	-11,31
r PDRB 83-92	11,94	15,06	x	x	x
Elasti sitas T.K.	2,04	1,97			

Sumber : Batam Dalam Angka dan Kantor Depnaker Batam Berbagai tahun (diolah).

Tabel 5.3.3 di atas menunjukkan beberapa informasi penting. Pertama, rata-rata tingkat pertumbuhan tenaga kerja total di Batam mencapai 24,34 persen per tahun selama periode 1983-1992 atau meningkat dari 6.114 tenaga kerja pada tahun 1983 menjadi 43.446 tenaga kerja pada tahun 1992. Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) hanya 11,94 persen, sehingga elastisitas kesempatan kerja sebesar 2,04 persen. Dengan kata lain, setiap kenaikan 1 persen PDRB akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,04 persen. Implikasi dari

hal di atas adalah penurunan tingkat produktivitas total sebesar 9,98 persen per tahun. Kedua, sama halnya dengan yang pertama, di mana selama periode 1983-1992 pertumbuhan tenaga kerja sektor industri hampir mencapai 30 persen per tahun, yang sekaligus terlihat pula peningkatan porsi tenaga kerja industri terhadap total yakni dari 41,51 persen pada tahun 1983 menjadi 61,54 persen pada tahun 1992. Akibat tingginya pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri yang melebihi tingkat pertumbuhan PDRB pada sektor yang sama, maka terjadi penurunan tingkat produktivitas dari 4,2 juta rupiah menjadi 1,4 juta rupiah atau turun 11,31 persen per tahun selama 1983-1992.

Dari keterangan di atas, terdapat indikasi bahwa perekonomian Batam pada umumnya dan sektor industri khususnya berkembang seiring dengan turunnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga dan perluasan kesempatan kerja sebenarnya bukan merupakan hal yang paradoks (saling mengalahkan), asal saja faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan produktivitas dapat berjalan secara simultan. Misalnya, penggunaan teknologi yang lebih tinggi yang diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, latihan keterampilan, kesehatan, dan sistem insentif yang memadai dan sekaligus melakukan perbaikan sistem manajemen yang handal. Dengan demikian, hal ini akan sejalan dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan, yaitu "meningkatkan produktivitas nasional", memperluas kesempatan kerja dan mengangkat citra Bangsa Indonesia dari pandangan luar.

5.4 SEKTOR POTENSIAL (INDUSTRI PENGOLAHAN)

Dalam Pelita V, pembangunan di Indonesia lebih ditekankan pada pembangunan sektor industri. Dengan dikembangkannya sektor industri secara keseluruhan maka diharapkan akan merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan dan menunjang sektor industri sendiri. Dalam kaitan dengan Pulau Batam, salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk menunjang perkembangan sektor industri adalah membangun dan mengembangkan daerah-daerah industri, termasuk pengembangan daerah industri Batam. Dalam kaitan disini, sektor industri di Pulau Batam diharapkan dapat menjadi sektor utama sehingga sektor tersebut bisa dikatakan sebagai potensi utama Kodya Batam.

Indikator utama tingkat perkembangan industri adalah peranan keluaran (output) industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan ukuran tersebut, perkembangan industri Batam termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, dengan sumbangan sektor industri terhadap PDRB-nya lebih dari 30

persen selama satu dasawarsa. Berdasarkan ini pula, Batam dapat dikatakan sebagai daerah "industri", sesuai dengan standar industri relatif UNIDO-PBB (Thee, 1994).

Selama periode 1983-1993, nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB Batam meningkat dari 33 persen pada tahun 1983 menjadi 44 persen pada tahun 1993. Peningkatan sangat nyata terjadi sesudah tahun 1989, sementara pada kurun waktu 1983-89 peningkatannya relatif lambat.

Demikian pula peranan sektor industri Batam terhadap Propinsi Riau meningkat dari 17 persen menjadi 29 persen pada periode yang sama. Sementara porsi sektor industri Batam terhadap pertumbuhan PDRB Riau meningkat dari 1 persen pada tahun 1983 menjadi lebih dari 2 persen pada tahun 1993.

Tabel 5.4.1
Peranan Sektor Industri Batam terhadap Batam dan Riau,
Atas Dasar Harga Konstan 1983, 1983-1993 (%)

Keterangan	1983	1986	1989	1992	1993
Terhadap PDRB Batam	32,73	32,92	34,67	42,56	44,26
Terhadap PDRB Riau	1,12	1,12	1,12	1,94	2,24
Terhadap Industri Propinsi Riau	17,21	17,54	16,8	22,90	28,65

Sumber : Kantor Statistik Kodya Batam, BPS. PDRB Batam dan PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia, 1983-1993.

Terjadinya peningkatan sumbangan sektor industri terhadap PDRB Batam, terutama sesudah tahun 1989, selain disebabkan oleh peningkatan produksi pada industri yang telah ada, tetapi juga oleh munculnya perusahaan-perusahaan baru khususnya industri besar/sedang yang beroperasi pada 1991-1993. Perkembangan jumlah perusahaan sejak 1991-1993 masing-masing adalah: 72 perusahaan (1991), 109 perusahaan (1992) dan 138 perusahaan (1993). Sementara pada tahun 1989 dan 1990 masing-masing: 31 dan 44 perusahaan.

Industri-industri yang umumnya dikembangkan di Batam adalah industri yang melayani pasar luar (daerah dan luar negeri). Dengan menggunakan tehnik *location quotient*, yaitu pengukuran konsentrasi suatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan/industri yang sama dalam perekonomian propinsi atau nasional, akan terlihat arah pemasaran hasil industri Batam. Walaupun tehnik

ini masih mengandung kelemahan, namun untuk mengidentifikasi industri Batam sebagai industri yang berorientasi ekspor sudah cukup memadai.

Pengertian yang terkandung pada angka-angka location quotient adalah: jika $LQ > 1$, daerah yang bersangkutan dapat mengekspor hasil industrinya; $LQ = 1$, berarti daerah tersebut berswasembada; dan jika $LQ < 1$, daerah tersebut mengimpor dari daerah lain (Tabel 5.4.2).

Tabel 5.4.2
Peranan Industri dan Nilai Location Quotient
di Batam Atas Dasar Harga Konstan 1983, 1983-1993

Keterangan	1983	1986	1989	1992	1993
Industri Batam terhadap PDRB Batam	32,73	32,92	34,67	42,56	44,26
Industri Riau terhadap PDRB Riau	6,52	6,37	7,20	8,49	7,81
Location Quotient (1 : 2)	5,02	5,17	4,82	5,01	5,67

Sumber : Kantor Statistik Kodya Batam, BPS. PDRB Batam dan PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia, 1983-1993.

Dari tabel di atas terlihat bahwa indeks LQ selama 1983-1993 cukup besar yaitu mendekati 5. Rata-rata nilai LQ industri Batam pada periode tersebut di atas 4,82, yang berarti, secara minimal 79,3 persen dari hasil industri Batam di ekspor ke luar Batam.

Selanjutnya, berdasarkan penggolongan industri besar dan sedang, ISIC 2 digit, jenis industri besar dan sedang yang belum ada hingga tahun 1992 di Batam adalah industri kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya (ISIC 33); industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan (ISIC 34); dan industri lainnya (ISIC 39). Tabel 5.4.3 memperlihatkan industri besar/sedang di Batam.

Tabel 5.4.3
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri
Besar dan Sedang di Batam, 1991-92

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan				Jumlah tenaga Kerja			
	1991	%	1992	%	1991	%	1992	%
31. Industri makanan, minuman dan tembakau	3	4,2	5	4,6	255	1,8	323	1,4
32. Industri Tekstil, pakaian jadi dan kulit	10	13,9	14	12,8	952	6,7	1.384	6,2
35. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan barang-barang dari plastik	4	5,6	8	7,3	468	3,3	580	2,6
36. Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara	8	11,1	9	8,3	672	4,4	455	2,0
37. Industri logam dasar	2	2,8	2	1,8	91	0,6	45	0,2
38. Industri barang-barang logam, mesin dan perlengkapannya	45	62,5	71	65,1	11.825	82,9	19.639	87,6
Jumlah	72	100,0	109	100,0	14.267	100,0	22.426	100,0

Sumber: OPDIB dan Kantor Statistik Propinsi Riau

Tabel di atas memperlihatkan bahwa industri besar dan sedang terkonsentrasi pada jenis industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya (ISIC 38). Pada tahun 1991, jumlah perusahaan yang bergerak pada jenis industri tersebut sebanyak 63 persen dari total perusahaan dan meningkat menjadi 65 persen pada tahun 1992. Pada urutan kedua ditempati oleh industri pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dengan jumlah perusahaan sebanyak 14 buah pada tahun 1991 dan 13 perusahaan pada tahun 1992.

Konsentrasi tenaga kerja yang terserap berdasarkan klasifikasi industri di atas, mengikuti pola konsentrasi jumlah perusahaan. Jenis industri barang dari logam (ISIC 38) menyerap 83 persen dari total tenaga kerja pada tahun 1991, dan menjadi 88 persen pada tahun 1992. Daya serap jenis industri pakaian jadi (ISIC 32) hanya mencapai 7 dan 6 persen pada periode yang sama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa jenis industri yang dominan berkembang di Batam adalah golongan industri berat dengan ISIC 38. Industri tersebut mempunyai skala ekonomi yang besar dan mengarah pada penggunaan modal yang besar pula (padat modal). Sedangkan jenis industri pakaian (ISIC 32) termasuk golongan industri padat karya (unskilled labour). Industri padat teknologi atau industri logam (ISIC 37) tampaknya belum berkembang, karena hingga tahun 1992 baru ada 2 perusahaan.

Dengan menggunakan tehnik location quotient pada jenis industri dengan ISIC 2 digit di atas, maka industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) merupakan industri yang orientasi ekspornya paling tinggi dengan indeks $LQ=15,50$. Pada urutan kedua adalah industri ISIC 36, dengan indeks $LQ=10,17$, sedangkan jenis industri yang orientasi ekspornya sangat rendah adalah industri ISIC 35, dengan nilai $LQ=1,12$.

Tabel 5.4.4
Peranan dan Nilai LQ Sektor Industri Menurut
Golongan Industri, 1992

Klasifikasi Industri	Peranan Industri Besar/Sedang Batam Terhadap PDRB Batam (%)	Peranan Industri Besar/Sedang Riau Terhadap PDRB Riau (%)	LQ	% Hasil Yang Diekspor
31. Industri makanan, minuman dan tembakau	0,31	0,07	4,43	77,43
32. Industri Tekstil, pakaian jadi dan kulit	0,62	0,04	15,50	93,55
35. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan barang- barang dari plastik	0,77	0,69	1,12	10,71
36. Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara	0,61	0,06	10,17	90,17
37. Industri logam dasar	0,18	0,02	9,00	88,89
38. Industri barang-barang logam, mesin dan perlengkapannya	40,94	6,05	6,77	85,23

Sumber : OPDIB dan Kantor Statistik Propinsi Riau.

5.5 PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perekonomian Indonesia umumnya dan Batam khususnya mempunyai sifat "ekonomi terbuka". Oleh karena itu, kegiatan ekspor dipandang sebagai faktor pokok atau faktor strategis, baik dari segi pendapatan nasional, lapangan kerja maupun dari penerimaan devisa. Studi mengenai dampak perkembangan ekspor, terutama ekspor manufaktur mempunyai peranan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) [lihat misalnya Balassa 1978, Krueger 1981, dan Krugman 1994].

Negara-negara ASEAN cukup dominan sebagai mitra dagang (dalam hal ekspor) Riau. Bagian ekspor Riau ke negara ASEAN, terutama Singapura dan Malaysia, terus mengalami peningkatan sehingga pada periode 1992-1994 telah mencapai 44 persen dari total ekspor non-migas dibandingkan 33 persen pada periode 1989-1991. Sebaliknya, negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, merupakan mitra dagang yang sangat penting bagi Riau dalam hal impor. Pada tahun 1989-1991 impor dari dua negara tersebut mencapai hampir 50 persen dari total impor, tetapi menurun menjadi 35 persen pada periode 1992-1994, karena peranan negara-negara lain sebagai sumber impor Riau semakin meningkat. Sedangkan impor dari Singapura dan Malaysia cukup rendah dan hampir tidak mengalami perubahan.

Tabel 5.5.1

Pola dan Perkembangan Ekspor, Impor Non- Migas Riau
Menurut Negara, 1989-1994 (%)

Kawasan/Negara	1989- 1991	1992- 1994	Pertum- buhan (%)		% Riau terhadap Indonesia	
			1989- 1991	1992- 1994	1989	1994
Total Ekspor (US\$ juta)	2.073	6.004	53,5	40,1	3,2	8,9
ASEAN	38,5	49,5	52,9	36,1	7,6	26,0
Singapura	29,3	38,6	33,6	43,9	9,4	30,7
Malaysia	3,8	5,1	166,6	49,7	3,4	20,0
Lainnya *)	5,4	5,8	209,4	-22,0	1,9	9,5
JEPANG	14,3	8,3	7,3	19,2	2,7	3,3
U.S.A.	3,9	8,7	212,7	66,2	0,3	4,8
Lainnya **)	43,3	33,6	67,9	46,0	2,8	6,6
Total Impor (US\$ juta)	2.631	3.348	-7,1	11,4	6,6	6,1
Singapura	8,1	9,0	8,3	12,3	8,8	6,7
Malaysia	1,0	0,9	-20,6	-9,2	4,2	2,0
Jepang	16,1	14,2	15,4	-0,8	3,2	2,3
U.S.A.	43,6	30,6	-4,5	-21,8	20,3	7,9
Lainnya ***)	31,3	45,4	-22,4	55,9	4,5	4,1

Sumber : BPS 1995 (diolah)

Catatan : *) Brunei Darussalam, Filipina, Thailand.

**) Negara maju lainnya

***) Negara lainnya

Tabel di atas memperlihatkan pula bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekspor Riau secara total lebih rendah pada periode 1992-1994 dibandingkan dengan periode 1989-1991, yaitu masing-masing 40 persen dan 54 persen. Namun, rata-rata pertumbuhan ekspor ke Singapura 1992-1994 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 1989-1991 dan pertumbuhannya juga melebihi pertumbuhan ekspor total pada periode yang sama. Akibatnya, bagian ekspor non-migas Riau terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Singapura meningkat dari 9 persen pada tahun 1989 menjadi 31 persen pada tahun 1994. Demikian pula bagian ekspor Riau terhadap ekspor Indonesia ke Malaysia meningkat dari 3 persen menjadi 20 persen pada periode yang sama.

Berbeda dengan ekspor, data pada tabel yang sama menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan impor lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor ke semua negara. bahkan pada periode 1989-1991 pertumbuhannya menjadi negatif 7 persen per tahun. Pertumbuhan impor negatif terjadi pada hampir semua negara asal impor, namun impor dari Singapura masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini sangat dimungkinkan karena pertumbuhan investasi langsung dari Singapura, terutama di Batam, mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat indikasi bahwa kerjasama segitiga pertumbuhan SIJORI cukup memberi manfaat bagi Riau, yaitu adanya peningkatan perdagangan ekspor non-migas Riau atas mitra dagangnya yang lain seperti Singapura dan Malaysia.

Perubahan pada ratio net ekspor (ekspor minus impor) terhadap total perdagangan (ekspor plus impor) dapat memberi petunjuk secara kasar tentang pola perubahan keunggulan komparatif suatu negara/daerah. Tabel 5.5.2. memperlihatkan bahwa adanya peningkatan keunggulan komparatif dalam ekspor non-migas Riau terhadap negara mitra dagangnya. Ratio net ekspor dengan Singapura meningkat dari 0,41 pada tahun 1989 menjadi 0,87 pada tahun 1994. Kenyataan ini hampir mirip dengan Malaysia, di mana ratio net ekspor dari Riau hampir tidak ada peningkatan menjadi net ekspor yang cukup tinggi. Sementara impor Riau dari Amerika Serikat dan Jepang cukup tinggi, sehingga ratio net ekspor dengan negara tersebut tetap berada pada tingkat yang rendah. Namun, masih terlihat bahwa ratio net ekspornya terus mengalami perbaikan.

Tabel 5.5.2
Ratio Net Ekspor Non-Migas Riau Menurut Negara, 1989 - 1994

Tahun	Singapura	Malaysia	Jepang	USA	Lainnya	Total
1989	0,41	-0,20	-0,11	-0,97	-0,38	-0,40
1990	0,39	0,39	-0,25	-0,91	0,15	-0,12
1991	0,57	0,76	-0,18	-0,74	0,39	0,08
1992	0,80	0,72	-0,16	-0,66	0,34	0,17
1993	0,62	0,81	-0,19	-0,25	0,15	0,25
1994	0,87	0,82	-0,03	-0,04	0,21	0,38

Sumber : BPS, 1995 (diolah).

Catatan : Ratio Net Ekspor diperoleh dengan rumus, $\frac{X - M}{X + M}$, dimana X = ekspor dan M = Impor.

Kisaran rasio dari -1 (tidak ada ekspor) + 1 (tidak ada impor).

Menurut komposisi ekspornya, ekspor minyak mentah Batam pada tahun 1986 merupakan sumber utama penerimaan devisa, yang mencapai lebih dari 90 persen dari total ekspornya. Keadaan ini hanya berlangsung hingga tahun 1989, karena sesudah itu, peranan ekspor minyak terus menurun sehingga pada tahun 1993 persentasenya hanya sebesar 34 persen. Sementara ekspor hasil industri manufaktur meningkat dengan tajam.

Berkurangnya peranan minyak terhadap total ekspor Batam selain disebabkan oleh penurunan harga minyak yang cukup tajam, diakibatkan pula oleh menurunnya volume ekspornya, yang sebagian besar dipasarkan ke Jepang. Sebaliknya, kegiatan industri mulai meningkat dan arus penanaman modal, baik PMDN maupun PMA semakin bertambah sehingga ekspor hasil industri meningkat dengan berarti, yaitu dari 7 persen pada tahun 1989 menjadi 64 persen pada tahun 1993. Pada tahun 1993, untuk pertama kalinya dalam sejarah perdagangan Batam, nilai ekspor non-migas melebihi nilai ekspor minyak.

Tabel 5.5.3
Komposisi Ekspor Batam, 1986-1993 (%)

Tahun	Pertanian	Minyak	Pertambangan	Industri
1986	0,22	93,49	1,13	5,16
1987	0,35	95,04	0,50	4,11
1988	0,55	90,47	0,31	8,67
1989	1,59	91,07	0,01	7,33
1990	1,32	80,06	0,04	18,58
1991	1,29	69,32	0,06	29,33
1992	1,22	50,58	1,22	46,98
1993 *)	1,30	34,04	1,12	63,54

Sumber : Badan Otorita Batam, berbagai terbitan.

Catatan : *) Januari-September 1993

Lebih lanjut, Tabel 5.5.3 memperlihatkan bahwa ekspor dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) tampaknya tidak berkembang. Hal ini disebabkan oleh kebijaksanaan pengembangan Batam yang memang tidak memprioritaskan pengembangan sektor primer tetapi pada sektor sekunder dan tertier. Walaupun terlihat ada sumbangan sektor pertanian terhadap ekspor, namun relatif kecil yakni di bawah 2 persen. Ekspor yang cukup menonjol dari sektor pertanian adalah ternak babi yang dikirim ke Singapura.

Jenis komoditas ekspor utama Batam sejak 1986-1993 mengalami pergeseran cukup berarti. Pada tahun 1986, komoditas utama Batam terdiri dari: alat-alat pengeboran minyak, jacket compile, pasir dan bahan galian non-pasir. Namun pada tahun 1993, 4 jenis komoditas ekspor utama Batam adalah: komponen elektronik, perhiasan, alat-alat pengeboran minyak, dan cordless phone. Bila dilihat dari jenisnya yang paling penting, maka terjadi pula pergeseran peranan dari alat-alat pengeboran minyak ke komponen elektronik, yang pada tahun 1993 peranannya telah mencapai 64 persen dari total nilai ekspor Batam.

Tabel 5.5.4
Struktur Ekspor Non-Migas Batam, 1988-1993

1986	1988	1990	1991	1992	1993
Alat Pengeboran Minyak Minyak (47,8)	Alat Pengeboran Minyak (53,1)	Alat Pengeboran (42,2)	Elektronik (33,6)	Elektronik (43,8)	Elektronik (64,3)
Jacket Complite (22,3)	Pipa (11,1)	Pipa (20,2)	Alat Pengeboran (22,3)	Perhiasan (21,3)	Perhiasan (13,8)
Pasir (17,4)	Garment (9,5)	Elektronik (11,2)	Cordless Phone (20,6)	Alat Pengeboran (21,1)	Alat Pengeboran (13,8)
Bahan galian (3,4)	Babi Hidup (4,3)	Babi Hidup (5,1)	Pipa (5,2)	Cordless Phone (5,3)	Cordless Phone (3,1)
Total 4 Komoditas (90,9)	(78,0)	(78,7)	(81,7)	(91,5)	(95,0)

Sumber : Badan Otorita Batam (diolah)

Catatan : Angka menunjukkan bagian masing-masing komoditas ekspor terhadap total nilai ekspor non-migas Batam (%)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 1986, dua di antara 4 komoditas ekspor utamanya berasal dari sumber daya alam, seperti pasir dan bahan galian. Namun pada tahun 1993, jenis komoditas tersebut tidak lagi menjadi komoditas utama ekspor Batam, tetapi digantikan oleh jenis komoditas yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, yaitu komponen elektronik, *cordless phone* dan perhiasan.

Dilihat dari intensitas penggunaan faktor produksi, keempat jenis komoditas ekspor utama Batam, yaitu komponen elektronik dapat digolongkan pada komoditas yang padat karya (*labor intensive*). Alat perhiasan juga tergolong padat karya, sedangkan alat-alat pengeboran minyak dapat digolongkan pada komoditas padat modal, dan komoditas *cordless phone* lebih mengarah pada komoditas yang lebih berteknologi tinggi.

Rata-rata pertumbuhan ekspor non-migas Batam selama periode 1986-1995 mencapai 66 persen per tahun. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekspor non-migas Propinsi Riau dan Indonesia yang masing-masing 39 persen dan 22 persen pada periode yang sama, berarti, rata-rata pertumbuhan ekspor Batam mencapai 1,7 kali dari rata-rata pertumbuhan ekspor Riau dan 3 kali dari rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia.

Tabel 5.5.5
Perbandingan Ekspor Non-migas Batam, Riau dan Indonesia, 1988-1993

Tahun	Batam		Riau		Indonesia		% Ekspor Batam to Riau	% Ekspor Batam to Indonesia
	Nilai (US \$.000)	r	Nilai (US \$.000)	r	Nilai	r		
1986	20.855	-	198.997	-	6.552.000	-	10,5	0,3
1987	26.817	28,6	278.997	40,2	8.472.000	29,3	9,6	0,3
1988	44.226	64,9	398.648	42,9	11.621.000	37,2	11,1	0,4
1989	52.967	19,8	429.496	7,7	13.480.000	16,0	12,3	0,4
1990	151.457	185,9	595.527	38,7	14.604.169	8,3	25,4	1,0
1991	242.020	59,8	1.011.877	69,9	18.247.510	24,9	23,9	1,3
1992	564.453	133,2	1.376.967	36,1	23.296.105	27,7	41,0	2,4
1993	941.431	66,8	1.923.615	39,7	27.077.559	16,2	47,3	3,5
1994	1.300.000	38,1	2.702.929	40,1	30.359.825	12,1	48,1	4,3
1995 *)	2.000.000	53,8	3.786.863	40,1	40.000.000	52,8	52,8	5,0
r (%)	x	66,0	x	39	x	22	x	x

Sumber : Badan Otorita Batam, BPS dan Kompas.

Catatan : *) Nilai ekspor Batam diperkirakan berdasarkan realisasi Januari-Oktober 1995 senilai US\$ 1,8 milyar
 Nilai ekspor Riau diperkirakan tumbuh sebesar tahun 1994.
 Nilai ekspor Indonesia berdasarkan Sasaran Repelita VI
 r = laju pertumbuhan ekspor (dalam %)

Laju pertumbuhan ekspor Batam melebihi laju pertumbuhan ekspor Riau dan Indonesia sehingga sumbangan ekspor Batam terhadap Riau dan Indonesia meningkat cukup berarti. Pada tahun 1986, sumbangan ekspor Batam terhadap ekspor Riau baru mencapai 11 persen dan terhadap ekspor Indonesia 0,3 persen. Kemudian pada tahun 1995, kontribusinya terhadap ekspor Riau dan Indonesia meningkat menjadi 53 persen dan 5 persen.

Suatu hal yang cukup menarik diperhatikan pada tabel 5.5.5 adalah bahwa penurunan laju pertumbuhan ekspor Indonesia selama 3 tahun terakhir, terjadi pula di Batam. Pada tahun 1992, laju pertumbuhan ekspor Batam mencapai 133 persen, tahun 1993 turun menjadi 67 persen, dan pada tahun 1994 turun lagi menjadi 38 persen, namun pada tahun 1995 meningkat menjadi 54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Batam tidak terlepas dari pertumbuhan ekspor Indonesia.

Pada kurun waktu 1986-1993 telah terjadi perubahan tujuan komoditas ekspor Batam ke mitranya di luar negeri. Secara tradisonal, dua pasar negara maju, Jepang dan Amerika Serikat, sebagai penyerap komoditas ekspor Batam hingga 94 persen pada tahun 1986, namun pada tahun 1990 turun menjadi 76 persen, dan pada tahun 1993 turun lagi menjadi kurang dari 40 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar ekspor ke Jepang adalah minyak bumi, sementara harga minyak mentah di pasar internasional mengalami penurunan, begitu pula dengan volume ekspornya yang terus berkurang.

Tabel 5.5.6
Ekspor Batam Menurut Negara Tujuan, 1986-1993 (%)

Negara	1986	1990	1993
Dunia (US\$ 000)	286.667	728.446	1.404.115
Jepang	73,47	71,79	17,11
Amerika Serikat	20,22	5,09	19,67
Lainnya *)	0	6,01	1,56
ASEAN	0,85	8,96	43,01
Singapura	0,82	8,89	36,90
Thailand	0	0,03	5,86
Lainnya **)	0,03	0,04	0,25
NIEs	4,32	7,81	2,41
Korea Selatan	2,51	7,75	1,86
Taiwan	1,81	0,02	0,36
Hongkong	0	0,04	0,19
Total Asia Pasific ***)	98,86	99,66	83,76
Uni Eropah	0	0,18	15,12
Lainnya	1,14	0,16	1,20

Sumber : Badan Otorita, Batam Dalam Angka berbagai terbitan.

Catatan : *) Kanada, Mexico, Australia, New Zealand dan China

**) Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina

***) Termasuk semua negara di atas.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa negara-negara non tradisional, terutama Singapura dan Uni Eropa, muncul sebagai tujuan utama komoditas ekspor Batam yang cukup penting. Pada tahun 1993, baik Singapura maupun Uni Eropa, mampu menyerap ekspor Batam lebih dari 52 persen, sementara pada tahun 1986 pangsaanya kurang dari 1 persen. Sementara negara ASEAN lainnya belum begitu berperan dalam menyerap komoditas ekspor Batam.

Berdasarkan kenyataan di atas, kerjasama ekonomi Batam-Johor-Singapura (BAJOSI), tampaknya Batam mampu memanfaatkan kerjasama tersebut terbukti dengan peningkatan ekspor yang begitu cepat ke Singapura. Di sisi lain, kerjasama Batam dengan Johor khususnya dan Malaysia umumnya, belum memperlihatkan manfaat yang berarti, dilihat dari sudut perdagangan antar kedua daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas ekspor Batam dan komoditas ekspor Johor lebih bersifat substitusi dari pada bersifat komplementaritas (saling mengisi). Namun demikian, perlu dicatat bahwa sebagian besar ekspor Batam ke Singapura bukan untuk konsumsi negara tersebut, melainkan untuk tujuan re-ekspor (Pangestu 1992, Arief 1992). Hal ini juga terbukti dari nilai perdagangan Singapura yang jauh lebih besar dibandingkan dengan GDP-nya, yakni hampir mencapai 3 kali lipat (Mangkusuwondo, 1995).

Tingginya intensitas perdagangan ekspor suatu negara/daerah dalam beberapa kasus dapat terjadi disebabkan oleh, *pertama*, 'match' (kesesuaian) antara komposisi komoditas ekspor dengan komposisi komoditas impor suatu negara/daerah. *Kedua*, adanya 'special country bias', yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kedekatan relatif, karena hubungan historis, dan mudahnya hubungan dagang dan komunikasi (Drydale dan Garnaut, 1982). Jadi, tingginya intensitas perdagangan ekspor Batam dan Singapura mungkin lebih disebabkan oleh adanya faktor *special country bias* tersebut. Namun, tidak pula mengabaikan adanya pengaruh dari sumberdaya dan faktor 'endowment' yang saling melengkapi, karena faktor 'match' biasanya dapat tereliminasi oleh pengaruh proteksi dan hambatan resmi lainnya terhadap perdagangan (Anderson, 1983).

Selanjutnya, penelitian Lembaga Teknik Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 1992, industri yang potensial untuk dikembangkan di Pulau Batam, dapat dilihat dari nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) Batam terhadap Indonesia. Tabel berikut menunjukkan beberapa komoditas manufaktur yang berpotensi untuk dikembangkan di Batam.

Tabel 5.5.7
RCA Komoditas Ekspor SITC 3 Digit Batam
Terhadap Indonesia, 1978-1988

SITC	Komoditas	RCA >1	RCA <1
562	Fertilizers Manufacture	X	
592	Starch, Inulin, Gluten etc.	X	
655	Knitted, etc. Fabrics	X	
663	Mineral Manufactures n.e.s.	X	
678	Iron, Steel Tubes, Pipes, etc.		X
728	Oth. Machinery for Spcl. Indust.	X	
741	Heating, Cooling eq.		X
744	Mechanical Handling equipment	X	
749	Non elec.Machinery parts acc n.e.s		X
761	Television Receivers	X	
763	Sound Records, Photographs		X
764	Telecom eq. pts, acc. n.e.s.	X	
793	Ship and Boats etc.	X	
846	Under Garments Knitted	X	

Sumber : Lemtek FTUI, 1992

Pada Tabel 5.5.7 dapat dilihat bahwa dari 14 kelompok industri yang ada di Pulau Batam terdapat 10 kelompok industri yang potensial. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ekspor Batam dalam sepuluh jenis industri tersebut, memperlihatkan prestasi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan prestasi daerah lain. Ini berarti, ke 10 kelompok industri dengan besaran indeks RCA > 1 tersebut, relatif lebih baik jika berlokasi di Pulau Batam dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya.

Kelompok industri pupuk (SITC 562) dan kelompok industri kimia yang tergolong ke dalam SITC 592, walaupun teridentifikasi potensial namun tidak direkomendasikan untuk dikembangkan di Batam. Hal ini disebabkan karena jenis industri tersebut tidak termasuk industri-industri yang dianjurkan karena masuk dalam kategori *negative list* (industri yang tidak boleh berlokasi di Batam), sesuai dengan Keputusan Ketua OPDIP Batam No. 045/AP-Kpts/IV/1990, tentang peraturan jenis industri yang tidak dipromosikan di Batam.

Dengan memandang Batam sebagai daerah yang paling berintegrasi dalam substitusi lokasi industri, maka pengembangan Batam sebagai kawasan industri tidak dapat dipisahkan dari suatu kawasan industri yang lebih besar yang dikenal dengan Segitiga Pertumbuhan SIJORI, yang juga merupakan bagian dari kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan kawasan Asia Pasifik (APEC).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka identifikasi industri yang potensial harus dilengkapi dengan upaya untuk mengidentifikasi industri prospektif dengan menganalisis peluang negara-negara yang berdekatan dengan Batam (Singapura dan Johor). Ini dilakukan mengingat komoditas yang berprospek baik mungkin belum dikembangkan di Batam. Untuk itu, penelitian berkesimpulan sementara, bahwa jenis industri yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan di Batam adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.8
Komoditas Ekspor Yang Potensial dan Prospektif
Untuk Dikembangkan di Pulau Batam

SITC	Komoditas
514	Nitrogen, fcn. compounds
551	Essential oils, perfume, etc.
562	Fertilizers, manufacture
592	Starch, inulin, gluten, etc.
611	Leather
635	Wood Manufactures n.e.s.
652	Cotton fabrics, woven
655	Knitted, etc. fabrics
656	Lace, cement, building prods.
658	Textile Articles n.e.s.
661	Lime, cement, building prods.
663	Mineral manufactures n.e.s.
665	Glassware
673	Iron, steel shapes etc
674	Iron, steel univ. plate, sheet
694	Steel, cooper nails, nuts, etc.
727	Food machry non-domestic
728	Oth. mach. for spcl. indust.
741	Heating, cooling equipment
744	Mechanical handling equipment
752	Automatic data proc. equipment
759	Office, adp. mch. pts. acces.
761	Television receives
783	Sound records, phonograph
764	Telecom eq. pts. acc. n.e.s.
785	Cycles, etc. motorized or not
793	Ship and boats etc.
821	Furniture, parts thereof
842	Mens outwear not knit
843	Women outwear not knit
845	Outwear knit non elastic
846	Under garments knitted
847	Textile clothing acces. n.e.s.
851	Footwear
892	Printed matter
893	Articles of plastic n.e.s.
895	Office supplier n.e.s.

Catatan : *) Tidak direkomendasikan

Sumber : Lemtek FTUI, 1992

Tabel di atas memberi pengertian, bahwa jika Batam hendak menangkap prospek dan peluang bagi pasar ekspor komoditas andalannya, maka terdapat 7 kelompok industri yang merupakan industri perspektif dan potensial, seperti pilihan berikut:

1. Industri hulu untuk tekstil seperti serat sintesis dan mesin-mesin tekstil.
2. Industri yang menghasilkan produk termasuk tekstil rajut yang tidak dicelup.
3. Industri yang berorientasi ke bahan baku tambang.
4. Industri penghasil mesin terutama mesin khusus untuk industri.
5. Industri peralatan untuk handling machine
6. Industri peralatan telekomunikasi dan sebagainya
7. Industri yang menghasilkan produk yang berhubungan dengan angkutan darat.

Dikaitkan dengan 4 jenis komoditas ekspor utama pada Tabel 5.5.4, tampaknya sesuai dengan kesimpulan sementara di atas, di mana komoditas ekspor Batam saat ini didominasi oleh komponen elektronik, alat-alat pengeboran minyak (peralatan handling mesin), dan produk telekomunikasi. Namun, produk-produk lain yang masih mempunyai peluang pasar dan direkomendasikan di Batam perlu dipacu terus. Misalnya produk perhiasan, walaupun tidak teridentifikasi sebagai komoditas potensial dan perspektif pada penelitian di atas, namun produk tersebut tidak dapat diabaikan mengingat kemunculan produk tersebut yang dimulai pada tahun 1992 langsung menjadi primadona ekspor Batam.

5.6 INVESTASI

Di dalam sistem perekonomian nasional/daerah yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, maka sektor swasta memainkan peranan yang sangat berarti. Peranan pemerintah bersifat mendorong dan menunjang dengan menciptakan iklim yang kondusif dalam berusaha. Dalam hal ini, pengembangan sektor swasta antara lain dimaksudkan untuk menciptakan keserasian antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.

Dengan demikian, peranan investasi swasta turut menentukan dalam memanfaatkan potensi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, selain investasi swasta sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah Batam, porsinya juga cenderung meningkat. Pada tahun 1990, sumbangan investasi swasta secara kumulatif sebesar 79 persen dari total investasi dan pada tahun 1995 meningkat menjadi 82 persen. Sebaliknya, peranan investasi pemerintah menurun dari 21 persen menjadi 18 persen pada periode yang sama. Melihat perkembangan ekonomi Pulau Batam yang begitu pesat, diharapkan peranan investasi pemerintah di masa datang akan semakin kecil sehingga pemerintah hanya berperan sebagai "agent of development" saja. Perkembangan investasi kumulatif menurut sumbernya dapat dilihat

dalam tabel berikut.

Tabel 5.6.1
Perkembangan Investasi Kumulatif Menurut Sumbernya di Batam,
1990-1995 (US\$ juta)

Sumber Investasi	Investasi Kumulatif				
	1990	1991	1992	1993	1995 *)
Pemerintah **)	573,0 (20,7)	628,0 (19,2)	656,5 (17,8)	706,0 (16,2)	970,0 (17,6)
Swasta ***)	2.199,0 (79,3)	2.652,0 (80,8)	3.032,0 (82,2)	3.648,0 (83,8)	4.530,0 (82,4)
Total	2.772,2 (100,0)	3.280,0 (100,0)	3.688,0 (100,0)	4.354,5 (100,0)	5.500,0 (100,0)

Sumber : Badan Otorita Batam, 1995.

Catatan : *) Januari-Nopember 1995

**) Realisasi Investasi

***) Rencana Investasi

Angka dalam kurung menunjukkan persen.

Menjelang akhir tahun 1995, total investasi kumulatif di Batam sekitar US\$ 5,5 milyar. Hampir 18 persen dari total investasi tersebut adalah investasi pemerintah yang digunakan untuk membangun prasarana dasar (infrastruktur). Sisanya adalah investasi swasta yang terdiri dari PMA (34 persen), PMDN (25 persen) dan penanam modal non-fasilitas (24 persen). Penanam modal non-fasilitas adalah penanam modal yang tidak perlu mengajukan permohonan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perusahaan pada penanaman modal non-fasilitas tersebut tidak mendapat perlakuan khusus seperti pembebasan bea masuk impor, dan percepatan penyusutan.

Tabel 5.6.2
Nilai dan Pertumbuhan Investasi di Batam

Tahun	Investasi Kumulatif					
	PMA	PMDN	Non-Fas	Jlh Swasta	Pemerintah	Total
1983	206,2					
1988	288,8	239,0				
1990	684,3	564,1	950,7	2.199,1	573,1	2.772,2
1991	997,4	600,4	1.054,2	2.652,0	628,8	3.280,8
1993	1.593,4	852,6	1.202,1	3.648,1	706,5	4.354,6
1995 *)	1.850,0	1.350,0	1.330,0	4.530,0	970,0	5.500,0
(% dari 1995)	(33,5)	(24,5)	(24,2)	(82,4)	(17,6)	(100,0)
Pertumbuhan per tahun (%)						
1983-88	7,0					
1988-90	53,9	53,6				
1990-91	45,6	6,4	10,9	20,6	9,7	18,3
1991-93	59,8	19,2	6,8	17,3	6,0	15,2

Sumber : Badan Otorita Batam, 1995

Catatan : *) = Januari-Nopember 1995

Nilai investasi dalam US\$ juta

Secara umum, Tabel 5.6.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PMA lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jenis investasi lainnya. Sejak awal periode penanaman modal di Batam pada 1983 hingga 1988, pertumbuhan PMA terlihat masih cukup rendah, yaitu 7 persen per tahun. Tetapi setelah periode tersebut, pertumbuhannya sangat mencolok yaitu sekitar 54 persen per tahun (1988-1990). Selanjutnya, pada tahun 1990-1991 turun menjadi 46 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya pengaruh "kebijaksanaan uang ketat" pada awal 1991. Namun, sejak 1991-1993 laju pertumbuhannya kembali meningkat yang mencapai 60 persen per tahun yang melebihi pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.

Tidak jauh berbeda dengan pola pertumbuhan PMA, pertumbuhan PMDN pada tahun 1988-1990 juga sangat menggembirakan yaitu sekitar 54 persen per tahun, namun terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 1991 yang hanya mencapai 7 persen. Hal ini sangat mungkin sebagai akibat dari perubahan kebijaksanaan kredit yang dilakukan pemerintah pada saat itu. Walaupun pada periode 1991-1993 pertumbuhan PMDN meningkat lagi, namun pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan PMDN periode 1988-1990.

Sementara itu, penanaman modal swasta (PMA, PMDN, dan non-fasilitas) di Batam terkonsentrasi pada sektor manufaktur, pariwisata dan sektor perumahan/ perkantoran. Pada periode 1990-1993, ketiga sektor tersebut secara konsisten menyerap 85 persen dari total investasinya.

Di lain pihak, sektor perdagangan hanya menyerap investasi tidak lebih dari 1 persen dan berada di bawah kemampuan daya serap investasi di sektor pertanian.

Tabel 5.6.3
Konsentrasi Investasi Swasta
Menurut Sektor di Batam, 1990-1993

Sektor	Investasi Kumulatif			
	1990	1991	1992	1993
Industri	1.033.579,7 (47,0)	1.288.880,7 (48,6)	1.515.900,5 (50,0)	1.743.773,8 (47,8)
Pariwisata	433.233,9 (19,7)	490.623,3 (18,5)	524.532,7 (17,3)	700.427,9 (19,2)
Perumahan/ Kantor	415.631,0 (18,9)	453.495,1 (17,1)	557.884,5 (18,4)	631.114,8 (17,3)
Jasa	213.313,3 (20,7)	307.634,1 (11,6)	318.358,0 (10,5)	
Pertanian	79.167,7 (3,6)	86.721,0 (3,3)	27.287,8 (2,9)	(14,9)
Perdagangan	24.190,2 (1,1)	24.663,8 (0,8)	27.287,8 (0,9)	29.184,5 (0,8)
Total	2.199.105,9 (100,0)	2.652.018,0 (110,0)	3.031.980,9 (100,0)	3.648.062,3 (100,0)

Sumber : Badan Otorita Batam, 1995

Catatan : - Nilai investasi dalam US\$ ribu dan bersifat kumulatif
- Angka dalam kurung menunjukkan persentase.

Tabel diatas mengindikasikan bahwa konsentrasi investasi sejalan dengan arah kebijaksanaan pengembangan Batam yang lebih ditujukan pada pengembangan industri, pariwisata dan transportasi (alih kapal). Di samping itu, rendahnya investasi pada sektor perdagangan di luar pariwisata, juga mencerminkan keadaan pasar lokal yang masih sempit karena jumlah penduduk yang terbatas.

PMA yang disetujui pada tahun 1983 hanya ditujukan untuk menghasilkan produk yang terbatas, yaitu alat-alat pertambangan minyak, besi dan baja serta produk pariwisata. Namun sesudah itu, jenis produk yang dihasilkan semakin bervariasi namun jumlahnya tidak mencapai 10 macam produk.

Tabel 5.6.4
Kumulatif PMA yang Disetujui Menurut Jenis Produk yang Dihasilkan
di Batam, 1983-1991

Jenis Produksi	Nilai (Rp juta)				Pangsa (%)			
	1983	1988	1990	1991	1983	1988	1990	1991
Elektronik	0	500	26.000	88.198	0	0,2	3,6	10,2
Kimia	0	3.495	3.495	3.495	0	1,2	0,5	0,4
Alat-alat Pertambangan	98.193	108.925	113.425	113.425	47,6	37,7	15,6	13,1
Besi dan Baja	76.465	77.465	127.665	131.965	37,1	26,8	17,6	15,2
Kertas dan Plastik	0	0	5.600	11.535	0	2,4	0,8	1,3
Makanan/pertanian	0	17.300	53.600	53.600	0	0	7,4	6,2
Real Estate	0	1.500	193.225	222.849	0	6,0	26,7	25,7
Pariwisata	31.564	73.629	187.129	221.329	15,3	0,5	25,8	25,6
Jasa dan Perbaikan	0	6.000	8.600	9.600	0	2,1	1,2	1,1
Mainan anak-anak dan lainnya	0	0	6.000	10.660	0	0	0,8	1,2
Total	206.222	288.814	724.739	866.656	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Badan Otorita Batam.

Meskipun produk PMA telah terdiversifikasi namun masih terkonsentrasi pada real estate dan pariwisata. Kedua jenis produk ini menyerap lebih dari 50 persen dari total investasi. Kemudian, diikuti oleh investasi pada industri besi dan baja dan alat-alat pertambangan. Produk baru berupa komponen elektronik juga mampu menyerap investasi PMA sebesar 10 persen dari total investasi pada tahun 1991. Hal ini disebabkan oleh arus PMA dari Singapura semakin besar khususnya pada jenis produk komponen elektronik.

Agak berbeda dengan pola konsentrasi PMA menurut produk yang dihasilkan, PMDN pada awalnya (1983) hanya terkonsentrasi pada 3 jenis produk seperti besi dan baja, bahan bangunan, kapal dan jasa perbaikannya. Perkembangan investasi dalam 8 tahun telah mengalami perubahan yang berarti dalam jenis produk yang dihasilkan. Investasi pada 3 jenis produk yang disebut di atas, yang pada tahun 1983 menyerap 100 persen dari total investasi PMDN, pada tahun 1991 hanya menyerap investasi sebesar 26 persen.

Tabel 5.6.5
Kumulatif PMDN Yang Disetujui Menurut Jenis
Produk yang Dihasilkan di Batam, 1983-1991

Jenis Produksi	Nilai (Rp. juta)				Pangsa (%)			
	1983	1988	1990	1991	1983	1988	1990	1991
Elektronik	0	21.940	30.250	30.250	0	6,5	4,2	3,6
Kimia	0	0	226.100	226.100	0	0	30,4	26,6
Alat-alat Pertambangan	0	53.145	60.412	60.412	0	15,7	8,1	7,1
Besi dan Baja	12.691	67.626	67.626	67.626	36,5	20,0	9,1	7,9
Garmen	0	7.980	7.980	7.980	0	2,4	1,0	0,9
Makanan/pertanian	0	0	9.462	17.662	0	0	1,3	2,1
Real Estate	0	0	106.175	175.925	0	0	14,2	20,7
Pariwisata	0	51.765	68.274	95.574	0	15,3	9,2	11,3
Bahan Bangunan	13.588	32.601	32.601	32.601	39,1	9,6	4,4	3,8
Sarung Tangan	0	6.600	9.522	9.522	0	2,0	1,3	1,1
Kapal dan Jasa Perbaikan	8.515	89.024	117.343	117.343	24,4	26,3	15,7	13,8
Lainnya	0	7.491	8.472	8.472	0	2,2	1,1	1,0
Total Batam	34.794	338.172	744.217	849.467	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Indonesia (Rp.Milyar)	18.799	53.707	129.812	170.889				
% dari Indonesia	0,2	0,6	0,6	0,5	x	x	x	x

Sumber: Badan Otorita Batam, 1995.

Lebih lanjut, Tabel 5.5.13 memperlihatkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya pada produk baru seperti kimia, real estate dan pariwisata cukup besar. Pada tahun 1991, investasi yang terserap pada produk-produk tersebut hampir 60 persen dari total investasi.

Dengan berkembangnya investasi PMDN sejak 1983-1991, maka peranan PMDN di Batam terhadap total PMDN di Indonesia telah meningkat, yakni dari 0,2 persen pada tahun 1983 menjadi 0,6 persen pada tahun 1988, namun mengalami penurunan yakni menjadi 0,5 persen pada tahun 1991.

Dalam kerjasama Segitiga Pertumbuhan Sijori umumnya dan Bajosi khususnya, Batam dapat memanfaatkan Singapura dari segi kemampuan modalnya. Dengan demikian, Singapura merupakan negara sumber PMA terpenting di Batam, terutama sejak tahun 1990. Bahkan, sebagian besar modal asing Singapura di Indonesia terserap di Batam. Hal ini terlihat bahwa sekitar 34 persen PMA

Singapura di Indonesia ditanamkan di Batam pada tahun 1993, dibandingkan dengan tahun 1990 yang hanya 21 persen. Singapura sendiri menduduki peringkat ke 4 terbesar di antara 44 negara yang melakukan investasi di Indonesia.

Tabel 5.6.6
Kumulatif Persetujuan PMA Menurut Negara Asal

Negara	Nilai (US\$ 000)			% Batam terhadap Batam			% Batam terhadap Indonesia		
	1983	1990	1993	1983	1990	1993	1983	1990	1993
Singapura	31.564	347.164	922.595	15,3	47,9	57,9		21,2	34,1
Amerika Serikat	151.765	173.561	191.211	73,6	23,8	12,0		8,4	5,4
Jepang	4.000	54.000	108.353	1,9	7,5	6,8		0,5	0,8
Hongkong	0	14.500	94.012	0	2,0	5,9		0,4	1,7
Belanda	9.450	18.950	66.924	4,6	2,6	4,2		1,0	2,8
Inggris	0	22.066	47.802	0	3,0	3,0		2,3	1,8
Swedia	0	16.300	16.300	0	2,4	2,4		32,3	31,9
Bahama	6.443	6.443	6.443	3,1	0,9	0,9		9,9	9,1
Panama	3.000	3.000	6.900	1,5	0,4	0,4		0,7	1,4
Lainnya	0	69.725	133.254	0	8,4	8,4		0,8	0,4
Total Batam	206.222	724.739	1.593.428	100,0	100,0	100,0		1,8	2,5
% dari Indonesia		1,8	2,5						
Total Indonesia (US\$ juta)	40.646	64.167							

Sumber : Badan Otorita Batam dan BKPM, 1995

Yang cukup menarik dari tabel di atas adalah bahwa Jepang yang merupakan investor asing terbesar di Indonesia, namun investasinya di Batam baru mencapai 7 persen atau 0,8 persen dari total investasi asing di Indonesia. Demikian pula Hongkong, yang pada tahun 1993, investasinya baru mencapai 6 persen dari total investasi asing di Batam atau 2 persen dari total investasi asing di Indonesia. Namun jika dilihat perkembangannya, maka cukup prospektif karena pada tahun 1983 kedua negara tersebut hanya memiliki porsi kurang dari 2 persen, namun pada tahun 1993 meningkat menjadi hampir 13 persen dari total investasi asing di Batam.

Karena perkembangan investasi PMA di Batam cukup pesat maka peranan investasi asing Batam terhadap total investasinya di Indonesia juga meningkat, yaitu dari 1,8 persen pada tahun 1990 menjadi 2,5 persen pada tahun 1993.

Dilihat dari kemampuan menarik minat investor asing, kemampuan Batam masih rendah dibandingkan dengan daerah Johor. Data Tabel 5.6.7 menunjukkan bahwa kumulatif investasi PMA 1987-1991 di Johor mencapai M\$ 5.179 juta sedangkan di Batam hanya sebesar M\$ 1.055 juta pada tahun 1991. Namun, sumbangan PMA Singapura di Johor hanya 19 persen, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan investor Singapura di Batam yang mencapai 51 persen. Sebaliknya, negara industri baru Asia ditambah dengan Jepang, peranannya dalam PMA di Johor cukup menonjol yaitu 50 persen, tetapi negara yang sama dalam PMA di Batam baru 22 persen. Oleh karena itu, Batam harus berusaha lebih keras untuk dapat menarik minat investor dari negara industri baru (NIB) Asia dan Jepang agar tidak ketinggalan dari Johor.

Tabel 5.6.7
Investasi Asing di Johor dan Batam
menurut Negara Asal

Negara	JOHOR Kumulatif November 1987-1991	BATAM Kumulatif Desember 1991
	Distribusi Persentase	
ASEAN	20,3	51,7
Indonesia	1,0	-
Malaysia	-	0,3
Philipina	0,3	-
Singapura	18,9	50,5
Thailand	0,2	0,9
NIEs-3	28,6	10,6
Hongkong	3,9	8,4
Korea	8,2	0,4
Taiwan	16,6	1,8
Jepang	21,3	11,4
Amerika Serikat	6,3	15,2
Eropah	6,4	10,0
Lainnya	17,1	1,1
Total (juta)	M\$. 5.178,9	US\$. 1.054,8

Sumber : Chia, 1993 (Tabel 9).

KESIMPULAN

Perkembangan pembangunan yang berjalan dengan pesat di Batam menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi meningkat cukup berarti. Namun, karena laju pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja jauh lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi, sehingga berakibat pada lambatnya peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk (PDRB/kapita) dan menurunnya tingkat produktivitas per tenaga kerja. Dengan kata lain perekonomian Batam berkembang seiring dengan turunnya tingkat produktivitas tenaga kerja.

Sejalan dengan arah pengembangan pembangunan Batam pada sektor industri, sejak satu dasawarsa terakhir Batam dapat dikategorikan masuk sebagai "daerah industri", di mana peranan relatif sektor industri mencapai di atas 30 persen dari total PDRBnya. Sedangkan, dari angka indeks Location quotient teridentifikasi bahwa lebih dari dua pertiga hasil industri di Batam diekspor ke luar daerah Batam.

Ekspor non-migas Batam meningkat dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 66 persen per tahun, sehingga peranannya dalam ekspor Batam pada tahun 1993 telah melampaui peranan ekspor migas. Demikian pula komoditas ekspor non-migas telah mengalami pergeseran dari komoditas yang bernilai tambah rendah ke komoditas yang bernilai tambah lebih tinggi. Untuk merebut peluang pasar ekspor perlu dipacu perkembangan jenis industri potensial dan prospektif sesuai dengan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh Batam.

Singapura cukup memberi manfaat dalam kerjasama ekonomi dengan Batam, di mana 43 persen ekspor Batam diserap oleh negara tersebut dan menggantikan peranan pasar tradisional, Amerika Serikat dan Jepang. Uni Eropah yang mulanya bukan merupakan negara tujuan ekspor Batam tetapi saat ini peranannya semakin meningkat mencapai lebih sedikit dari 15 persen. Artinya, pasar komoditas ekspor Batam mengalami pemekaran. Namun demikian, negara mitra dalam kerjasama SIJORI, yakni Johor (Malaysia), perannya sebagai pasar produk ekspor Batam belum berarti. Ini menunjukkan bahwa produk ekspor kedua daerah tersebut lebih bersifat substitusi dari pada bersifat komplementer.

Arus penanaman modal baik PMDN maupun PMA sangat menentukan gerak pembangunan terutama dalam perkembangan sektor industri, pariwisata dan real estate. Pada sektor industri, investasi lebih terkonsentrasi dalam menghasilkan produk kimia, kapal, elektronik, dan alat-alat pertambangan minyak serta produk besi dan baja. Sumber utama investasi PMA berasal dari Singapura yang sumbangannya lebih dari separuh investasi PMA di Batam, tetapi yang berasal dari negara industri baru (NIB) Asia dan Jepang masih relatif kecil peranannya.

Negara mitra kerjasama, Johor, lebih mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah itu, dibandingkan dengan jumlah investasi asing yang masuk ke Batam. Sumbangan utama investasi asing di Johor berasal dari negara-negara industri baru (NIB) Asia dan Jepang yang mencapai lebih dari setengah investasi asing di Johor. Oleh karena itu perlu usaha lebih keras oleh Batam, terutama menarik minat investor dari NIB dan Jepang pada masa mendatang.

VI

KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL BIMP-EAGA
(Kasus Propinsi Sulawesi Utara)
oleh: Ahmad Hamid

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
5401 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

BAB VI

KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL BIMP-EAGA

(Kasus Propinsi Sulawesi Utara)

oleh: Ahmad Hamid

6.1 PENDAHULUAN

Kerjasama ekonomi sub-regional atau Pusat Pertumbuhan Kawasan Timur ASEAN, BIMP-EAGA, merupakan kerjasama antara 4 negara anggota ASEAN: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Indonesia mencakup propinsi-propinsi: Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, sementara Malaysia mencakup wilayah Serawak dan Sabah, dan Filipina meliputi wilayah Mindanao.

Terbentuknya kerjasama regional atau sub-regional di atas berarti terbentuknya suatu wilayah yang lebih luas dengan harapan bahwa potensi ekonomi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayahnya yang dikembangkan sendiri-sendiri. Kunci keberhasilan di atas tidak hanya tertumpu pada komplementaritas ekonomi, tetapi juga pada kedekatan (jarak) antar bagian-bagian yang bergabung disertai dengan kemauan politik pemerintah negara anggota, koordinasi dalam menetapkan kebijaksanaan, peran-serta pihak swasta, terciptanya iklim investasi dan perdagangan yang kondusif dan penyediaan prasarana yang memadai (Kosim Ganda Taruna, 1995).

Untuk itu, pemerintah Indonesia mengharapkan agar kerjasama regional di atas dapat mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya propinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah berusaha untuk membangun Kawasan Timur Indonesia guna mencapai pembangunan daerah yang lebih berimbang, karena ada anggapan selama ini bahwa konsentrasi pembangunan lebih ditujukan di Kawasan Barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

Alasan terlalu terkonsentrasinya pembangunan di suatu daerah, tampaknya terjadi pula di Filipina dan Malaysia, sehingga negara tersebut perlu pula untuk mendorong pengalihan konsentrasi pembangunan yang tidak hanya di Metropolitan Manila dan Wilayah Semenanjung. Dengan demikian, ada kesamaan persepsi diantara negara yang bergabung bahwa pembentukan blok ekonomi regional di atas bukan hanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi belaka tetapi juga pertimbangan politis.

6.2 STRUKTUR PEREKONOMIAN BIMP-EAGA

Komplementaritas daerah-daerah yang tergabung dalam BIMP-EAGA secara sederhana dapat didekati melalui kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB-nya. Secara umum bisa dikatakan bahwa di BIMP-EAGA, sektor pertanian masih cukup dominan karena sumbangannya masih di atas 30 persen terhadap PDRB wilayahnya masing-masing, kecuali di Brunei Darussalam dan Serawak karena dua daerah ini ditunjang oleh sektor pertambangan yang sangat tinggi. Sedangkan sektor industri yang cukup berkembang terdapat di Mindanao (Wilayah X dan XII).

Sektor Industri yang terdapat di BIMP-EAGA umumnya masih berorientasi pada *resource basic industry* yaitu industri yang mengolah hasil-hasil pertanian seperti hasil hutan (kayu), perikanan, perkebunan, dan pengolahan hasil tambang seperti minyak, gas, serta hasil tambang dan galian lainnya.

Dengan struktur ekonomi yang hampir sama maka sudah dapat diduga, bahwa komoditas yang diperdagangkan pun relatif sama, sehingga sifatnya juga masih substitusi. Akibatnya, nilai perdagangan intra BIMP-EAGA masih rendah. Rendahnya nilai perdagangan diatas, selain dipengaruhi oleh hubungan transportasi yang terbatas, juga dipengaruhi oleh tingkat kepadatan rata-rata penduduk masing-masing daerah yang masih rendah.

Struktur ekonomi masing-masing daerah BIMP-EAGA dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.2.1
Pendapatan Domestik Regional Bruto Menurut
Lapangan Usaha, 1990 (dalam %)

Sektor	Sulawesi Utara	Brunei	Sabah	Sarawak	Wilayah IX Mindanao Barat	Wilayah X Mindanao Tengah	Wilayah XI Mindanao Selatan	Wilayah XII Mindanao Tengah
Pertanian	37,0	1,6	37,7	26,1	55,0	38,5	41,4	47,5
Pertambangan & Galian	0,9	55,4	20,0	26,6	0,7	1,7	3,5	0,4
Industri Pengolahan	4,8	-	8,0	16,3	10,2	21,5	18,5	24,8
Listrik, Gas, Air Minum	1,0	0,9	1,2	1,8	1,2	1,7	1,1	1,0
Bangunan	5,1	2,8	4,3	3,9	5,5	1,7	4,5	6,9
Perdagangan Hotel dan Restoran	13,3	11,3	9,7	8,1	9,5	19,4	19,3	6,9
Pengangkutan & Komunikasi	12,1	3,4	5,7	4,8	5,7	2,6	3,2	2,3
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3,5	4,0	5,5	4,6	0,8	0,8	0,9	0,7
Pemerintahan & Pertahanan	14,1	20,0	6,8	8,1	7,1	5,7	3,6	6,5
Jasa-jasa	8,2	0,6	1,1	0,7	4,2	3,8	4,0	2,9
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kosim Ganda Taruna: Prasarana Regional Dalam Hubungan Dengan Inisiatif BIMP-EAGA, 1995 yang dikutip dari:

- Sulawesi Utara Dalam Angka 1992
- Brunei Darussalam Statistical Yearbook 1991
- Profil Negeri Sabah, Unit Perancang Ekonomi JPM
- Profil Negeri Sarawak, Unit Perancang Ekonomi, JPM
- Mindanao Economic Development Council.

Dalam kehidupan sehari-hari, permintaan konsumen sangat bervariasi terutama jika terjadi peningkatan pendapatan dan penyebaran informasi, sehingga kemungkinan terjadinya perdagangan antar daerah sangat besar. Perdagangan dipermudah oleh tersedianya fasilitas komunikasi dan transportasi. Transportasi antara Sulawesi Utara dan Filipina Selatan, Malaysia Timur dan Brunei Darussalam hanya dimungkinkan oleh transportasi laut dan udara. Dewasa ini, baru ada transportasi udara secara reguler antara Sulawesi Utara dan Filipina Selatan dimana frekuensinya baru 3 kali dalam seminggu, sedangkan transportasi lain telah dibuka pada tahun 1995.

Belum adanya hubungan yang reguler antar daerah potensi yang bergabung dalam BIMP-EAGA selama ini mungkin oleh arus volume barang perdagangan yang masih kecil, dan faktor lain seperti peraturan pemerintah negara masing-masing yang kurang mendukung. Dengan dibukanya transportasi laut, maka akan

dimulai oleh arus penumpang, kemudian arus penumpang tersebut diikuti oleh arus barang, berupa barang tentengan atau perdagangan kecil-kecilan, yang akhirnya jumlahnya menjadi besar.

Arus penumpang dan barang yang melintasi batas negara, biasanya dihambat oleh berbagai peraturan pemerintah masing-masing. Untuk penumpang misalnya, diwajibkan mempunyai identitas pribadi berupa surat keterangan (paspor), dan bagi warganegara Indonesia yang bepergian ke luar negeri diwajibkan untuk membayar biaya fiskal sebesar Rp 250 ribu untuk angkutan udara, dan Rp 100 ribu untuk angkutan laut.

Penumpang yang bepergian mempunyai tujuan yang berbeda, namun secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu, pertama, sebagai turis. Kedua, sebagai pengusaha, pedagang atau melaksanakan tugas, dan ketiga, sebagai pencari kerja. Bagi kelompok pertama dan kedua, pemerintah setempat dengan senang hati akan menerimanya, namun untuk kelompok ketiga, sikap pemerintah masing-masing negara mungkin akan berbeda dan mungkin berkeberatan untuk menerimanya.

Untuk arus barang, masing-masing pemerintah juga mempunyai peraturan sendiri. Untuk Indonesia, setidaknya komoditas tertentu tidak bisa dimasukkan dengan bebas tanpa adanya persetujuan dari pemerintah karena akan menyaingi produk domestik. Untuk itu, perlu melindungi komoditas tersebut dari saingan luar negeri sehingga terjadilah proteksi, padahal kebijaksanaan ini harus ditinggalkan sesuai dengan kerangka GATT atau skema CEPT. Dengan demikian, masalah lintas batas antar negara memerlukan penanganan tersendiri.

Geografis Indonesia yang sangat luas menyebabkan faktor jarak menjadi salah satu kendala, sehingga faktor-faktor yang berkaitan dengannya seperti waktu dan biaya angkut akan muncul. Bukan tidak mungkin, untuk komoditas tertentu di Sulawesi Utara lebih baik mendatangkan komoditas tersebut dari daerah yang berdekatan, demikian juga yang terjadi di Filipina Selatan. Dalam hal ini, peranan swasta dan BUMN/BUMD sangat penting dalam menjembatani kebutuhan masing-masing daerah diatas.

Kerjasama ekonomi secara formal antar sub-wilayah juga mempunyai arti yang sangat penting dan akan berdampak terintegrasinya ekonomi mereka. Dalam hal ini, pengurangan/ penghapusan hambatan tarif dan non tarif atas arus barang/jasa diharapkan akan terjadi sehingga dapat melangkah lebih jauh ke arah faktor-faktor lainnya seperti bebasnya mobilitas tenaga kerja dan modal untuk keluar masuk di antara daerah yang bergabung mengingat luas wilayah, potensi wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar.

6.3 SUMBERDAYA MANUSIA

Luas area wilayah BIMP-EAGA sekitar 692.199 km² dan dihuni oleh sekitar 27,6 juta orang pada tahun 1991. Menurut tingkat pendapatannya, pendapatan antar daerah menunjukkan tingkat yang bervariasi dimana yang tertinggi adalah Brunei Darussalam. Selain itu, ditemui juga perbedaan potensinya. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan daya tarik investor baru, baik investor yang berasal dari daerah-daerah tersebut maupun dari luar daerah (termasuk dari negara lain) sehingga investasi tersebut dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 6.3.1 berikut.

Tabel 6.3.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan PDRB di BIMP-EAGA

Wilayah	Luas (Km ²)	Penduduk (000) Th. 1991	Kepadatan Orang/Km ² 1991	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)			
				1985	1987	1990	Pertb. rata-rata (g)
Brunei Darussalam	5,765	260	45	-	3,535,3	3,535,3 (Juta Br \$)	0,4%
Kawasan Timur Indonesia (Kalimin)	385,735	7,621	20	(dengan migas)	5,314,937,0	5,811,982,0	3,0%
Kalimantan Timur	211,440	1,899	9	(tanpa migas)	1,839,559,0	2,338,500,0 (Juta Rp)	9,3%
Kalimantan Barat	146,807	3,229	22	-	1,206,105,0	1,574,792,0	9,3%
Sulawesi Utara	27,488	2,493	91	-	770,340,0	8,344,254,0	7,5%
Malaysia Timur	198,069	3,415	17	-	-	-	6,8%
Sabah	73,620	1,767	24	4,952,6	6,893,3	- (Juta R M)	5,0%
Sarawak	124,449	1,648	13	5,348,7	6,820,9	-	
Filipina Selatan	102,630	16,283	159	-	-	-	
Mindanao Barat (Wilayah IX)	16,942	3,146	196	18,721,0	21,019,0	(Juta Peso)	2,3%
Mindanao Tengah (Wilayah X)	28,328	3,660	129	32,300,0	36,881,0	-	2,7%
Mindanao Selatan (Wilayah XI)	31,693	4,589	145	44,102,0	50,347,0	-	2,7%
Mindanao Tengah (Wilayah XII)	14,571	3,050	209	21,977,0	24,867,0	-	2,5%
ARMM	11,996	1,838	153	-	-	-	-
Total	692,199	27,579	40				

Sumber: Kosim Ganda Taruna "Prasarana Regional Dalam Hubungan Dengan Inisiatif BIMP-EAGA", 1995.

Sementara itu, pemilihan lokasi untuk suatu aktivitas ekonomi, selain dipengaruhi oleh sumberdaya alam (SDA), prasarana dan sarana fisik, letak strategis suatu daerah, juga dipengaruhi oleh jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1990. jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Utara sebanyak 2.477.189 orang, dan hasil Sensus Penduduk tahun 1980 berjumlah 2.115.384 orang. Ini berarti, laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sebesar 1,6 % per tahun selama periode 1980-90. Sementara itu, jika mengacu ke laju pertumbuhan penduduk tahun 1971-80, maka laju pertumbuhannya mencapai 2,3% per tahun. Ini berarti, laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara telah mengalami penurunan yang cukup berarti.

Turunnya laju pertumbuhan penduduk di satu pihak menunjukkan keberhasilan program pemerintah, namun di pihak lain menunjukkan respon yang baik dari penduduk. Kecilnya anggota keluarga, ada hubungannya dengan pandangan hidup dan pandangan hidup ini antara lain dipengaruhi oleh pendidikan. Seperti diketahui, sudah lama daerah Sulawesi Utara, sejak sebelum Perang Dunia II, merupakan daerah yang lebih maju tingkat pendidikannya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sebagaimana halnya di beberapa daerah di Indonesia, penurunan laju pertumbuhan penduduk akan merubah struktur umur, demikian pula mobilisasi penduduk akan mengakibatkan turunnya jumlah siswa sehingga beberapa sekolah banyak yang ditutup karena kekurangan murid. Demikian pula di Propinsi Sulawesi Utara, jumlah siswa SD, SLTP dan SLTA pada tahun 1993/1994 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah siswa pada sebelumnya seperti pada tahun 1989/1990.

Tersedianya berbagai bidang pendidikan kejuruan di Indonesia di samping pendidikan umum di tingkat menengah dan perguruan tinggi, maka jumlah dan mutu SDM sampai tingkat tertentu akan sangat memadai. Jika SDM-nya masih kurang trampil, maka dengan pendidikan yang diberikan melalui latihan, ketrampilannya dapat ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah, tidak semua perusahaan (terutama menengah dan kecil), menyediakan fasilitas latihan.

Departemen Tenaga Kerja di tiap propinsi, melalui Balai Latihan Kerja, menyediakan fasilitas latihan kerja. Sayangnya, BLK-BLK yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan berbagai ragam ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat dan pengusaha. Karena ketrampilan yang dibutuhkan juga mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Peranan BLK di atas dapat juga dipikul oleh pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus. Tapi umumnya, suatu kursus baru diadakan oleh lembaga pendidikan yang umumnya swasta, jika permintaan terhadap kursus tersebut cukup banyak.

Sensus Penduduk tahun 1990, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Sulawesi Utara sebesar 940.448. Bila dibandingkan dengan jumlah pekerja pada tahun 1980 yang sebanyak 660.252 orang, maka telah terjadi peningkatan kesempatan kerja yang cukup tinggi. Perkembangan kesempatan kerja berdasar sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3.2
Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha
di Sulawesi Utara, 1980 dan 1990.

Sektor	1980 (Orang)	%	1990 (Orang)	%
Pertanian	366.047	55,4	531.319	56,5
Pertambangan	2.989	0,5	12.492	1,3
Industri	54.514	8,3	73.453	7,8
Listrik, Gas dan Air Minum	922	0,1	2.079	0,2
Bangunan	26.859	4,1	35.838	3,8
Perdagangan	60.630	9,2	98.948	10,5
Angkutan	20.909	3,2	30.438	3,2
Keuangan	3.389	0,5	4.738	0,5
Jasa-Jasa	118.929	18,0	150.944	16,1
Lain-Lain	5.064	0,8	199	0,0
Tidak Terjawab				
Jumlah	660.252	100	940.448	100

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara, 1994

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor pertanian dalam arti luas tetap merupakan sektor yang terpenting sebagai penerima kesempatan kerja yaitu sebesar 56,5% pada tahun 1990. Jika dibandingkan dengan tahun 1980, maka peran sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja adalah yang paling banyak dan terus meningkat. Sektor lain yang cukup penting sebagai penyerap tenaga kerja pada tahun 1990 adalah sektor jasa-jasa (16,1%), sektor perdagangan (10,5%) dan sektor industri (7,8%).

Untuk tahun 1990, persentase tenaga kerja laki-laki dari angkatan kerja sebesar 70,7%, dan pekerja perempuan sebesar 31,7%. Persentase pekerja ini meningkat dibandingkan dengan tahun 1980 yang masing-masing sebesar 65,1 % pekerja laki-laki dan 24,8% pekerja perempuan. Dari angkatan kerja pada tahun 1990 tersebut, ternyata bahwa pekerja laki-laki sekitar 68,8% dan pekerja perempuan 31% atau, dengan tingkat pengangguran masing-masing adalah 1,9% dan 2,6%.

Rendahnya pekerja perempuan, disebabkan karena umumnya mereka berstatus ibu rumah tangga dimana persentasenya cukup tinggi yaitu sekitar 41,4%.

6.4 SEKTOR POTENSIAL (PERKEBUNAN DAN PERIKANAN)

Potensi suatu daerah yang dapat dikembangkan antara lain dapat dilacak melalui komoditas yang diekspor baik ke negara lain ataupun ke daerah lain. Dari komoditas yang diekspor tersebut, melalui pengamatan beberapa tahun, dapat diketahui komoditas mana yang potensinya besar. Tidak dapat dipungkiri, bahwa akan selalu terbuka kemungkinan melalui perbaikan berbagai fasilitas, modal dan teknologi serta informasi, komoditas baru dapat merupakan komoditi berpotensi ekspor.

Pendekatan lain untuk melihat potensi adalah melalui informasi dalam sektor ekonomi, kegiatan investasi apa yang terjadi atau yang akan terjadi. Kegiatan investasi tidak jarang terhambat oleh prasarana fisik dan non fisik, karena itu masih diperlukan berbagai perbaikan ataupun perluasan. Salah satu sumber informasi tersebut adalah informasi dari Bank Indonesia Cabang Manado, Propinsi Sulawesi Utara.

Volume dan nilai ekspor Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.4.1
Perkembangan Komoditas Ekspor Sulawesi Utara,
1989 dan 1993

Komoditi	1989		1993	
	Volume (ton)	Nilai (US\$ ribu)	Volume (ton)	Nilai (US\$ ribu)
Minyak kelapa	76.881	39.830	75.853	32.942
Bungkil Kelapa	38.750	4.663	56.895	6.614
Tepung Kelapa	444	285	3.275	2.636
Arang Tempurung	584	125	3.063	1.155
Pala Fulls	603	3.080	5.809	3.469
Ikan beku	2.201	1.880	585	360
Ikan	4.104	3.822	47.268	51.449
Kopi	-	-	-	-
Rotan	-	-	-	-
Vanili	2	68	58	1.647
Lainnya	294	535	17.600	2.287
Jumlah	135.508	54.220	210.406	102.559

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara, 1994.

Dari tabel diatas terlihat bahwa komoditas ekspor utama Propinsi Sulawesi Utara terutama berasal dari subsektor perkebunan (kelapa) dan sub-sektor perikanan serta industri hasil perkebunan dan perikanan (agro industri).

Agro industri yang berasal dari tanaman kelapa adalah: minyak kelapa, bungkil kopra, tepung kelapa, sabut kelapa, arang tempurung, perabot dari batang kelapa, anyaman dari kelapa, dan karbon. Sedangkan yang berasal dari perikanan adalah: ikan kaleng, ikan beku. Hasil tangkapan yang diekspor langsung tetapi tidak termasuk dalam agro industri adalah: cakalang beku, tuna beku, tuna segar (sashimi), lobster, ikan hiu segar, sirip ikan hiu, udang beku, ikan segar campuran, kakap/kerapu segar, ikan karang campuran dan sebagainya.

Untuk mengetahui potensi sub-sektor perkebunan, dapat dilihat melalui luas areal tanaman dan produksi sub-sektor perkebunan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 6.4.2
Luas Areal Tanaman Perkebunan di Propinsi
Sulawesi Utara, 1989 dan 1993

Tahun Komoditi	1989			1993		
	Perkebunan Rakyat (ha)	Perkebunan Besar (ha)	Jumlah (ha)	Perkebunan Rakyat (ha)	Perkebunan Besar (ha)	Jumlah (ha)
Kelapa	259.553	9.438	-	270.405	12.095	-
Pala	26.400	-	-	17.585	-	-
Coklat	1.950	-	-	7.383	-	-
Cengkih	43.600	-	-	43.700	-	-
Kopi	3.674	427	-	-	-	-
Vanili	-	-	2.250	-	-	4.000

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara: Sulawesi Dalam Angka 1993.

Sementara itu, produksi hasil sub-sektor perkebunan yang berorientasi ekspor di atas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.4.3
Produksi Sub-sektor Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara
(1989 dan 1993)

Tahun Komoditi	1989			1993		
	Perkebunan Rakyat (ton)	Perkebunan Besar (ton)	Jumlah (ton)	Perkebunan Rakyat (ton)	Perkebunan Besar (ton)	Jumlah (ton)
Kelapa	260.000	5.718	-	280.454	9.546	-
Pala	6.001	-	-	7.250	-	-
Coklat	195	-	-	1.858	-	-
Cengkih	3.500	-	-	6.000	-	-
Kopi	2.200	300	-	3.724	3.724	-
Vanili	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara: Sulawesi Dalam Angka 1993.

Tanaman perkebunan di Propinsi Sulawesi Utara yang dominan adalah tanaman kelapa, cengkeh, pala, coklat dan kopi. Luas areal semua tanaman perkebunan tersebut umumnya bertambah, kecuali tanaman pala, sedangkan dari volume produksi, semuanya bertambah. Patut dicatat bahwa bukan hanya tanaman pala saja yang pertambahan produksinya disebabkan oleh bertambahnya jumlah pohon yang menghasilkan, tetapi juga untuk tanaman lainnya. Jika luas tanaman pala tidak bertambah, maka dimasa yang akan datang jumlah produksi akan berkurang.

Tabel di atas memperlihatkan pula bahwa tanaman kelapa, pala dan cengkeh merupakan tanaman perkebunan yang telah lama ditanam oleh penduduk setempat. Untuk tanaman cengkeh dan pala, kedua komoditas tersebut sangat dipengaruhi oleh harga sehingga jika harga ditekan, maka luas tanaman akan berkurang.

Untuk tanaman coklat dan kopi, terutama coklat, merupakan tanaman yang relatif baru di Indonesia. Tanaman coklat baru belakangan ini digalakkan di Indonesia, dan berkembang terutama di propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan beberapa propinsi lainnya.

Informasi dari BKPM Propinsi Sulawesi Utara (Rencana Pengembangan Penanaman Modal Daerah Tingkat I Sulawesi Utara pada Pelita VI) menunjukkan bahwa, perluasan sektor pertanian masih sangat potensial di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Gorontalo namun cukup sulit untuk kabupaten lainnya.

Tanaman kelapa merupakan tanaman yang sudah lama dikenal penduduk dimana produksi yang berasal dari kelapa dan batangnya telah banyak yang diekspor. Produk yang berasal dari kelapa telah berkembang lebih maju di Philipina. Menurut keterangan dari pihak Bappeda Sulut (Sariawan, 1995), di Philipina, dari bahan baku kelapa (pohon dan buah) dapat dihasilkan 46 jenis produk, sedangkan di Sulawesi Utara baru sekitar 9 macam produk. Di Philipina, pohon kelapa disebut "*true of life*". Dengan terbentuknya kerjasama sub-regional BIMP-EAGA, maka lebih dimungkinkan untuk bekerjasama dalam bentuk investasi dan teknologi (transfer of technology).

Bahan baku kelapa untuk daerah Sulawesi Utara, jika masih diperlukan dapat didatangkan dari propinsi tetangga, terutama dari Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk tanaman perkebunan, tanaman kelapa di Sulawesi Tengah juga merupakan tanaman perkebunan yang penting. Dengan analisis perhitungan untung rugi maka bisa ditentukan, di lokasi mana agro industri berbahan baku kelapa berada, karena penentuan lokasi dengan memperhatikan faktor transportasi sangat penting untuk diketahui sebagai penentuan basis ekspor.

Tanaman cengkeh dimasa mendatang tampaknya tidak begitu cerah. Hal ini disebabkan karena terjadi kelebihan pasokan dibandingkan permintaannya. Akibatnya, harga cukup rendah meskipun ada usaha melindungi petani dengan adanya tata niaga cengkeh. Untuk ekspor tidak mudah, karena harga cengkeh di luar negeri umumnya lebih rendah dibandingkan harga di dalam negeri.

Tanaman pala merupakan tanaman yang juga sudah lama dikenal oleh penduduk setempat. Menurut informasi dari Bappeda Sulut, permintaan pala dunia kurang lebih 12.000 ton/tahun dan sekitar 80 persen dari kebutuhan tersebut dipasok oleh Indonesia. Pesaing Indonesia yang kuat hanya Pulau Grenada yang produksinya kurang lebih 1.500 ton. Meskipun demikian, dalam permainan harga, negeri kecil ini sangat berperan. Dikatakan bahwa pala yang baik adalah pala yang berasal dari Indonesia, terutama yang berasal dari Sulawesi Utara dan Maluku Utara, karena aromanya yang khas.

Tanaman kopi dan coklat termasuk tanaman perkebunan rakyat yang luas lahan dan produksinya meningkat cukup cepat. Meskipun demikian, data ekspor komoditas kopi untuk tahun 1993 belum diperoleh, sementara ekspor kopi untuk tahun 1989 dan 1988 masing-masing adalah: 532 ton dan 154 ton, sedangkan untuk coklat mungkin komoditas ini termasuk dalam daftar komoditas lainnya, karena volume dan nilainya relatif kecil

Tanaman vanili termasuk tanaman baru. Tanaman vanili baru dimulai pada tahun 1984 dengan luas lahannya baru mencapai 216 ha. Pada tahun 1993, luas tanamannya sudah mencapai 4.000 ha atau laju pertumbuhan arealnya sekitar 38,3 % per tahun. Tingginya laju pertumbuhan tersebut karena kecilnya luas tanaman pada tahun dasar. Pada tahun-tahun belakangan ini, laju pertumbuhannya semakin menurun.

Menurut volume dan nilai ekspor, nilai ekspor per ton cukup mahal (US\$ 28.396,5/ton). Tanaman vanili, seperti juga tanaman cengkeh terutama terdapat di Kabupaten Minahasa. Bila harga cengkeh dalam jangka panjang tetap dikontrol, maka bukan tidak mungkin sebagian petani akan merubah tanaman cengkehnya menjadi tanaman vanili.

Selanjutnya, produksi perikanan dari Propinsi Sulawesi Utara masih cukup potensial. Data dari Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa produksi dan potensi perikanan, baik perikanan laut, perikanan budidaya maupun perikanan darat masih sangat potensial. Produksi dan potensi perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.4.4
Produksi Perikanan dan Tingkat Eksploitasi Menurut
Cabang Usaha di Sulawesi Utara (1989 dan 1993)

Cabang Usaha	1989		1993	
	Produksi (ton)	Tkt. Eksploitasi (%)	Produksi (ton)	Tkt. Eksploitasi (%)
A. Perikanan Laut	66.942,8	20,74	89.419,4	27,70
- Perairan 12 mil	66.523,5	52,83	57.074,0	53,27
- Perairan ZEE	419,5	0,21	22.345,4	11,35
B. Budidaya	70,0	0,05	9959,9	0,05
C. Perikanan Darat	7.145,4	4,62	7.599,5	4,91
- Perairan Umum	3.016,0	52,91	2.943,1	51,63
- Budidaya	4.129,4	2,77	4.656,4	3,13
- Tambak	112,2	0,13	169,2	0,19
- Kolam	2.174,8	15,53	2.272,6	16,23
- Sawah	1.710,6	8,15	1.773,4	8,44
- Karamba	131,8	0,49	441,2	1,63
Jumlah	74.088,2		97.978,8	

Sumber : Dinas Perikanan, Propinsi Sulawesi Utara, 1994.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, produksi ikan secara keseluruhan meningkat yaitu dari 74.088 ton pada tahun 1989 menjadi 97.978 ton pada tahun 1993 atau naik dengan 7,2 % per tahun. Pertumbuhan produksi ikan tersebut, terutama didukung oleh pertumbuhan yang tinggi produksi perikanan laut dari perairan ZEE.

Dilihat dari tingkat eksploitasinya, perikanan laut sudah dieksploitasi sekitar 27,7%, sementara budidaya baru 0,05 % dan perikanan darat 4,9 %. Masih rendahnya tingkat eksploitasi tersebut, antara lain karena masih terbatasnya modal, teknologi dan peralatan penangkapan ikan.

Perkembangan alat penangkap ikan seperti perahu, kapal motor dan motor tempel dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.4.5
Perkembangan Jumlah Perahu, Kapal Penangkap
Ikan di Sulawesi Utara, 1989 dan 1993 (unit)

Perahu/Kapal	1989	1993
Perahu tanpa Motor	24.542	24.409
Motor Tempel	3.576	3.828
Kapal Motor	108	205

Sumber : Dinas Perikanan, Propinsi Sulawesi Utara, 1994

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Utara diketahui pula bahwa konsumsi ikan perkapita di Sulawesi Utara pada tahun 1989 sebesar 29,73 kg, sementara pada tahun 1993 sekitar 27,06 kg. Ini berarti, konsumsi ikan per kapita di Sulawesi Utara telah mengalami penurunan sekitar 9 %. Penurunan ini dimungkinkan oleh pertumbuhan produk perikanan yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya. Atau yang sangat memungkinkan adalah, produk perikanan tersebut lebih banyak untuk keperluan ekspor dibandingkan dengan kebutuhan domestik

Pernyataan di atas diperkuat dengan data ekspor komoditas hasil perikanan, di mana pada tahun 1989, ekspor produk perikanan baru mencapai 4.362,5 ton, namun pada tahun 1993 telah meningkat menjadi 45.616 ton. Ini berarti telah terjadi peningkatan sekitar 10 kali selama 4 tahun. Akibatnya, pasokan dalam negeri secara relatif menjadi berkurang.

Dari tabel di atas terlihat, bahwa laju pertumbuhan kapal motor pada periode 1989-1993 cukup tinggi yaitu sekitar 17,4% pertahun, sementara laju pertumbuhan motor tempel sangat rendah yaitu 1,7% per tahun, bahkan untuk perahu tanpa motor laju pertumbuhannya negatif yaitu -0,1% pertahun. Artinya terjadi modernisasi penggunaan alat penangkap ikan dari perahu ke kapal motor dan perahu tempel.

Untuk perairan pantai (hingga 12 mil), perahu tanpa motor dan motor tempel masih dapat dipergunakan untuk menangkap ikan, namun untuk perairan ZEE yang lebih layak adalah kapal motor. Dengan memperhitungkan perkiraan tingkat eksploitasi, maka jumlah perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor masih bisa untuk ditingkatkan, demikian juga dengan tingkat eksploitasinya.

Perhitungan potensi merupakan usaha guna menjaga kelestarian produksi ikan. Eksploitasi penangkapan yang berlebihan dapat merusak kelestarian produksi. Cara-cara penangkapan pun dapat merusak kelestarian seperti pemakaian alat peledak, racun, atau menggunakan pukat harimau.

Dari Dinas Perikanan setempat diperoleh informasi tentang keluhan nelayan tradisional mengenai berkurangnya ikan yang ditangkap akibat pemakaian pukot harimau. Pukot harimau, berdasarkan peraturan pemerintah, dilarang digunakan dan dilaksanakan di wilayah perairan Indonesia, namun larangan tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, karena sangat luasnya areal perairan Indonesia. Untuk pengawasan misalnya, memerlukan banyak armada yang memadai dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, pengawasan dan penangkapan dilakukan secara sporadis (sekali-kali), tetapi bukan berarti bahwa pengawasan rutin tidak ada.

Untuk melakukan penangkapan ikan diperairan ZEE diperlukan kapal motor. Kapal motor yang berukuran besar umumnya lebih disukai, karena dapat melaut berhari-hari. Di samping itu, berdasarkan waktu (musim), karena ikan juga berpindah-pindah dan dengan kapal yang besar ikan-ikan yang berpindah tersebut dapat ditangkap.

Pengadaan kapal penangkap ikan di Indonesia, menghadapi berbagai masalah karena terbentur pada peraturan larangan impor. Harga kapal berukuran 50-60 Gross Ton (GT), buatan Cina, Korsel dan Jepang misalnya, harganya sekitar Rp 400 juta, namun dengan kapal yang berbobot sama buatan dalam negeri (galangan kapal nasional) sekitar Rp 3 milyar. Akibatnya, perolehan kredit dari bank untuk pengadaan kapal di atas tidak mudah, karena jumlah modal sebesar itu untuk dikembalikan dalam jangka waktu dua-tiga tahun belum tentu bisa (Fenny Wurangan, Kompas 12/10/1995).

Mungkin karena harga kapal mahal, hampir semua industri pengalengan ikan di Bitung tidak memiliki armada penangkapan ikan sendiri. Akibatnya, mereka sangat tergantung pada pasokan bahan baku ikan dari luar yang sebagian besar dikuasai oleh armada kapal asing berbendera Indonesia. Menurut salah seorang Staf Bagian Produksi PT Estadha Pesca Bitung, sekitar 75 % bahan baku dikuasai oleh kapal besar yang berasal dari luar.

Di lain pihak, harga ikan di Filipina lebih mahal jika dibandingkan dengan harga ikan di Bitung, sehingga bagi penangkap ikan di perairan Indonesia akan lebih menguntungkan jika dijual langsung ke Filipina. Terjadinya kesulitan bahan baku, dapat dilihat dari turunnya ekspor ikan kaleng dari Sulut. Dewasa ini, dua lagi perusahaan pengalengan ikan yaitu PT Esthada Pesca dan PT Union Pacific yang beroperasi di Sulawesi Utara.

Kelangkaan kapal besar nasional untuk bisa menangkap ikan diperairan ZEE, dapat mengundang kapal ikan asing masuk, baik melalui izin penangkapan secara resmi maupun secara illegal. Seperti diberitakan oleh berbagai surat kabar, banyak kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia beroperasi secara illegal.

Penambahan armada penangkap ikan sangat dibutuhkan dan menurut keterangan Ditjen Perikanan, rencana pengadaan kapal ikan untuk perairan ZEE pada Repelita VI akan berjumlah 1.762 kapal, yang rinciannya adalah: untuk menambah armada kapal sebanyak 660 buah, mengganti kapal tuna 157 buah, dan mengganti kapal asing 945 buah. Penambahan armada penangkap ikan ini terbentur pada harga dan kemampuan produksi di dalam negeri.

Melindungi kepentingan nasional merupakan sikap yang terpuji. Upaya untuk melindungi dan mendorong produksi kapal dalam negeri juga merupakan bagian dari kepentingan nasional tersebut. Pengembangan produksi ikan dan kaitannya seperti penghidupan nelayan, lapangan kerja, perolehan devisa dan pengaruh bidang perikanan terhadap aktivitas ekonomi lainnya merupakan kepentingan nasional juga. Untuk itu, dalam rangka menjaga kepentingan nasional secara keseluruhan, barangkali kebijakan pengembangan industri susu dalam negeri patut dicontoh. Pada industri susu, terdapat ketentuan perimbangan bahan baku susu yang di impor dengan bahan baku susu dalam negeri.

6.5 PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Hubungan Perdagangan dan Kerjasama Integrasi ekonomi secara alamiah terjadi bila terdapat unsur komplementaritas. Dalam hal ini, komplementaritas ekonomi antar daerah yang tergabung dalam BIMP-EAGA belum kuat. Kondisi ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.5.1
Perkembangan Ekspor-Impor Non Migas
Intra BIMP-EAGA, 1989-1994

Negara	Tahun					
	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Nilai Ekspor (FOB US\$)	70,852,418	70,986,179	59,638,297	84,630,321	110,316,349	153,792,718
Brunei D.	-	-	-	-	-	-
Malaysia	1,62	0,2	2,7	0,2	3,1	1,5
Filipina	-	0,3	1,1	0,6	0,9	0,6
Nilai Impor (CIF US\$)	9,377,120	7,643,354	36,114,721	19,320,029	11,616,556	12,714,117
Brunei D.	-	-	-	-	-	-
Malaysia	-	28,5	-	0,7	-	-
Philipina	8,3	-	-	6,4	0,6	8,2

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1995

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tidak ada ekspor dari propinsi Sulawesi Utara ke Brunei Darussalam selama periode 1989-1994, sementara ekspor ke Malaysia dan Filipina relatif kecil yaitu masing-masing sekitar 1,5% dan 0,6% dari total ekspor Sulawesi Utara. Demikian pula dengan impornya, karena tidak terdapat impor dari Brunei Darussalam dan Malaysia, sementara impor dari Filipina cukup berarti yaitu sekitar 8,2% dari total nilai impor Sulawesi Utara pada tahun 1994.

Tinggi-rendahnya nilai ekspor dan nilai impor antar sub-regional antara lain disebabkan oleh ada tidaknya rute angkutan (terutama pelayaran) secara reguler, dan jenis komoditas yang dihasilkan serta diperdagangkan (*tradeable goods*). Patut dicatat bahwa, baik ekspor maupun impor dari propinsi Sulawesi Utara secara riil sebenarnya lebih besar dari data yang ada, karena pelabuhan ekspor dan impor bisa melalui pelabuhan lain seperti pelabuhan Surabaya dan Jakarta, namun tidak dicatat sebagai ekspor/impor propinsi Sulawesi Utara.

Menurut informasi dari Kanwil Perhubungan setempat, sampai sekarang belum ada rute pelayaran secara reguler dari pelabuhan Bitung, di Sulawesi Utara ke Filipina, Malaysia Timur dan Brunei Darussalam. Yang ada, baru penerbangan dari perusahaan penerbangan milik Bouraq secara reguler, 3 kali dalam seminggu ke Filipina. Seperti diketahui, perdagangan langsung akan lebih mudah terjadi bila ada pelayaran reguler antar sub-regional secara langsung. Dalam kaitan ini, tampaknya pemerintah sudah menyadarinya karena mulai tahun 1995 telah dibuka pelayaran perintis dari Bitung ke General Santos di Mindanao.

Dengan terbukanya pelayaran langsung diatas, akan terbuka pula mobilitas (arus) orang dan barang. Mungkin dalam tahap permulaan, perdagangan terjadi dalam jumlah kecil-kecilan seperti barang tetangga tapi bila dijumlah dalam jangka waktu satu tahun, misalnya, angkanya mungkin akan besar. Persoalan yang muncul adalah, mengenai peraturan tentang arus orang dan barang yang melewati tapal batas negara.

Komoditas ekspor dari Sulawesi Utara umumnya komoditas hasil perkebunan dan perikanan. Di antara komoditas tersebut, ada yang telah diolah namun ada pula yang masih mentah. Sementara komoditas impor, masih terbatas pada semen, bahan bangunan, seng, peralatan telekomunikasi dan lain-lain. Komoditas beras untuk tahun-tahun terakhir juga masih diimpor dimana situasi ini tampaknya berkaitan dengan kondisi pasar dalam negeri.

Komoditas ekspor dan impor Sulawesi Utara menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan masih kecil. Kenyataan ini bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.5.2
Nilai Ekspor dan Impor Sulawesi Utara, 1989 & 1994

Komoditas	1989	1994
Ekspor (FOB US\$)	70.852.418	153.792.718
1. Fish, fresh, chilled or frozen	3.639.007	43.745.476
2. Fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fresh or preserved	424.169	15.678.250
3. Feeding stuff for animals	8.651.045	5.481.330
4. Oil seeds use for extractions of other fixed vegetable oils	-	5.926.973
5. Fixed vegetable fats and oils solid, crude, refined/fractionated	49.836.725	68.669.991
6. Others	8.301.472	14.290.698
Impor (CIF US\$)	9.369.122	12.714.117
1. Rice	1.405.000	2.413.577
2. Residual petroleum products, n.e.s. and related materials	2.790.409	1.519.928
3. Lime, cement and fabricated construction materials	130.000	3.259.037
4. Zinc	776.432	1.057.310
5. Telecommunication equipment n.e.s. and parts	23.650	2.693.401
6. Others	4.243.631	1.770.864

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1995

Selanjutnya, partisipasi sektor swasta (PMA, PMDN, dan Non-Fasilitas), iklim investasi dan perdagangan yang kondusif, serta penyediaan prasarana yang memadai akan mendorong terjadinya arus modal masuk ke dalam negeri. Untuk itu, perusahaan seperti perusahaan Multinasional (MNCs), dalam memilih suatu negara/daerah, harus mempunyai *locational advantages* yang mencakup :

1. Mempunyai "*absorptive capacity*" yaitu menunjukkan tersedianya tenaga kerja yang trampil dan produktif, diikuti oleh pembangunan prasarana fisik yang memadai dan peraturan pemerintah yang mendukung, serta kondisi kerja yang menguntungkan.
2. Dapat dijadikan sebagai basis ekspor. Untuk itu, selain mempunyai "*absorptive capacity*" di atas, juga harus mempunyai "*comparative advantage*" seperti tenaga bermutu dengan upah yang relatif rendah, lokasi yang strategis, biaya transportasi yang rendah. Tenaga kerja termasuk faktor produksi yang mobil, namun dari segi sosial dan ekonomi biayanya lebih tinggi dibandingkan kapital dan teknologi, sehingga yang lebih mobil adalah kapital dan teknologi.
3. Investasi dapat juga ditujukan untuk pasar dalam negeri jika negara tersebut mengenakan hambatan impor (*import barriers*) demikian juga jika pasar dalam negeri cukup luas.
4. Kaya akan sumberdaya alam atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan.
5. Adanya biaya informasi dan komunikasi. Melakukan investasi di negara lain yang berbeda struktur ekonominya, peraturan, sosial, budaya dan sistem politiknya akan menghadapkan investor asing kepada biaya informasi atas tenaga kerja, pasar modal, prasarana, peraturan pemerintah, pemasaran, hak cipta, dan akses ke material dan lingkungan politik (Shankar Sharma, 1992)

Kemudian, seperti diuraikan di depan, untuk melihat potensi daerah selain melalui komoditas yang diekspor (baik keluar negeri maupun ke daerah lain), dapat juga melalui rencana investasi. Rencana investasi pada umumnya lebih tinggi dari realisasinya. Dari jumlah proyek periode 1967-1993, hasil monitoring pengembangan dunia usaha yang dilaksanakan oleh BKPM Sulut, terdapat laporan bahwa realisasi investasi dan tenaga kerja menurut sektor masih rendah.

Nilai investasi domestik di Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa rencana (nilai investasi yang disetujui) PMDN berjumlah Rp 2.606 milyar, namun realisasinya baru mencapai Rp 1.095 milyar. Ini berarti realisasi PMDN baru mencapai 42,0 persen. Sementara proyek investasi asing yang disetujui senilai US\$ 553,3 juta, dan realisasinya mencapai US\$ 144,5 juta. Ini berarti realisasi PMA hanya mencapai 26,1 persen.

Untuk melihat lebih jauh tentang rencana dan realisasi investasi, baik asing maupun domestik di Sulawesi Utara bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.5.3
Rencana dan Realisasi Investasi di Sulawesi Utara
Menurut Sektor (1967 - Juni 1993)

Sektor	PMDN (Rp Juta)			PMA (US\$ Ribu)		
	Pro-yek	Rencana	Realisasi	Pro-yek	Rencana	Realisasi
Pertanian Tanaman Pangan	3	77.147,4	135	-	-	-
Perkebunan	2	416.075,1	467.997,9	2	4.874,0	183,3
Peternakan	2	83.130,5	3.160,6	-	-	-
Kehutanan	5	60.645,6	38.577,1	-	-	-
Perikanan	13	247.080,3	46.295,4	13	23.116,9	7.618,5
Pertambangan	3	18.749,0	6.037,2	3	256.000,0	61.102,6
Industri Makanan	20	112.532,8	182.189,7	20	12.856,6	3.459,5
Industri Kayu	4	15.585,3	9.293,0	-	-	-
Industri Kimia	2	9.599,8	8.601,9	-	-	-
Industri Mineral Non Logam	1	5.000,0	245,0	-	-	-
Industri Logam Dasar	1	938,1	71,6	1	800,0	800,0
Industri Lainnya	12	83.166,0	5.115,0	-	-	-
Perhotelan	14	245.833,9	14.640,1	14	34.410,0	8.758,2
Pengangkutan	7	31.310,0	6.667,3	7	-	-
Jasa Lainnya	7	47.326,6	1.630,1	-	-	-

Sumber : BKPM Sulawesi Utara, 1995

Sementara itu, jumlah proyek dan nilai investasi, baik PMDN maupun PMA pada tahun 1994 dan 1995 menurut sektor adalah sebagai berikut.

Tabel 6.5.4
Jumlah Proyek, Rencana dan Realisasi PMDN dan PMA, 1994-1995

Sektor	PMDN (Rp juta)						PMA (US\$ ribu)					
	1994			1995			1994			1995		
	Proyek	Rencana	Realisasi	Proyek	Rencana	Realisasi	Proyek	Rencana	Realisasi	Proyek	Rencana	Realisasi
Perkebunan	2	21.073,75	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-	-	1	30.000	-	2	1.500	220
Pertambangan	-	-	-	1	14.100	-	-	-	-	2	1.000	-
Industri Makanan	1	165.300,0	-	2	412.035	-	-	-	-	3	17.718	555
Industri Kimia	-	-	-	-	-	-	1	1.047	-	-	-	-
Perhotelan	2	50.500,0	-	-	-	-	-	-	-	2	42.690	-
Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	1	3.500	733	1	250	-
Semen	1	432.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BKPM Sulawesi Utara.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai investasi PMDN yang sangat menonjol adalah untuk sektor perkebunan¹⁴, perikanan, industri makanan dan perhotelan, sedangkan untuk PMA sektor yang penting adalah pertambangan, perikanan, perhotelan dan industri makanan. Secara umum bisa dikatakan bahwa terdapat kesamaan investasi dalam tiga sektor kegiatan yang dipilih baik oleh PMDN maupun PMA yaitu : sektor perikanan, industri makanan dan perhotelan.

Untuk tahun 1994 dan 1995, rencana investasi untuk PMDN dan PMA yang paling banyak adalah sektor industri makanan (6 proyek) perhotelan (4 proyek), perikanan (3 proyek), pertambangan (3 proyek), perkebunan (1 proyek) dan semen (1 proyek).

Yang cukup menarik dari data BKPM Sulut di atas, adalah PMA yang berasal dari tiga negara yaitu: Australia, Singapura dan Philipina.. Investor Australia semuanya melakukan investasinya di bidang pertambangan emas, Singapura di bidang perhotelan dan investor Philipina di sektor yang berkaitan dengan perikanan dan tanaman kelapa.

Komoditi baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Sulawesi Utara adalah sayuran segar. Rintisan ekspor sayur beku ke Jepang dilakukan oleh BPEN-Depdag yang bekerjasama dengan JETRO dimana dua tenaga ahli Jepang

14 Untuk sub-sektor perkebunan, sebagian besar investasi di atas diperuntukkan bagi penanaman dan pengolahan tebu.

baru-baru ini berkunjung ke Indonesia. Dua tenaga ahli tersebut antara lain mengunjungi Sulawesi Utara. Seperti diketahui, Sulawesi Utara juga amat berperan dalam memasok sayur-sayuran ke Irian Jaya, Maluku, Kalimantan Timur dan Sulawesi di mana volumenya mencapai 1.500 ton per bulan. Sistem pertanian dan tingkat kebersihan lingkungan di sentra produksi Tomohon dinilai oleh ahli Jepang diatas sangat baik (Business News, 20/11/1995).

Kecenderungan investasi di sektor perhotelan tidak lepas dari perkembangan pariwisata dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Utara. Objek wisata di Sulawesi Utara antara lain adalah wisata alam seperti wisata bawah laut, danau dan lain-lain. Perkembangan pariwisata juga didukung oleh adanya penerbangan langsung dari luar negeri ke Sam Ratulangi di Manado.

KESIMPULAN

Gagasan pembentukan kerjasama sub-regional ASEAN merupakan gagasan yang baik, karena dengan adanya kerjasama tersebut maka daerah/lingkup kerjasama menjadi lebih luas dan merupakan suatu unit ekonomi.

Daerah yang lebih luas, potensi alam yang sama atau beragam, jumlah penduduk yang besar dan lokasi yang menguntungkan sehingga semua faktor tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

BIMP-EAGA merupakan kerjasama sub-regional sesama negara anggota ASEAN yang merupakan daerah perbatasan. Sebagaimana namanya, daerah perbatasan dalam banyak peristiwa laju pertumbuhannya tidak sepesat di daerah sekitar pusat kekuasaan. Jadi penyebaran peningkatan aktivitas ekonomi ke daerah perbatasan merupakan kegiatan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Untuk menjadikan BIMP-EAGA satu "unit ekonomi", maka diperlukan kerjasama yang erat antar negara anggota dan jika mungkin, penyeragaman peraturan-peraturan yang ada.

Kerjasama dalam bidang perhubungan (laut, udara dan darat), lalu lintas orang dan barang (perdagangan), jasa keuangan, komunikasi, investasi, dan lain-lain yang dianggap perlu. Dalam bidang perhubungan, menciptakan hubungan yang berjadwal (reguler) sangat penting untuk memudahkan lalu lintas orang dan barang, hingga memungkinkan terjadinya "trade creation".

Dilihat dari lokasi, Sulawesi Utara relatif dekat dengan Asia Timur seperti Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan, Cina. Negara-negara ini merupakan negara yang sudah berkembang, kecuali Cina, yang baru belakangan ini maju pesat. Melihat lokasi Sulawesi Utara dari sudut jarak, maka lokasinya lebih menguntungkan

dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya hubungan laut langsung dengan negara-negara tersebut.

Melihat jarak, Sulawesi Utara lebih dekat dengan negara Filipina dibanding dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Di lain pihak, Filipina mempunyai keunggulan dalam pengolahan komoditi kelapa dan pengolahan ikan.

Kerjasama dalam komoditas kelapa dan perikanan antara Indonesia dan Filipina akan menguntungkan kedua pihak baik dalam bentuk pengolahan maupun pemasarannya karena Propinsi Sulawesi Utara merupakan propinsi penghasil kelapa dan memiliki perairan yang kaya akan ikan. Propinsi yang berdekatan dengan Sulawesi Utara yaitu Propinsi Sulawesi Tengah, juga penghasil kelapa yang cukup penting.

Objek wisata di Propinsi Sulawesi Utara cukup banyak dan cukup menarik, seperti wisata Marina, Bunaken dan budaya masyarakat Sulawesi Utara yang cukup terbuka. Hal ini merupakan salah satu faktor penting untuk pengembangan pariwisata. Data BKPMMD menunjukkan bahwa investasi di bidang perhotelan cukup menjanjikan.

Pengembangan kegiatan ekonomi yang pesat, perlu didukung oleh lembaga perizinan yang ada, di samping perubahan peraturan lintas orang dan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Untuk itu, otonomi daerah perlu diberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing mengingat mereka lebih menguasai permasalahan daerahnya sendiri (otonomi daerah).

VII

EVALUASI DAN PERMASALAHAN MASA DEPAN

oleh: Prabowo

IV

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

BAB VII

EVALUASI DAN PERMASALAHAN MASA DEPAN

oleh: Prabowo

Uraian terdahulu telah menggambarkan arus perdagangan antara negara-negara ASEAN dan daerah-daerah yang terkait dalam berbagai skema kerjasama sub-regional. Masing-masing memperlihatkan bahwa negara anggota ASEAN belum merupakan partner dagang utama bagi negara anggota ASEAN lainnya. Meskipun komplementaritas ekonomi dan perdagangan intra-industry di antara negara-negara ASEAN menunjukkan kecenderungan yang meningkat, satu sama lain memperlihatkan *net-gains* yang positif bagi pelaksanaan AFTA, oleh karena berbagai macam faktor *net-gains potensial* dari AFTA bagi masing-masing negara anggota ASEAN meskipun positif tidak terlalu besar dan berarti¹⁵

Argumen keuntungan komparatif di atas hanya memperhitungkan keuntungan/kerugian statik dan belum memperhitungkan keuntungan/kerugian dinamik seperti potensi *economies of scale* dari produksi, distribusi dan konsumsi, dinamika kompetisi dan efisiensi, kemajuan teknologi dan lain-lain. Pada tahap ini, masih terlalu dini untuk melihat unsur dinamika tersebut di atas, namun demikian tampaknya keuntungan dinamik dari AFTA tersebut - secara rata-rata - juga tidaklah akan terlalu besar mengingat kecilnya keuntungan statik yang diperoleh.

Dengan kata lain, landasan kerjasama ekonomi ASEAN akan sangat lemah apabila didasarkan pada rational pembentukan kawasan perdagangan bebas dan/atau custom-union. Belum lagi bila kita memperhitungkan variabel ekonomi-politik dan "*biaya-biaya*" yang terlibat di dalamnya, termasuk keengganan Indonesia untuk melaksanakan komitmen AFTA secara "murni dan konsekwen"¹⁶. Sementara itu, beberapa kecenderungan dan perkiraan perkembangan ekonomi dunia dan regional memberikan perspektif yang menguntungkan bagi kawasan linker Pacific (*The Pacific Rim*). Integrasi ekonomi di kawasan ini telah berlangsung dalam tahap yang cukup tinggi dan dengan kecepatan yang meningkat,

15 Selain relatif kecilnya arus perdagangan intra ASEAN, sebagai salah satu indikasi utama bagi terbatasnya *net-gains* dan perdagangan bebas intra-ASEAN, beberapa studi kuantitatif juga telah menghasilkan simulasi dengan kesimpulan utama yang sama; yaitu relatif kecilnya *net-gains* bagi masing-masing negara ASEAN dalam skema AFTA. Dengan kata lain, baik *trade diversion* maupun *trade creation* yang diperkirakan akan terjadi tidaklah terlalu berarti. Untuk studi ini, lihat misalnya, B Ramasamy; *Trade Diversion in an ASEAN Free Trade Area*, ASEAN Economic Bulletin, Vol 12 No 1, July 1995; FG Adams and I Park; *Measuring the Impact of AFTA: An Application of a Linked CGE System*, Journal of Policy Modelling, Vol 17 No 4, 1995.

16 Pertemuan puncak ASEAN di Bangkok bulan Desember 1995 merupakan langkah mundur bagi AFTA karena ASEAN bersepakat untuk mentoleransi "backtracking"-nya Indonesia, yang demi "kepentingan nasional" mengecualikan beberapa komoditi pertanian termasuk kedelai, terigu, bawangputih dan cengkeh.

selain pasar yang luas yang terintegrasi di kawasan di atas, juga didorong oleh perdagangan dan investasi, yang berjalan baik menurut skema *H-O-S* maupun *intra industry trade*, dan yang tidak kalah pentingnya adalah relokasi dan restrukturisasi industri.

Dengan demikian, yang terjadi di kawasan ini *bukan hanya* arus investasi yang mengikuti arus perdagangan, *akan tetapi* bersamaan dengan itu pula, *arus perdagangan yang mengikuti arus investasi*. Seiring dengan proses integrasi ekonomi di kawasan Pacific, terjadi pula proses globalisasi ekonomi dengan ciri-ciri utama seperti kompetisi dan aliansi yang meningkat, integrasi sektor finansial, pembagian kerja internasional yang baru dan cepat berubah serta pengorganisasian produksi antar daerah, perusahaan, negara. Dunia internasional, dan blok-blok regional di dalamnya, bukan hanya merupakan suatu masyarakat konsumen akan tetapi juga satuan produksi barang dan jasa-jasa (di mana sektor yang berkembang cepat adalah sektor finansial dan turisme).

Dalam lingkungan ekonomi dan bisnis semacam ini di satu pihak, dan di pihak lain keterbatasan potensi ekonomi negara-negara ASEAN, rasional bagi kerjasama ekonomi ASEAN adalah menjadi kawasan ini sebagai salah satu satuan produksi ekspor barang dan jasa bagi kawasan lingkaran Pacific dan dunia. Dalam konteks ini, maka arti penting dan relevansi AFTA bagi negara anggotanya adalah kemampuannya untuk:

1. *memperlancar transaksi* dan mobilitas faktor produksi,
2. meraih *economies of scale* dari prasarana antar negara (atau di dalam kawasan sub-regional), dan
3. *mengembangkan iklim usaha dan kelembagaan*

sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya dapat menunjang pembangunan kawasan ini untuk menjadi salah satu pusat produksi ekspor terpenting di dunia.

Berkembangnya kawasan segitiga pertumbuhan di Asia didasarkan atas pertimbangan ini¹⁷. Segitiga pertumbuhan memanfaatkan komplementaritas faktor produksi antar daerah yang berdekatan secara geografik, namun berada dalam wilayah negara yang berbeda, dalam rangka meraih keunggulan kompetitif untuk ekspor ke daerah lain.

¹⁷ Disamping alasan bahwa pengembangan kawasan pertumbuhan jauh lebih praktis dibandingkan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas. Yang terakhir ini, karena sifatnya yang menyeluruh, mensyaratkan tingkat perbedaan pendapatan per kapita yang rendah, perubahan peraturan negara, kebijaksanaan perdagangan dan investasi secara menyeluruh, koordinasi politik dan birokrasi dari semua negara yang terlibat. Patut dicatat bahwa ASEAN sebagai organisasi memegang rekor jumlah rapat yang tertinggi di antara semua skema kerjasama ekonomi regional di dunia.

Salah satu prasyarat utama adalah kerjasama antar sektor swasta dan pemerintah di dalam dan di antara masing-masing negara yang terlibat¹⁸.

Perbedaan mendasar antara kerjasama ekonomi regional dan segitiga pertumbuhan adalah yang terdahulu memfokuskan kepada produksi barang dan jasa dari negara-negara anggota sedangkan yang disebut terakhir adalah berorientasi ekspor ke ekonomi global, dan besaran pasar kerjasama ekonomi dunia secara relatif tidak penting. Dengan kata lain, segitiga pertumbuhan adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep EPZ (Export Processing Zone) nasional ke tingkat sub-regional untuk memanfaatkan sumberdaya produksi yang strategik seperti teknologi, manajemen, tenaga kerja, lahan, mineral dan lain-lainnya.

Di antara beberapa faktor kunci bagi keberhasilan pengembangan kawasan pertumbuhan sub-regional yang sangat penting dari sudut kebijaksanaan adalah:

- (i) pengembangan infrastruktur yang terpadu,
- (ii) komitmen politik dan koordinasi kebijaksanaan dan/atau kelembagaan,
- (iii) manajemen dan administrasi kawasan yang efektif dan efisien¹⁹.

Dari beberapa pengamatan dan konsultasi selama ini, tim studi ini merasakan bahwa kelemahan Indonesia yang mencolok justru berada pada ketiga faktor tersebut di atas. Misalnya, di dalam skema BIMP-EAGA, telah muncul beberapa keluhan dari PLN tentang belum siapnya kawasan lokasi industri di sekitar Manado. Bahkan lokasi tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD. *Kurangnya koordinasi* semacam ini akan memperlambat pengembangan kawasan ini dan akan meningkatkan biaya proyek yang besar karena sebagian prasarana yang sudah siap belum dapat dioperasikan. Lemahnya koordinasi ini pada gilirannya merupakan pencerminan dari kelemahan kelembagaan dan kemampuan administrasi.

Kehendak politik dan koordinasi kebijaksanaan adalah hal yang selalu sukar dilaksanakan di Indonesia. Seringkali hal ini berakar pada struktur ekonomi-politik birokrasi yang terlalu sentralistik serta tidak konsisten. Kasus Sijori memberikan gambaran yang khas tentang hal ini. Implementasi yang kaku dari pengembangan industri kapal nasional, di bawah BPIS, telah berhasil menghancurkan kesempatan

18 Lihat, misalnya, M. Tang and M. Thant, *Growth Triangles: Conceptual Issues and Operational Problems*, Economic Staff Paper No. 54, Manila: ADB, Feb. 1994.

19 Faktor lain adalah komplementaritas ekonomi dan lokasi geografik yang berdekatan, lihat M. Tang and M. Thant, *op cit*.

Pulau Batam untuk memproduksi kapal pesiar kecil, motor boat dan sebagainya dimana *real demand* telah ada, karena produksi tersebut termasuk dalam daftar negatif di Pulau Batam. Akibatnya, produksi *yacht* dan kapal motor yang diperlukan Singapura tersebut terpaksa dilakukan di Subic Bay (Filipina). Begitu pula halnya dengan garis kebijaksanaan yang kaku untuk memusatkan pada industri hi-tech di Pulau Batam telah menghambat banyak kesempatan lain dan bersamaan dengan itu langsung bersaing dengan prioritas Singapura. Patut dicatat bahwa industri hi-tech itu tidak memerlukan banyak lahan dan sangat *skill intensive*; hal-hal yang justru menjadi *competitive edge*-nya Singapura dan bukan Indonesia/Batam.

Meskipun barangkali kita telah mengalami banyak kemajuan dalam pengembangan kerangka kelembagaan dan kemampuan administrasi kita dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu, akan tetapi kemampuan kita dibandingkan negara tetangga dan dengan tantangan yang dihadapi masih jauh *ketinggalan*. Pengembangan pusat pertumbuhan sub-regional, dengan kondisinya yang khas, sebenarnya memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk melaksanakan terobosan yang mendasar. Akan tetapi, meskipun terdapat beberapa terobosan, otonomi yang diberikan kepada administrator kawasan pertumbuhan masih sangat terbatas dan masih berkantor pusat di Jakarta.

Salah satu *imperative* yang ditimbulkan oleh definisi integrasi ekonomi-politik global adalah implementasi langkah strategik yang bermula pada konsolidasi kekuatan nasional. Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini kondisi negeri ini tidak terlalu menggembirakan. Apabila daya saing dan efektivitas kerjasama regional dan internasional negeri ini tidak diperbaharui dan ditingkatkan, maka kelangsungan eksistensi nasional akan terancam. Dalam konteks ini, maka reformasi birokrasi pemerintahan merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi. Dalam persaingan global, *'not only firms compete in the global arena, but governments also compete'*.

Serangkaian langkah deregulasi yang telah dilakukan pemerintah, meskipun merupakan langkah yang relevan, tidak dengan sendirinya akan menyelesaikan semua masalah. Bahkan, justru menimbulkan masalah baru yang, ditambah dengan *ancaman* dan *kesempatan* global, mensyaratkan pendekatan dan pengembangan kelembagaan yang relevan. Dewasa ini, arah strategik pembangunan adalah *'getting prices and institution right'*.

Langkah strategik apapun yang akan dijabarkan untuk menghadapi tantangan di atas, efektivitas pelaksanaannya sangat tergantung pada satu prasyarat fundamental, yaitu adanya *'a well resourced and motivated bureaucracy'*. Berbeda halnya dengan masyarakat tradisional (kurang beradab), membangun sebuah masyarakat beradab (*civil society*) selalu mensyaratkan biaya yang tidak kecil.

Lebih dari dua ratus tahun yang lalu, bapak ilmu ekonomi Adam Smith telah memperingatkan kita,

"..We may observe that the government in a civilized country is much more expensive than in a barbarous one... There are many expenses necessary in a civilized country for which there is no occasion in one that in barbarous. Armies, fleets, fortified palaces, and public buildings, judges, and officers of the revenue must be supported, and if they be neglected, disorder will ensue..." (*The Wealth of Nations*, 1776: p. 530-1)

DAFTAR PUSTAKA

1. Agency for Trade Research and Development, Ministry of Trade & the USAID Trade Implementation and Policy Projects; 1994, *The Uruguay Round and Its Benefit to Indonesia*, Jakarta
2. Allen, Chris & Whitley, John; 1994, Modeling Bilateral Trade dalam 'A Survey of Existing Approach' dalam S. Hall, ed., *Applied Economic Forecasting Techniques*, Hemel Hempstead, UK: Harvester Wheatsheaf
3. Arief, Mohamed; 1991, *The Malaysian Economy: Pacific Connection*, Oxford University Press
4. Aroef, Mathias; 1985, *Peningkatan Produktivitas melalui Kemajuan Teknologi: Produktivitas dan Teknologi*, dalam Ravianto (ed), *Seri Produktivitas*, Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta
5. Asian Development Bank; 1994. *IMT-GT Development Project*, Jakarta
6. Balassa, B; 1974; 'Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market: An appraisal of the evidence', *Journal of Manchester School, Manchester*
7. Balassa, B; 1979, 'The Changing Patterns of Comparative Advantage, *Review of Economics and Statistics*
8. Chia, Siau Yue, 1993, *Foreign Direct Investment in ASEAN Economics*, Asian Development Review Vol 11 (1)
9. Davenport, M; 1985, 'The Economic Impact of the EEC' dalam *The European Economy: Growth and Crisis* (Boltho A, ed), Oxford University Press
10. Djoyohadikusumo, Sumitro; 1991, *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*, LP3ES
11. Elek, Andrew; 1995, *APEC Beyond Bogor*, *Asian Pacific Economic Literature*, ANU, Canberra, May
12. El-Agraa, AM; 1984, 'International Economic Integration' dalam Greenaway D, ed., *Current Issues in International Trade*, London: Macmillan
13. Ganda Taruna, Kosim; 1995, *Prasarana Regional dalam Hubungan dengan Inisiatif BIMP-EAGA*, makalah pada Seminar ISEI, Manado

14. Krugman, P; 1979, 'Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade', *Journal of International Economics*
15. Lee Tsao Yuan; 1994, The ASEAN Free Trade Area, *Asian Pacific Economic Literature*, ANU, Canberra, May
16. Lindert, PH; 1986, *International Economics*, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin,
17. Lauw, Linda; 1993, *The East Asean Growth Area on Polygone: Some Perspective*, Singapore
18. Mangkusuwondo, Suhadi; 1995, *Indonesia dalam Proses Integrasi Perekonomian Dunia*, dalam Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan, Beragam Pemikiran, PT Gramedia Jakarta
19. Melo de, J & Panagariya, A, 1992; *The New Regionalism in Trade Policy*, IBRD, The World Bank, Washington DC
20. Mubariq, Ahmad; 1992, *Economic Cooperation in Sijori Growth Triangle: An Indonesian Perspective*, EKI Vol XL
21. Nomura Research Institute and ISEAS; 1995, *Foreign Direct Investment in Asia*, ISEAS, Singapura
22. Pangestu, Mari; 1992, *Indonesia: Toward Non-oil Exports* dalam Huges (ed); *The Danger of Exports Pessimism*, San Fransisco, ICS Press
23. Sondakh, LW; 1995, *Nilai Strategis Polygon BIMP-EAGA dalam Perdagangan Bebas dan Pembangunan Regional KTI*, Makalah pada Seminar Seminar ISEI, Manado
24. Soesastro, Hadi; 1992, *Teknologi dan Keunggulan Komparatif dalam Arsyad Anwar (ed), Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*, PT Gramedia, Jakarta
25. Suryadi, Ace; 1993, *Hubungan antara Pendidikan, Ekonomi dan Ketenagakerjaan: Sebuah Mitos tentang Pengangguran Tenaga Kerja* dalam Ananta (ed), *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta
26. Sharma, Shankar; 1985, *The Role of Technology in Market Integration in the Asia-Pacific Region*

27. Tan, Joseph L.H: 1994, *Regional Economic Integration in the Asia-Pacific*, ISEAS, Singapura
28. Thee, Kian Wie; 1995, *Foreign Direct Investment in Indonesia since Independence*, makalah pada Euroseas, 29 Januari, Leiden
29. Thee, Kian Wie; 1994, *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*, LP3ES, Jakarta
30. Winters, LA; 1991, *International Economics*, London: Harper Collin Academic, 4th eds,
31. Yuan, Lee Tsao, 1994; *The ASEAN Free Trade Area*, Asian Pacific Economic Literature, ANU, Canberra
32. Badan Koordinasi Penanaman Modal, 1995, *Laporan Tahunan BKPM*, Jakarta
33. BKPMD Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kodya Batam, *Laporan Tahunan*, 1994
34. Batam Industrial Development Authority, 1993, *BIDA 22 Years*, Batam
35. Bappeda Propinsi Aceh dan Sulawesi Utara, *Perencanaan Pembangunan Propinsi*, 1995
36. Biro Pusat Statistik; 1995, *Ekspor-Impor Indonesia, 1989-1994*, publikasi terbatas, Jakarta
37. Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Utara, 1994, *Laporan Tahunan*
38. OPDIB dan Kantor Statistik Propinsi Riau, *Laporan Tahunan Perkembangan Ekonomi Batam*, berbagai publikasi
39. Kantor Statistik Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Batam 1994, *Propinsi/Kodya dalam Angka*
40. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Pertanian Propinsi Aceh dan Sulawesi Utara, *berbagai publikasi*

KERJASAMA REGIONAL DAN SUB-REGIONAL DI KAWASAN ASEAN

